

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**UPAYA PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN BULUNGN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

TRIANINGSIH WIDIATI

NIM. 500025217

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

ABSTRAK

Diperlukan upaya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan pengembangan pariwisata menggunakan strategi yang sesuai dengan kondisi lingkungan di Kabupaten Bulungan. Selain pemerintah, masyarakat tentunya juga diharapkan aktif berperan dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Bulungan. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan, dan (2) untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Kabupaten Bulungan, yang kemudian difokuskan pada dinas-dinas yang bertugas menangani dan mengelola objek wisata. Informan dalam penelitian ini adalah aparat yang bekerja pada dinas pariwisata dan masyarakat. Teknik analisa data yang dipergunakan adalah teknik analisa deskriptif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan sampai dengan saat ini belum memiliki program pengembangan wisata yang rinci. Pada dasarnya, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan telah melakukan pemasaran dan promosi terhadap objek wisata. Akan tetapi, belum ada regulasi yang jelas yang mengatur tentang pengelolaan objek wisata kepada pada saat ini di Kabupaten Bulungan. Selain itu, belum ada regulasi yang jelas mengenai retribusi objek wisata sehingga objek wisata belum dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Bulungan. Pemerintah telah melakukan kerjasama dengan masyarakat di sekitar objek wisata. Kerjasama ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan sekitar objek wisata. Faktor yang mempengaruhi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan terbagi atas faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor pendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan antara lain potensi wisata di Kabupaten Bulungan, baik dari segi wisata alam, wisata sejarah, wisata arung jeram, wisata bahari. Faktor penghambat pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan antara lain keterbatasan anggaran dan belum adanya investor yang tertarik untuk membangun pariwisata Kabupaten Bulungan. pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan memiliki kelemahan di beberapa faktor.

Kata kunci: pengembangan pariwisata, pendapatan asli daerah, pengelolaan objek wisata

ABSTRACT

It requires efforts from the Department of Tourism of Bulungan district to implement tourism development strategy in accordance with the environmental conditions in Bulungan District. Besides the government, the community of course are also expected to play an active role in the development of attractions in Bulungan District. The goal of this study are: (1) to analyze the development of the tourism sector done in an effort to increase revenue in Bulungan District, (2) to determine the factors that influence the development of tourism sector in an effort to increase revenue in Bulungan District, and (3) to determine the condition of the infrastructure for the development of attractions in Bulungan.

This study uses a qualitative approach. Through a qualitative approach, the data collected is not in the form of numbers, but data derived from interviews manuscripts, field notes, personal documents, memos, and other official documents. Location of this research is in Bulungan District, which is then focused on the departments responsible for handling and managing the tourism. Informants in this study are the apparatus acting on the department of tourism and the community. Data analysis technique used is descriptive analysis technique with steps of data reduction, data presentation, and conclusion.

The results show that the Tourism Office of Bulungan District until now has not had a detailed program of tourism development. There are no clear regulations governing the management of the tourism to at this point in Bulungan District. In addition, there are no clear regulations regarding the retribution of tourism that the tourism cannot be utilized in an effort to increase revenue of Bulungan District. The Government has been working with communities around the tourism site. This cooperation is carried out with the involvement of the community in maintaining cleanliness and safety in the environment surrounding the tourism sites. Factors affecting the development of tourism sector in Bulungan District is divided over supporting factors and also inhibitor factors . Factors supporting the development of tourism in Bulungan District, among others tourism potential in Bulungan District, both in terms of natural tourism, historical tours, rafting tours, marine tours. Factors inhibiting the development of tourism in Bulungan District, among others, budget constraints and lack of investors interested in establishing tourism of Bulungan district. the development of tourism sector in Bulungan district has weaknesses in some factor. Conditions for the development of tourism infrastructure in Bulungan still inadequate. There are some facilities that are built on the attraction now.

Key words: development of tourism, local revenue, management of tourism

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Upaya Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Rangka
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan.

Penyusun TAPM : Trianingsih Widiati
NIM : 500025217
Program Studi : Magister Administrasi Publik
UPBJJ : Samarinda
Hari/Tanggal : Sabtu, 9 Januari 2016

Menyetujui :

Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. Tri Damayanti, M.A
NIP. 196004101989032001


Dr. Suharno, M.Si
NIP.196804172000031001

Mengetahui,

**Ketua Bidang Ilmu/Program
Magister Administrasi Publik**

**Direktur
Program Pascasarjana**


Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003


Dr. Suciati, M.Sc, Ph.D
NIP. 195202131985032001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Trianingsih Widiati
NIM : 500025217
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Upaya Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Rangka
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan

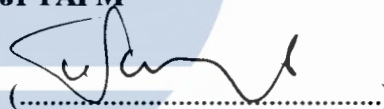
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Sabtu / 9 Januari 2016
W a k t u : 07.18 – 09.15 Wita

Dan telah dinyatakan LULUS

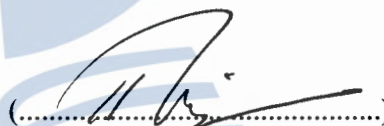
PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
Dr. Darmanto, M.Ed



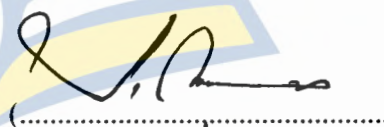
(.....)

Penguji Ahli
Dr. Prof. Dr. Ngadisah, M.A



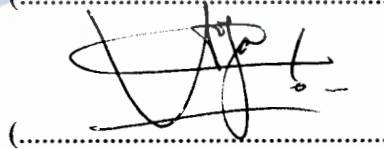
(.....)

Pembimbing I
Dr. Suharno, M.Si



(.....)

Pembimbing II
Dr. Tri Damayanti, M.A



(.....)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Batasan masalah	15
D. Perumusan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian	16
F. Kegunaan Penelitian.....	16
1. Secara Teoretis.....	17
2. Secara Praktis.....	17
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	19
1. Pengelolaan dalam Pariwisata	19
2. Pemerintah Daerah.....	47
3. Pengembangan Kelembagaan	62
4. Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	66
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	72
C. Kerangka Berpikir	76
D. Operasionalisasi Konsep	78

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	80
B. Sumber Informasi dan Peilihan Informan	80
C. Instrumen Penelitian.....	81
D. Prosedur Pengumpulan Data	82
E. Teknik Analisis data.....	83

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	87
B. Hasil	101
1. Pengembangan Sektor Pariwisata yang Dilakukan dalam Upaya Meningkatkan PAD di Kabupaten Bulungan	101
2. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pengembangan Sektor Pariwisata dalam Upaya Meningkatkan PAD di Kabupaten Bulungan.....	118
3. Kondisi Infrastruktur bagi Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Bulungan Kabupaten Bulungan	121
C. Pembahasan.....	122

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita mengisyaratkan adanya kesadaran akan pentingnya dimensi kemanusiaan dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat diketahui secara jelas dari terjadinya pergeseran orientasi pembangunan. Orientasi yang berawal dari pemikiran yang mengasumsikan bahwa sumber daya manusia sebagai obyek pembangunan telah berubah kearah pemikiran yang mengasumsikan bahwa sumber daya manusia harus berperan aktif sebagai subyek yang terlibat dalam proses pembangunan.

Dari berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat, secara esensial dapat kita maknai betapa pentingnya aspek sumber daya manusia dalam setiap organisasi. Secara tidak langsung hal ini akan menimbulkan kesadaran bahwa efektivitas organisasi pada akhirnya akan bermuara pada kualitas manusianya. Pentingnya kualitas manusia disebabkan karena manusia memiliki dimensi yang hakiki sebagai “pemegang kunci sukses” dalam setiap organisasi. Dalam hubungan ini Karlof dan Ostblom (1997: 81) menyatakan bahwa sejak dasawarsa delapan puluhan, tumbuh kenyataan yang menegaskan bahwa kemampuan mengelola manusia dalam suatu organisasi dengan cara yang efektif akan dapat membantu untuk memperbaiki kualitas yang diterima konsumen dan produktivitas organisasi. Dengan kata lain, dapat disimpulkan

secara sederhana bahwa manusia yang diperlakukan dengan baik akan termotivasi dan akan memiliki usaha yang lebih besar untuk melayani orang lain sehingga akhirnya akan meningkatkan daya guna, serta akan menggunakan energi yang lebih besar untuk menyelesaikan tugasnya.

Masyarakat sebagai unsur sumber daya manusia juga wajib membantu setiap tahap dalam proses pembangunan. Adanya campur tangan dari masyarakat akan membuat pembangunan lebih berjalan dengan seimbang. Konsep masyarakat sipil pada hakikatnya merupakan konsep tentang masyarakat yang mandiri atau otonom. Masyarakat mandiri merupakan suatu entitas yang mampu memajukan diri sendiri, dapat “membatasi” intervensi pemerintahan dan negara dalam realitas yang diciptakannya, serta senantiasa memperlihatkan sikap kritis dalam segala aspek kehidupan. Sejumlah karakteristik penting masyarakat yang menjadi rujukan studi ini mengacu pada ciri-ciri utama yang menyangkut respon serta perannya terhadap pembangunan di segala bidang.

Di sisi lain, pemerintah tentunya juga sangat dibutuhkan untuk melakukan perencanaan terhadap proses pembangunan. Aspek pembangunan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia tentunya tidak dapat dilepaskan dari otonomi daerah. Sejak pelaksanaan otonomi daerah yang diatur berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah banyak daerah yang melakukan pemekaran. Pemekaran wilayah dapat dilakukan apabila mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pemekaran

wilayah menjadi suatu daerah otonom dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri.

Salah satu wilayah yang terbentuk dari pemekaran adalah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Dengan adanya pemekaran tersebut, Provinsi Kaltara harus menjadi daerah yang mandiri. Daerah yang telah dimekarkan sebagaimana halnya Provinsi Kaltara seharusnya tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Daerah harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada, dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah yang bersangkutan. Berdasarkan landasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk dapat menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, maka suatu daerah sangat memerlukan adanya sumber pendapatan yang berasal dari daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah diketahui bahwa terdapat ketergantungan yang cukup besar dari daerah kepada pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut telah menyebabkan kreativitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber ekonomi tidak dapat berkembang secara optimal. Konsekuensi yang diciptakan oleh tingginya

ketergantungan daerah terhadap penerimaan dari pusat antara lain adalah rendahnya peranan pendapatan daerah dan rendahnya kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah. Kondisi seperti ini yang kemudian dapat menyulitkan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara nyata.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa dengan menjadi daerah yang mandiri, untuk dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri maka suatu daerah harus mampu meningkatkan kemandirian dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pada dasarnya, seluruh daerah di Indonesia termasuk Provinsi Kaltara memiliki sumber-sumber keuangan dan potensi yang tinggi dalam bermacam-macam sektor. Namun demikian, sektor-sektor yang dapat diandalkan tersebut seringkali luput dari perhatian pemerintah daerah maupun dari masyarakat lokal.

Salah satu sektor yang memberikan peluang cukup baik untuk dikembangkan di Provinsi Kaltara adalah sektor pariwisata. Pada saat ini, banyak daerah di Indonesia yang melakukan berbagai upaya untuk dapat mengembangkan sektor pariwisatanya. Hal ini disebabkan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat dimanfaatkan oleh daerah dalam meningkatkan kemandirian dan mensejahterakan masyarakat. Sektor pariwisata dapat menjadi sektor andalan bagi suatu daerah sebagai sumber ekonomi. Berbagai daerah di Indonesia pada dasarnya memiliki potensi pariwisata yang sangat baik untuk dikembangkan. Kegiatan pariwisata dan

berbagai kegiatan yang terangkum di dalamnya telah memiliki regulasi yang terkoordinir sedemikian rupa, serta memiliki pengaturan tersendiri untuk menangani masalah-masalah yang timbul dalam berbagai usaha yang ada di dalamnya.

Perkembangan pariwisata terjadi sangat pesat selama beberapa tahun terakhir. Fenomena global menunjukkan adanya keterlibatan jutaan manusia, baik kalangan masyarakat, industri pariwisata maupun kalangan pemerintah, dengan biaya yang cukup tinggi dalam sektor pariwisata. Perkembangan yang sangat pesat tersebut telah menyebabkan perubahan sektor pariwisata baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, dorongan untuk melakukan perjalanan, cara berpikir, maupun sifat perkembangan pariwisata itu sendiri.

Peningkatan jumlah wisatawan ini tentunya membuat sektor pariwisata harus mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah Indonesia. Pada saat ini, Indonesia dihadapkan pada persoalan untuk menata produk-produk wisata sehingga semakin diminati wisatawan. Pada dasarnya, jenis kegiatan pariwisata di dunia terbagi menjadi tiga bentuk. Pertama, negara-negara yang bergabung dalam mengelola sektor pariwisatanya, seperti Hawaii, Bermuda, Karibia, Canary Island, dan lain-lain. Kedua, negara-negara yang menganggap sektor pariwisata sebagai sebuah aktivitas penting atau sektor penting, misalnya Indonesia, Singapura, Malaysia, Inggris, Amerika, negara-negara OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*), China, Thailand, dan lain-lain. Ketiga, negara-negara yang menganggap sektor

pariwisata sebagai sektor pendukung, misalnya Iran, Brunei, Saudi Arabia, dan lain-lain (Suwantoro, 2004: 41).

Menurut Suwantoro (2004: 42), banyak alasan mengapa bagi sebuah negara, khususnya negara yang sedang berkembang untuk merancang kebijakan pariwisata. Di samping alasan yang mendasar bahwa segala sumber daya harus dapat digunakan dan dialokasikan seefisien mungkin, pariwisata juga mampu memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian negara. Banyak pihak yang berharap bahwa sektor pariwisata akan mampu menjadi pengganti pemasok devisa utama setelah migas. Dibalik harapan yang begitu besar, Indonesia memang memiliki potensi alam dan budaya luar biasa melimpah dan benar-benar layak untuk dibanggakan sebagai tambang industri jasa pariwisata yang masih luas dan belum banyak terjamah. Dengan keragaman kekayaan alam dan budaya inilah pariwisata diharapkan mampu melakukan pengemasan yang berkualitas. Pendayagunaan ini secara maksimal harus direkayasa sedemikian rupa agar tidak merusak penyangga kekayaan alam-budaya. Sebaliknya, harus mampu secara optimal memberi nilai tambah ekonomis bagi setiap daerah pemilik potensi wisata (Sugiantoro, 2005: 54).

Sektor pariwisata memiliki peran penting di Indonesia. Hal ini disebabkan sektor pariwisata telah memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, bahkan sektor ini diharapkan akan dapat menjadi penghasil devisa nomor satu. Namun dalam situasi demikian muncul pertanyaan terkait pengembangan pariwisata. Apakah pengembangan

kegiatan pariwisata dilakukan segenap wilayah Indonesia atau hanya di beberapa daerah tertentu yang dianggap paling siap? Apabila jawabannya adalah iya, maka untuk sementara waktu ini niat menarik wisatawan dalam jumlah besar hanya terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu (*overcrowding*). Kondisi ini dapat menurunkan kualitas kehidupan masyarakat yang pada akhirnya justru akan menghilangkan daya tarik daerah tersebut. Selain itu, juga perlu disadari bahwa keindahan lingkungan alam dapat terganggu bila jumlah dan kualitas perilaku wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut tidak dapat dikendalikan secara efektif (Suwanto, 2004: 35).

Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan di Indonesia telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada tahun 2012, sektor pariwisata menempati urutan kelima dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi utama berupa gas, minyak bumi, batu bara, minyak kelapa sawit, serta karet olahan. Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia pada saat ini menunjukkan peranan yang berarti dalam pembangunan perekonomian nasional, pariwisata juga sering disajikan sebagai jawaban atas beberapa masalah yang dihadapi Indonesia antara lain menciptakan lapangan kerja dan banyak peluang ekonomi, menjaga dan memperbaiki lingkungan, serta mendorong perekonomian regional.

Potensi wisata yang sangat besar di Indonesia telah memberikan harapan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi. Penerimaan devisa dari industri pariwisata diharapkan menjadi jawaban untuk menghadapi berbagai masalah ekonomi di Indonesia. Kesulitan ekonomi yang

diakibatkan oleh sektor non-migas yang menurun, impor yang naik, dan pembangunan ekonomi yang timpang, dipandang akan dapat diatasi dengan industri pariwisata. Hal ini disebabkan industri pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja baru dan dapat memberikan lebih banyak peluang ekonomi. Disamping itu, industri pariwisata juga dapat menjadi sarana untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan serta dorongan pembangunan ekonomi regional. Bagi Indonesia, industri pariwisata juga diharapkan akan dapat memperkenalkan budaya Indonesia di dunia internasional serta melatih karakter saling menghormati dan toleransi, disamping diharapkan dapat menyumbang neraca pembayaran.

Secara luas, pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik (Spillane, 2006: 14). Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Sebagai upaya

meningkatkan pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Sektor pariwisata merupakan sektor yang berpotensi dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Perkembangan pariwisata juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai objek guna mendatangkan investor serta menciptakan konsumsi baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah. Sektor pariwisata tentunya juga dapat mempengaruhi sektor-sektor lainnya. Pengembangan dalam industri pariwisata akan menciptakan pendapatan daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas peluang kerja, dan lain sebagainya. Berbagai dampak positif inilah yang dapat menarik minat pemerintah untuk dapat mengembangkannya.

Kemajuan dalam industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang. Oleh karena itu, hal ini harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Pariwisata memiliki peran penting karena bisa menjadi sektor andalan pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah, dan penghasil devisa negara. Sektor ini diyakini mampu memberdayakan masyarakat karena bisa membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha (<http://www.inilahkoran.com>, diakses tanggal 18 Agustus 2015).

Sebagai daerah yang baru saja dimekarkan Provinsi Kaltara tentunya juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemandiriannya. Kemandirian daerah dapat dicapai apabila Provinsi Kaltara mampu mengelola sumber-sumber keuangannya dengan baik. Sebagaimana telah dijelaskan, sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang memiliki peluang untuk dikembangkan di Provinsi Kaltara. Keadaan alam dengan flora dan faunanya yang indah, didukung oleh adat budaya yang ada dapat menjadi modal yang cukup baik untuk dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata dalam menunjang pengembangan industri pariwisata di Provinsi Kaltara.

Sebagai daerah yang baru mandiri, Provinsi Kaltara tentunya berupaya untuk melakukan program pembangunan untuk mengembangkan potensi daerah. Salah satu upaya yang perlu mendapatkan perhatian adalah pada pengembangan objek wisata. Pemerintah tentunya perlu memberikan respon terhadap objek wisata di Kabupaten Bulungan. Namun demikian, sampai dengan saat ini dapat diketahui bahwa masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan respon dan peran pemerintah terhadap tempat wisata tersebut. Sampai dengan saat ini, pembenahan terhadap objek wisata tersebut masih menjadi rencana pemerintah daerah.

Pada dasarnya, Kabupaten Bulungan memiliki potensi pariwisata yang cukup baik. Potensi wisata Kabupaten Bulungan antara lain berasal dari obyek wisata alam, peninggalan bersejarah, maupun wisata budaya. Oleh karena itu, Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Bulungan giat mengembangkan potensi obyek wisata yang dimiliki Bulungan itu. Beberapa objek wisata di Kabupaten

Bulungan adalah Air Terjun Long Pin, Ar Terjun KM 18, Pantai Karang Tigau, Pantai Tanah Kuning, Sugai Kayan, Makam Keramat Ahmad Maghribi, Kerator Kesultanan Bulungan, dan lain sebagainya. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Bulungan sampai dengan saat ini masih fokus untuk mengembangkan berbagai objek wisata di Kabupaten Bulungan. Perlu diketahui bahwa sebelumnya pernah terjadi kegagalan dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Bulungan. Terdapat tiga objek wisata yang pernah menjadi agenda pengembangan pariwisata di Bulungan, yakni Gunung Putih, Museum Kesultanan Bulungan di Tanjung Palas, Pantai Tanah Kuning di Tanjung Palas Timur. Berbagai pembenahan telah dilakukan pada objek wisata tersebut itu. Meski demikian, tidak dipungkiri bahwa masih ada kegagalan yang terjadi dalam pengembangan beberapa waktu lalu, diantaranya pengembangan pantai Tanah Kuning. Rencananya di pantai ujung Timur Bulungan ini akan dibangun gazebo, termasuk di Mangkupadi. Namun, di lapangan rencana ini gagal dilaksanakan karena bermasalah dengan status lahan. Hal inilah yang banyak menghambat pengembangan objek wisata di Kabupaten Bulungan.

Meskipun memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, Kabupaten Bulungan belum sepenuhnya mengembangkan potensi tersebut untuk meningkatkan PAD. Sampai dengan saat ini, PAD dari sektor pariwisata baru diperoleh dari pajak daerah terkait dengan pariwisata, yaitu pajak hotel dan restoran. Belum ada peraturan daerah yang diimplementasikan terkait dengan retribusi tempat wisata. Berdasarkan catatan, objek wisata di Kabupaten

Bulungan antara lain terdiri dari objek wisata bahari, wisata alam, wisata buatan, wisata rohani, dan wisata sejarah dan budaya. Beberapa objek wisata yang terdapat di Kabupaten Bulungan antara lain Pantai Nibung, Pantai Burung, Pantai Bahari Karang Tigau, dan Pantai Tanah Kuning. Wisata alam yang terdapat di Kabupaten Bulungan antara lain Sungai Kayan, Air Terjun Long Pin, Gunung Rian, Sungai Giram, Sumber Air Panas Sajau, Gunung Putih, Air Terjun Idaman KM 18, dan Air Hutan Gunung eriang KM2 Tanjung Selor. Wisata sejarah yang terdapat di Kabupaten Bulungan antara lain Keraton Kesultanan Bulungan, Mesjid Tertua, Makam Keluarga Datu Adil, Makam Sultan Bulungan, dan Makam eramat Ahmad Aghribi. Wisata budaya diramaikan oleh pesta adat Birau.

Kunjungan wisata yang cukup tinggi di Kabupaten Bulungan seharusnya diambil dan dimanfaatkan sebagai peluang bagi Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan PAD. Terhitung sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Bulungan telah mencapai 32.936 orang. Dengan adanya pengembangan pariwisata, jumlah kunjungan tersebut tentunya akan turut mengalami peningkatan. Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pariwisata pada dasarnya telah melakukan upaya pengembangan objek wisata. Sebagai wujud komitmen Pemkab Bulungan memajukan dunia wisata daerah pada tahun 2010 sampai 2015, maka telah digelontorkan dana anggaran sebesar Rp 15,26 miliar dengan realisasi sebanyak Rp 11,07 miliar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan

berupaya memaksimalkan potensi wisata daerah dengan melakukan promosi objek wisata di dalam dan luar daerah.

Pengembangan pariwisata seharusnya menjadi perhatian utama bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan. Hal ini mengingat bahwa visi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan yaitu “mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai daerah tujuan wisata alam, budaya, dan sejarah”. Visi ini seharusnya dapat dicapai oleh Kabupaten Bulungan dengan mengembangkan seluruh potensi sektor pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Bulungan. Dengan pencapaian atas visi tersebut, Kabupaten Bulungan juga dapat meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Bulungan belum maksimal dan hanya bersumber dari pajak hotel dan restoran saja, belum terfokus pada objek-objek wisata seperti halnya retribusi tempa rekreasi atau retribusi obyek wisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan pengembangan pariwisata menggunakan strategi yang sesuai dengan kondisi lingkungan di Kabupaten Bulungan.

Selain pemerintah, masyarakat tentunya juga diharapkan aktif berperan dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Bulungan. Aspirasi dan peran serta dari masyarakat dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya dalam pengembangan objek wisata. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

”Upaya Pengembangan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan”.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang teridentifikasi dari latar belakang ebelunya adalah sebagai berikut.

1. Daerah yang telah dimekarkan sebagaimana halnya Provinsi Kaltara masih bergantung kepada pemerintah pusat.
2. Program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah belum memberikan sumbangan yang signifikan bagi pembangunan ekonomi.
3. Belum ada program jelas yang dilaksanakan dalam pengembangan sektor pariwisata agar sektor tersebut dapat meningkatkan PAD.
4. Pariwisata di Kabupaten Bulungan memiliki potensi untuk dikembangkan, namun program pengembangan pariwisata yang telah dilaksanakan pernah menemui kegagalan karena kondisi status lahan.
5. Belum ada implementasi peraturan daerah mengenai retirbusi tempat wisata.
6. Tidak ada pengukuran kontribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan.
7. Jumlah kunjungan wisata cukup banyak, namun belum diketahui dengan pasti kontribusi sektor wisata terhadap PAD.
8. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan belum diketahui.

9. Belum diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan.
10. Potensi wisata Kabupaten Bulungan akan menjadi baik apabila dikelola dengan baik, namun belum diketahui kondisi infrastruktur bagi pengembangan objek wisata di Kabupaten Bulungan.

C. Batasan Masalah

Pembatasan yang jelas terhadap permasalahan dalam penelitian perlu dilakukan. Hal ini ditujukan agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih fokus dan terarah. Penelitian ini dibatasi pada identifikasi masalah nomor 8, 9, dan 10 yaitu:

1. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan belum diketahui.
2. Belum diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan.
3. Potensi wisata Kabupaten Bulungan akan menjadi baik apabila dikelola dengan baik, namun belum diketahui kondisi infrastruktur bagi pengembangan objek wisata di Kabupaten Bulungan.

D. Perumusan Masalah

Pada latar belakang sebelumnya telah diuraikan permasalahan yang mendasari pelaksanaan penelitian ini. Agar penelitian dapat berjalan dengan lebih terfokus maka perlu dirumuskan beberapa permasalahan yang terkait

dengan latar belakang penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
2. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap pengembangan sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
3. Bagaimanakah kondisi infrastruktur bagi pengembangan objek wisata di Kabupaten Bulungan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan terkait dengan masalah penelitian. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan.
2. Untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan.
3. Untuk mengetahui kondisi infrastruktur bagi pengembangan objek wisata di Kabupaten Bulungan.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam bidang ilmu administrasi publik, khususnya mengenai respon dan peran masyarakat serta pemerintah dalam upaya pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan PAD.

2. Secara Praktis

Dalam pelaksanaan penelitian ini tentu saja diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat secara praktis. Manfaat praktis yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bulungan dalam upaya pengembangan pariwisata demi meningkatkan pendapatan asli daerah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan peningkatan ekonomi maupun memberikan peluang kerja sehingga masyarakat dapat lebih aktif dalam memberikan respon dan berperan serta dalam pengembangan pariwisata.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk menerapkan teori, dan konsep-konsep yang telah dipelajari di bangku kuliah, khususnya untuk mengetahui respon dan peran serta masyarakat serta pemerintah dalam pengembangan pariwisata.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengelolaan dalam Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Dalam arti luas, pariwisata adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktifitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang. Pariwisata semakin berkembang sejalan perubahan-perubahan sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Runtuhnya sistem kelas dan kasta, semakin meratanya distribusi sumber daya ekonomi, ditemukannya teknologi transportasi, dan peningkatan waktu luang yang didorong oleh pengurangan jam kerja telah mempercepat mobilitas manusia antar daerah, negara, dan benua, khususnya dalam hal pariwisata.

Menurut H. Kodhyat (dalam Spillane, 2006: 21), definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian pariwisata meliputi:

- 1) Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.
- 2) Penggunaan objek dan daya tarik wisata seperti: kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah: keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai.
- 3) Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, konsultan pariwisata, informasi pariwisata), usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata.

Hunziker dan Kraff (dalam Pendit, 2006: 10) telah mencoba memberikan batasan yang tegas dan sama pada pengertian pariwisata dengan memasukkan berbagai macam aspek berikut implikasinya sebagai berikut.

"Tourism is the total relationship and phenomena linked with the stay of a foreigner at a locality, provided that they do not settle there to exercise a major, permanent or temporary remunerated activity".

Menurut Kuntowijoyo (dalam Wardiyanta, 2010: 49), pariwisata memiliki dua aspek, aspek kelembagaan dan aspek substansial, yaitu sebuah aktifitas manusia. Dilihat dari sisi kelembagaannya, pariwisata merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan rekreatifnya. Sebagai sebuah lembaga, pariwisata dapat dilihat dari sisi manajemennya, yakni bagaimana perkembangannya, mulai dari direncanakan, dikelola, sampai dipasarkan pada pembeli, yakni wisatawan.

Sedangkan menurut Salah Wahab (dalam Yoeti, 2008: 114) mengemukakan, pariwisata adalah suatu aktifitas yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara berganti diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau di luar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda-beda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap. Wahab (1996: 24) mengemukakan batasan-batasan pariwisata itu berdasarkan pemikirannya yang terdiri dari tiga unsur, yaitu:

- 1) Manusia (*man*), yakni orang yang melakukan perjalanan wisata,
- 2) Ruang (*space*), daerah atau ruang lingkup tempat melakukan perjalanan,
- 3) Waktu (*time*), yakni waktu yang digunakan selama dalam perjalanan dan tempat tinggal di daerah tujuan wisata.

Berdasarkan definisi pariwisata yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetap semata-mata hanya untuk menikmati perjalanan tersebut, bertamasya atau berekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam.

b. Jenis dan Bentuk Pariwisata

Seorang wisatawan melakukan perjalanan wisata karena didorong oleh berbagai motif yang tercermin dalam berbagai macam jenis pariwisata. Terutama dalam *international tourism*, motif tersebut sangat bervariasi dan mempunyai pengaruh yang menentukan pada daerah tujuan wisata yang akan dikunjunginya. Perbedaan motif-motif tersebut tercermin dengan adanya berbagai jenis pariwisata. Dalam bukunya Spillane (2006: 29) mengemukakan beberapa jenis pariwisata khusus, yaitu:

1) Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak keingintahuannya, untuk mengendorkan ketegangan syarafnya, untuk mengetahui hikayat rakyat setempat, untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota, atau bahkan

sebaliknya untuk menikmati hiburan di kota-kota besar ataupun untuk ikut serta dalam keramaian pusat-pusat wisatawan. Sementara orang yang mengadakan perjalanan semata-mata untuk menikmati tempat-tempat atau alam lingkungan yang jelas berbeda antara satu dengan lainnya. Jenis wisata ini menyangkut begitu banyak unsur yang sifatnya berbeda-beda, disebabkan pengertian *pleasure* akan selalu berbeda kadar pemuasnya sesuai dengan karakter, cita rasa, latar belakang kehidupan, serta temperamen masing-masing individu.

2) Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya. Biasanya, mereka tinggal selama mungkin di tempat-tempat yang dianggapnya benar-benar menjamin tujuan-tujuan rekreasi tersebut, misalnya di tepi pantai, di pegunungan, di pusat-pusat peristirahatan atau pusat-pusat kesehatan, dengan tujuan menemukan kenikmatan yang diperlukan. Dengan kata lain mereka lebih menyukai *health resorts*. Termasuk dalam kategori ini ialah mereka yang karena alasan kesehatan dan kesembuhan harus tinggal di tempat-tempat yang khusus untuk memulihkan kesehatannya, seperti di daerah sumber-sumber air panas dan lain-lain.

3) Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran riset, untuk mempelajari adat-istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat negara lain; untuk mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu atau sebaliknya penemuan-penemuan besar masa kini, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan; atau juga ikut serta dalam festival-festival seni musik, teater, tarian rakyat dan lain-lain.

4) Pariwisata untuk olahraga (*Sports Tourism*)

Jenis ini dapat dibagi dalam dua kategori:

- a) *Big Sports Events*, yaitu peristiwa-peristiwa olah raga besar seperti *Olympiad Games*, kejuaraan ski dunia, kejuaraan tinju dunia, dan lain-lain yang menarik perhatian tidak hanya pada olah ragawannya sendiri, tetapi juga ribuan penonton atau penggemarnya.
- b) *Sporting Tourism of the Practitioners*, yaitu pariwisata olah raga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri, seperti pendakian gunung, olah raga naik kuda, berburu, memancing, dan lain-lain. Negara yang memiliki banyak fasilitas atau tempat-tempat olah raga seperti ini tentu dapat menarik sejumlah besar penggemar jenis olah raga pariwisata ini.

5) Pariwisata untuk urusan usaha dagang (*Business Tourism*)

Jenis pariwisata ini telah menimbulkan berbagai persoalan. Banyak ahli teori, ahli sosiologi maupun ekonomi beranggapan bahwa perjalanan untuk keperluan usaha tidak dapat dianggap sebagai perjalanan wisata karena unsur *voluntary* atau sukarela tidak terlibat. Menurut para ahli teori, perjalanan usaha ini adalah bentuk *professional travel* atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada pelakunya baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan. Dalam istilah *business tourism* tersirat tidak hanya *professional trips* yang dilakukan kaum pengusaha atau industrialis, tetapi juga mencakup semua kunjungan ke pameran, kunjungan ke instansi teknis yang bahkan menarik orang-orang di luar profesi ini.

6) Pariwisata untuk berkonvensi (*Convention Tourism*)

Peranan jenis pariwisata ini semakin lama semakin penting. Tanpa menghitung banyaknya konvensi atau konferensi nasional, banyaknya simposium maupun sidang yang diadakan setiap tahun di berbagai negara pada tahun 1969 telah ditaksir sebanyak 3.500 konferensi internasional. Jika pada taraf-teraf perkembangannya konvensi-konvensi semacam itu hanya dilakukan secara tradisional di beberapa kota tertentu, maka sekarang berbagai *tourism resorts* atau daerah-daerah wisata banyak yang menawarkan diri untuk

dijadikan tempat konferensi. Banyak negara yang menyadari besarnya potensi ekonomi dari jenis pariwisata konferensi ini sehingga mereka saling berusaha untuk menyiapkan dan mendirikan bangunan-bangunan yang khusus diperlengkapi untuk tujuan ini atau membangun “pusat-pusat konferensi” lengkap dengan fasilitas mutakhir yang diperlukan untuk menjamin efisiensi operasi konferensi.

Pariwisata dapat dipelajari tidak hanya dari segi motivasi dan tujuan perjalanannya saja, tetapi juga bisa dilihat dari kriteria lain, misalnya bentuk-bentuk pariwisata yang dilakukan, lamanya perjalanan serta pengaruh-pengaruh ekonomi akibat adanya perjalanan wisata tersebut. Bentuk-bentuk pariwisata menurut Spillane (2006: 32) dikategorikan sebagai berikut.

1) Pariwisata individu dan kolektif

Baik pariwisata dalam negeri maupun luar negeri dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a) *Individual tourism* atau pariwisata perorangan, dan
- b) *Organized collective tourism* atau pariwisata kolektif yang diorganisasi secara baik.

Kategori pertama meliputi seseorang atau kelompok orang (teman-teman atau keluarga) yang mengadakan perjalanan wisata dengan melakukan sendiri pilihan daerah tujuan wisata maupun pembuatan programnya sehingga bebas pula mengadakan

perubahan-perubahan setiap waktu dikehendaki. Seseorang maupun kelompok orang tersebut melakukan sendiri semua persiapan dalam rangka mendapatkan perlengkapan serta jasa-jasa yang diperlukan.

Kategori kedua meliputi biro perjalanan (*travel agent* atau *tour operator*) yang menjual suatu perjalanan menurut program dan jadwal waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk keseluruhan anggota kelompok yang dimaksud di atas. Biro perjalanan ini menawarkan kepada siapa saja yang berminat dengan keharusan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan untuk keperluan seluruh perjalanan tersebut. Peserta *organized tour* ini dibebaskan dari segala macam pengurusan karena baik perlengkapan maupun jasa-jasa lain yang diperlukan telah disediakan oleh penyelenggara perjalanan. Alternatif lain adalah bila ada sebuah biro perjalanan yang mengorganisasi *individual trips* untuk seorang atau lebih tanpa harus ikut serta dalam kelompok seperti tersebut di atas. Atau mungkin juga biro perjalanan mengorganisasi *affinity groups* atau kelompok gabung sehingga memungkinkan untuk memanfaatkan keringanan biaya udara (*incentive fares*).

- 2) Pariwisata jangka panjang, pariwisata jangka pendek, dan pariwisata eksekursi

Pembagian menurut lamanya perjalanan dibedakan atas pariwisata jangka panjang dimaksudkan sebagai suatu perjalanan yang berlangsung beberapa minggu atau beberapa bulan bagi wisatawan sendiri. Ini mempunyai arti penting bagi tempat-tempat yang dikunjungi, lebih-lebih bila terjadi pada jenis *recreation* atau *cultural tourism*. Selama ini sudah ada *pleasure tourism* sebagai akibat meningkatnya mobilitas wisatawan modern sekarang, terutama yang mempergunakan kendaraan bermotor. Akan tetapi, *pleasure trips* adalah kategori jangka waktu manapun pada umumnya mencakup kunjungan ke berbagai negara yang terdiri atas kunjungan serta singgah hanya dalam waktu pendek di setiap kota atau negara-negara yang dikunjungi.

Pariwisata jangka pendek atau *short term tourism* mencakup perjalanan yang berlangsung antara satu minggu sampai sepuluh hari. Secara sosiologis, hal tersebut adalah bentuk perjalanan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang tidak dapat mengambil liburan panjang. Pariwisata ekskursi atau *excursionist tourism* adalah suatu perjalanan wisata yang tidak lebih dari 24 jam dan tidak menggunakan fasilitas akomodasi. Bentuk ini sangat menyolok bagi daerah-daerah perbatasan.

3) Pariwisata dengan alat angkutan

Ada berbagai bentuk pariwisata dengan alat angkutan yang dipakai misalnya, kereta api, kapal laut, kapal terbang, bus, dan kendaraan

umum lain. Wisatawan yang berjalan kaki atau *pedestrian tourism* (*hikers*) sampai sekarang masih banyak penggemarnya.

4) Pariwisata aktif dan pasif

Untuk mempelajari pariwisata internasional dan pengaruhnya terhadap neraca pembayaran. Kedatangan wisatawan asing yang membawa devisa untuk suatu negara merupakan bentuk pariwisata yang sering disebut *active tourism* (*receptive tourism*). Sedangkan penduduk suatu negara yang pergi ke luar negeri dan membawa uang ke luar negeri dan yang mempunyai pengaruh negatif terhadap neraca pembayaran merupakan *passive tourists*.

Menurut Suwanto (2004: 14), ada berbagai macam perjalanan wisata bila ditinjau dari berbagai macam segi, yaitu:

- 1) Dari segi jumlahnya, wisata dibedakan atas:
 - a) *Individual tour* (wisatawan perorangan), yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh satu orang atau pasangan suami-istri.
 - b) *Family Group Tour* (wisata keluarga), yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh segerombol keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain.
 - c) *Group Tour* (wisata rombongan), yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan bersama-sama dengan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kebutuhan seluruh anggotanya.

2) Dari segi kepengaturannya, wisata dibedakan atas:

- a) *Pre-arranged Tour* (wisata berencana), yaitu suatu perjalanan wisata yang jauh hari sebelumnya telah diatur segala sesuatunya, baik transportasi, akomodasi maupun obyek-obyek yang akan dikunjungi. Biasanya wisata jenis ini diatur oleh suatu lembaga yang khusus mengurus, mengatur maupun menyelenggarakan perjalanan wisata dengan bekerja sama dengan semua instansi atau lembaga yang terkait dengan kepentingan tersebut.
- b) *Package Tour* (wisata paket atau paket wisata), yaitu suatu produk perjalanan wisata yang dijual oleh suatu perusahaan biro perjalanan atau perusahaan transport yang bekerja sama dengannya di mana harga paket wisata tersebut telah mencakup biaya perjalanan, hotel ataupun fasilitas lainnya yang memberikan kenyamanan bagi pembelinya. Dengan kata lain paket wisata ini adalah suatu produk wisata yang merupakan suatu komposisi perjalanan yang disusun dan dijual guna memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan perjalanan wisata.
- c) *Coach Tour* (wisata terpimpin), yaitu suatu paket perjalanan ekskursi yang dijual oleh biro perjalanan dengan dipimpin oleh

seorang pemandu wisata dan merupakan perjalanan wisata yang diselenggarakan secara rutin, dalam jangka yang telah ditetapkan dan dengan rute perjalanan tertentu pula.

d) *Special Arranged Tour* (wisata khusus), yaitu suatu perjalanan wisata yang disusun secara khusus guna memenuhi permintaan seorang langganan atau lebih sesuai dengan kepentingannya.

e) *Optional Tour* (wisata tambahan atau manasuka), yaitu suatu perjalanan wisata tambahan di luar pengaturan yang telah disusun dan diperjanjikan pelaksanaannya, yang dilakukan atas permintaan pelanggan.

3) Dari segi maksud dan tujuannya, wisata dibedakan atas:

a) *Holiday Tour* (wisata liburan), yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan dan diikuti oleh anggotanya guna berlibur, bersenang-senang dan menghibur diri.

b) *Familiarization Tour* (wisata pengenalan), yaitu suatu perjalanan yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaannya. Misalnya, sebuah biro perjalanan luar negeri menyelenggarakan perjalanan wisata bagi karyawan-karyawan ke Indonesia guna mengenal lebih lanjut obyek wisata yang ada di Indonesia agar nantinya mereka dapat memberikan informasi yang lebih baik mengenai Indonesia.

c) *Educational Tour* (wisata pendidikan), yaitu suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, studi perbandingan ataupun pengetahuan mengenai bidang kerja yang dikunjungi. Wisata jenis ini disebut juga *study tour* atau perjalanan kunjungan pengetahuan.

d) *Scientific Tour* (wisata pengetahuan), yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan. Misalnya, kunjungan wisata melihat bunga bangkai berbunga (*Rafflesia Arnoldi*), melihat gerhana matahari total seperti yang terjadi di Jawa Tengah tanggal 11 Juni 1983, menyelidiki kehidupan komodo, melihat orang hutan di hutan Kalimantan, dan lain-lain.

e) *Pileimage Tour* (wisata keagamaan), yaitu perjalanan wisata yang dimaksudkan guna melakukan ibadah keagamaan. misalnya perjalanan umroh oleh sebuah Konsorsium Biro Perjalanan PATANU (Pantravel Tunas Indonesia dan Natrabu), *tour* ke Luordes di Perancis Selatan, *tour* mengikuti Waicak di Candi Borobudur, Pawon, Mendut, dan lain-lain.

f) *Special Mission Tour* (wisata kunjungan khusus), yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu

maksud khusus, misalnya misi dagang, misi kesenian, dan lain-lain.

g) *Special Programme Tour* (wisata program khusus), yaitu suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan khusus, misalnya *Ladies Programme*, suatu kunjungan ke suatu objek wisata oleh para istri atau pasangan yang karena suaminya mengikuti rapat, konvensi ataupun pertemuan khusus.

h) *Hunting Tour* (wisata perburuan), yaitu suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diijinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata-mata. Contohnya, berburu babi di hutan Sumatra, berburu kanguru di Australia, dan lain-lain.

4) Dari segi penyelenggaraannya, wisata dibedakan atas:

a) *Ekskursi (Excursion)*, yaitu suatu perjalanan wisata jarak pendek yang ditempuh kurang dari 24 jam guna mengunjungi satu atau lebih obyek wisata.

b) *Safari Tour*, yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan secara khusus dengan perlengkapan maupun peralatan khusus pula yang tujuan maupun obyeknya bukan merupakan obyek kunjungan wisata pada umumnya. Misalnya, perjalanan wisata safari ke Baluran di

Jawa Timur, *safari tour* ke Ujung Kulon, *safari tour* ke Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain.

c) *Cruise Tour*, yaitu perjalanan wisata dengan menggunakan kapal pesiar mengunjungi objek-objek wisata bahari dan objek wisata di darat tetapi menggunakan kapal pesiar sebagai basis pemberangkatannya.

d) *Youth Tour* (wisata remaja), yaitu kunjungan wisata yang penyelenggaraanya khusus diperuntukkan bagi para remaja menurut golongan usia yang ditetapkan oleh hukum negara masing-masing. Di Indonesia umumnya yang dianggap remaja adalah mereka yang masih dalam pendidikan Sekolah Menengah Atas, belum duduk di perguruan tinggi, atau mereka yang usianya masih di bawah 21 tahun, dan belum kawin.

e) *Marine Tour* (wisata bahari), yaitu suatu kunjungan ke objek wisata, khususnya untuk menyaksikan keindahan laut, *wreck-diving* (menyelam) dengan perlengkapan selam lengkap.

c. Permintaan Pariwisata

Menurut ilmu ekonomi permintaan merupakan sejumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh pelanggan dan mampu untuk membeli dengan harga tertentu pada waktu tertentu. Kemudian terdapat hubungan yang tetap antara harga pasar dengan jumlah permintaan

(McIntoch dan Goeldner, 1996: 97). Menurut Wahab (1996: 133) permintaan erat kaitannya dengan harga-harga pasar merupakan actor yang paling menentukan namun pariwisata hubungan fungsional yang terjadi pada permintaan tidaklah sesederhana itu. Banyak faktor yang turut mempengaruhi pelanggan (wisatawan) untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata tertentu atau menunda. Permintaan pariwisata adalah jumlah total dari orang yang melakukan perjalanan untuk menggunakan fasilitas dan pelayanan wisata di tempat yang jauh dari tempat tinggal dan tempat kerja (Mulyana dan Rakhmad, 2009: 85).

Permintaan wisata pada dasarnya merupakan orang-orang yang ingin melakukan konsumsi perjalanan wisata. Mathieson dan Wall (1982: 57) permintaan wisata terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Permintaan efektif atau permintaan actual wisatawan yang sedang menikmati fasilitas pariwisata misalnya orang-orang yang sedang melakukan perjalanan.
2. Permintaan tertahan (*suppressed demand*) merupakan seluruh atau sebagian masyarakat yang tidak melakukan perjalanan karena alasan tertentu. Dua alasan yang membentuk permintaan tertahan, yaitu pertama: permintaan potensial, mereka yang ingin berpergian tetapi tidak dilakukannya karena belum mempunyai daya beli saat itu. Jika sandainya nanti memperoleh kenaikan pendapatan maka permintaan potensial ini akan berubah menjadi efektif. Kedua, permintaan

tertunda, dimana golongan ini mampu membayar, tetapi karena alasan tertentu menunda perjalanan. Jika alasan menunda tidak ada, maka permintaan tertunda ini akan menjadi permintaan efektif.

3. Tidak ada permintaan. Mereka yang termasuk kategori ini adalah mereka yang tidak ada dan tidak mengadakan perjalanan (*no demand*).

Menurut Medlik dalam Ariyanto (2005: 96), faktor utama dan faktor lain yang mempengaruhi permintaan pariwisata, antara lain:

1. Harga

Harga yang tinggi pada suatu daerah tujuan wisata maka akan memberikan imbas atau timbal balik pada wisatawan yang akan segera berpergian atau calon wisatawan, sehingga permintaan wisata pun akan berkurang begitu pula sebaliknya.

2. Pendapatan

Apabila pendapatan suatu Negara tinggi maka kecenderungan untuk memilih daerah tujuan wisata tempat berlibur akan semakin tinggi dan bias jadi mereka membuat sebuah usaha pada daerah tujuan wisata (DTW) jika dianggap menguntungkan. Hal ini juga berlaku bagi individu, apabila pendapatan individu tinggi, maka kecenderungan untuk memilih daerah tujuan wisata sebagai tempat berlibur akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya apabila pendapatan individu rendah, maka kecenderungan untuk memilih daerah tujuan wisata akan semakin rendah.

3. Sosial budaya

Dengan adanya social budaya yang unik dan bercirikan atau dengan kata lain berbeda dari apa yang ada di Negara calon wisata berasal maka, peningkatan permintaan terhadap wisata akan tinggi . hal ini akan membuat sebuah keingintahuan dan penggalian pengetahuan sebagai khasanah kekayaan pola pikir budaya mereka.

4. Sosial politik (sospol)

Dampak social politik belum terlihat apabila keadaan daerah tujuan wisata (DTW) dalam situasi aman dan tentram, tetapi apabila hal tersebut berseberanangan dengan kenyataan, maka social politik akan sangat terasa pengaruhnya dalam terjadinya permintaan.

5. Intensitas keluarga

Banyak atau sedikitnya keluarga juga berperan serta dalam permintaan wisata hal ini dapat diratifikasi bahwa jumlah keluarga yang banyak maka keinginan untuk berlibur dari salah satu keluarga tersebut akan semakin besar, hal ini dapat dilihat dari kepentingan wisata itu sendiri.

6. Harga barang substitusi

Harga barang pengganti juga termasuk dalam aspek permintaan, dimana barang-barang pengganti dimisalkan sebagai pengganti daerah tujuan wisata (DTW) yang dijadikan cadangan dalam berwisata seperti Bali sebagai tujuan wisata utama di

Indonesia, akibatnya suatu dan lain hal Bali dapat memberikan kemampuan dalam memenuhi syarat daerah tujuan wisata(DTW) sehingga ecara langung wisatawan akan mengubah tujuannya ke daerah terdeakt seperti mlayisia (Kuala Lumpur dan Singapura).

7. Harga barang komplementer

Merupakan sebuah barang saling membantu atau denagn kata lain barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi, dimana apabila dikaitkan dengan pariwisata barang komplementer ini sebagai obyek wisata yang saling melengkapi denagn obyek wisata lainnya.

Dalam kaitannya dengan factor-faktor yang menentukan wisatwan untuk membeli atau mengunjungi obyek wsita, ada lima factor yang menentukan seseorang untuk membeli jasa atau mengunjungi obyek wisata yaitu (Medlik, 1980 dalam Ariyanto, 2005:98):

1. Lokasi
2. Fasilitas
3. Citra atau *image*
4. Harga atau trif
5. Pelayanan

Sedangkan menurut Jacson, 1989 (dalam Pitana, 2005: 127) melihat bahwa factor penting yang menentukan permintaan pariwisata beasal dari komponen derah asal wisatwan, antara lain:

1. Jumlah penduduk (*population size*)

2. Kemampuan financial masyarakat (*financial means*)
3. Waktu senggang yang dimiliki (*leisure time*)
4. System transportasi
5. Sistem pemasaran pariwisata yang ada

Permintaan pariwisata berpengaruh terhadap semua sector perekonomian yaitu perorangan (individu), uasaha kecil menengah, perusahaan swasta, dan sektor pemerintah (Sinklair dan Stabler, 1997:56).

d. Pengelolaan terhadap Objek Wisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pada bab I pasal I wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Jadi pengertian itu mengandung unsur yaitu : (1) kegiatan perjalanan; (2) dilakukan secara sukarela; (3) bersifat sementara; (4) perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Berdasarkan definisi wisata telah dilontarkan organisasi kepariwisataan, seperti WATA (*World Assosiation of Travel Agent*), wisata adalah perlawatan keliling yang memakan waktu lebih dari tiga hari, yang diadakan oleh Biro Perjalanan Wisata (BPW) di suatu kota atau daerah yang acaranya

diantaranya yaitu meninjau beberapa tempat atau kota, baik dalam maupun luar negeri.

Sedikit berbeda dengan pengertian wisata, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, artinya semua kegiatan dan urusan yang ada kaitannya dengan perencanaan, pengaturan, pengawasan pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak wisata maupun masyarakat. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bab 2 pasal 3 menguraikan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Yoeti (2008: 104) menyatakan kepariwisataan adalah suatu sistem yang mengikutsertakan berbagai pihak dalam keterpaduan kaitan fungsional yang serasi, yang mendorong berlangsungnya dinamika fenomena mobilitas manusia tua-muda, pria wanita, ekonomi kuat-lemah, sebagai pendukung suatu tempat untuk melakukan perjalanan sementara waktu secara sendiri atau berkelompok, menuju tempat lain di dalam negeri atau di luar negeri dengan menggunakan transportasi darat, laut dan udara.

Hunziker dan Kraff (dalam Pendit, 2006: 40) menyatakan kepariwisataan adalah setiap peralihan tempat yang bersifat sementara

dari seorang atau beberapa orang dengan maksud memperoleh pelayanan yang diperuntukkan bagi kepariwisataan itu oleh lembaga-lembaga yang digunakan untuk maksud tertentu. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomis, sosial, dan budaya (Azzahra dan Sujali, 2013: 268). Kepariwisata adalah hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata. Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan dalam pariwisata harus didasarkan pada perencanaan yang matang. Perencanaan berarti melakukan perhitungan terhadap segala sesuatu sebagai perencanaan di masa yang akan datang. Perencanaan terhadap pariwisata pada dasarnya harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi andalan bagi suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dalam perencanaan pariwisata, kecenderungan pertumbuhan penduduk, ketersediaan lahan cadangan, pembangunan fasilitas, dan kemajuan teknologi serta penerapannya harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pariwisata. Selain itu, kualitas sumber daya manusia pengelola pariwisata tentunya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan industri pariwisata

tersebut. hal ini disebabkan dalam mengelola pariwisata diperlukan keahlian dan pengalaman, serta kinerja yang baik sebagaimana yang dikemukakan oleh Azis, dkk. (2010: 484), bahwa berapapun banyaknya modal yang dimiliki, namun pembangunan tidak akan terlaksana kecuali disertai dengan sumber daya managerial yang mampu mengelola modal tersebut untuk pembangunan.

Darsoprayitno (2012: 379) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah mengendalikan atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran. Objek dan daya tarik wisata umumnya terdiri dari hayati dan non hayati, dimana masing-masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitas objek wisata tersebut. Pengelolaan objek wisata harus sesuai dan memperhitungkan berbagai sumber daya wisata secara benar dan berdaya guna agar tercapai sasaran yang diinginkan. Tujuan perencanaan dan pengelolaan pariwisata yang lebih lanjut demi meningkatkan kemakmuran secara serasi dan seimbang bisa tercapai seoptimal mungkin apabila pemerintah ikut berperan.

Peranan pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan objek wisata sangat menentukan berkembang tidaknya suatu objek wisata. Perkembangan suatu kawasan wisata tidak dapat dilepaskan dari usaha-usaha yang dilakukan melalui kerjasama pemerintah melalui Dinas Pariwisata dengan stakeholder kepariwisataan. Munasef (2005: 1) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan segala

kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana dan prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan guna memenuhi dan melayani kebutuhan wisatawan.

Marpaung (dalam Azzahra dan Sujali, 2013: 268) mengungkapkan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan daya tarik wisata yang potensial harus dilakukan melalui penelitian, inventarisasi, dan evaluasi, sebelum fasilitas wisata dikembangkan. Hal ini penting agar perkembangan daya tarik wisata yang ada dapat sesuai dengan keinginan pasar potensial dan untuk menentukan pengelolaan yang tepat dan sesuai. Dalam hal ini, Yoeti (2008: 285) menyatakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menentukan berhasilnya pengelolaan pariwisata sebagai industri, ketiga faktor tersebut diantaranya tersedianya objek atraksi wisata, adanya fasilitas dan aksesibilitas, dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Faktor lain yang cukup penting adalah amenitas, yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas seperti penginapan, restoran, hiburan, dan transportasi lokal yang memungkinkan wisatawan bepergian ke tempat-tempat tersebut, beserta alat komunikasi. Objek wisata merupakan akhir perjalanan wisata yang harus memenuhi syarat aksesibilitas, yaitu objek wisata mudah dicapai.

Dalam pengembangan kepariwisataan perlu diperhatikan kualitas lingkungan agar pengelola pariwisata tidak merusak lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh Soemarwoto (2003: 309),

bahwa pariwisata adalah industri yang kelangsungan hidupnya sangat ditentukan oleh baik buruknya lingkungan. Tanpa lingkungan yang baik tak mungkin pariwisata berkembang. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata haruslah memperhatikan terjaganya mutu lingkungan, sebab dalam industri pariwisata, lingkungan itulah yang dijual. Dalam menunjang pengelolaan berbagai kegiatan kepariwisataan, teknologi manajemen peril diterapkan agar sumber daya wisata yang murni alami dapat direkayasa secara berhasil guna, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya termasuk lingkungan alamnya.

Dalam kepariwisataan yang merupakan satu industri yang kompleks, maka organisasi-organisasi pariwisata nasional, khususnya di negara-negara penerima wisatawan, harus ditata, diorganisasi dan dijalankan menurut konsep-konsep manajemen dan pemasaran ilmiah modern. seandainya tujuan-tujuan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan pariwisata ingin dicapai. Menurut Wahab (1996: 147), pengelolaan atau manajemen itu meliputi lima unsur pokok baik dalam pemikiran dasarnya maupun dalam penerapannya, yaitu:

- 1) Pengorganisasian
- 2) Perencanaan
- 3) Motivasi
- 4) Penempatan Personal dan Penggerakannya
- 5) Koordinasi dan Pengawasan

Berbagai fungsi manajemen ini dapat diterapkan pada sektor yang dapat dikaji disetiap jenis usaha dalam bidang perindustrian, pertanian, jasa-jasa atau pariwisata. Ketiga alat utama manajemen adalah keuangan, produksi dan pemasaran. Hal biasa yang berkaitan dengan ketiganya ini tentu saja manajemen kepegawaian dan lapisan perekatnya tentu saja administrasi sebagai konsekuensi wajar yang diperlukan.

Fungsi-fungsi manajemen ini tentu saja dikaji dan ditangani secara berbeda pada berbagai sektor dan usaha, serta hal ini bergantung pada seni pengelolaan manajer maupun hakikat sektor usaha yang ditekuninya serta penekanan alat-alat manajemen yang didahulukan. Situasi lingkungan *ekstern* dan *intern* badan usaha membawa tekanan yang dapat menjadi suatu unsur penting untuk kesuksesan atau kegagalan. Sekali lagi, bakat manajemen dari pimpinan tertinggi badan usaha itu memainkan peranan utama dalam konteks ini.

Pariwisata adalah perpindahan sementara orang-orang dari berbagai macam tempat tinggal, iman dan agama, dan yang mempunyai pola hidup yang berbeda, beragam harapan, banyak jenis kesukaan dan hal-hal yang tidak disukai serta motivasi-motivasi yang tidak dapat dibuat standarnya karena kesemuanya ini adalah ungkapan pikiran dan endapan perasaan serta tingkah laku yang berubah dalam jangka panjang menurut tempat dan waktu. Oleh karena itu, pariwisata

adalah suatu gejala yang sangat sensitif yang memerlukan cara penanganan yang berbeda.

Penataan dan penanganan organisasi pariwisata sebagai suatu sektor ekonomis, dalam arti pimpinan harus merumuskan sumber-sumber yang tersedia dan mengaturnya secara berdaya guna dan tepat guna. Hal ini memerlukan suatu pengkajian yang terus-menerus mengenai fungsi-fungsi dan penyesuaian organisasi pariwisata (organisasi pariwisata nasional, berbagai asosiasi profesi pariwisata dan badan-badan usaha pariwisata) dengan teknik dan perilaku lembaga-lembaga yang begitu cepat berkembang dan berubah. Hal ini pada akhirnya akan lebih mengarah pada suatu organisasi yang terpola menurut sistem berpikir manajemen.

Dari uraian-uraian diatas, maka yang dimaksud dengan pengelolaan obyek wisata adalah mengembangkan pariwisata dengan melakukan inventarisasi semua sumber khasanah wisatanya yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan wisata kemudian mencoba untuk mengenali dan mengklasifikasikannya yang kemudian dilanjutkan dengan membuat suatu evaluasi yang realistis. Sasaran utamanya yakni untuk meyakinkan secara baik mengenai pemanfaatan sumber-sumber pariwisata dengan mempertimbangkan nilai bobotnya pada jajaran persaingan yang dihadapi. Hal ini tidak berarti hanya merupakan penilaian yang abstrak tetapi suatu evaluasi yang dites kebenarannya dengan produk wisata pesaing dengan memperhatikan kecenderungan

dan ciri-ciri khas permintaan pariwisata yang mempersyaratkan dan mengarahkan pembangunan prasarana dan sarana wisata yang tidak dapat diciptakan terlepas dari kebutuhan-kebutuhan dan selera-selera permintaan pariwisata.

2. Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan adalah suatu proses yang berlangsung secara terus menerus dengan intensitas dan prestasi yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas aparatur dan tersedianya sumber daya manusia. Apabila dalam suatu negara kekuasaan pemerintah, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintah dalam arti luas dengan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan yaitu badan eksekutif, sedangkan pemerintah dalam arti luas yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Dengan demikian pemerintah adalah wujud nyata pelaksanaan kedaulatan negara dalam bentuk perintah-perintah yang sifatnya mengikat yang diterima dan ditaati rakyat sebagai kekuasaan yang resmi.

Pegertian pemerintah secara etimologis menurut Inu Kencana sebagai berikut.

- 1) Memerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh.
- 2) Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- 3) Pemerintah berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut (Kencana, 1991: 13)

Jadi berdasarkan definisi di atas, pemerintah adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan pekerjaan menyuruh dan memerintah baik itu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai dengan urusan pemerintah tersebut. Menurut Pamudji dalam bukunya "*Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia*" dengan mengutip pendapat Samuel Edward Finner mengemukakan bahwa istilah pemerintah mengandung empat pengertian yakni :

- 1) Menunjukkan pada kegiatan atau proses memerintah,
- 2) Menunjukkan pada masalah-masalah kenegaraan dalam mana terdapat kegiatan atau proses memerintah,
- 3) Menunjukkan pada orang-orang yang dibebani tugas-tugas memerintah.
- 4) Menunjukkan pada cara, metode dan sistem di mana suatu masyarakat tertentu diperintah (Pamudji, 1996:17)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan pengertian pemerintah adalah kegiatan atau proses memerintah dengan menunjukan masalah-masalah kenegaraan pada orang-orang yang diberi tugas dengan cara, metode dan sistem tertentu. Efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah perlu ditingkatkan dengan

lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menurut Misdyanti dan Kartasapoetra sebagai berikut.

“Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintah di daerah, dengan kata lain pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah di daerah” (Misdyanti dan Kartasapoetra, 1993:17).

Jadi berdasarkan definisi di atas, pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah yaitu sebagai pelaksana semua kegiatan yang mengatur jalarnya pemerintahan yang ada di daerah berdasarkan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Sedangkan menurut Misdayanti dan Kartasapoetra (1993: 41) fungsi pemerintah daerah sebagai berikut.

1) Fungsi Otonom

Fungsi otonom dari pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

2) Fungsi Pembantu

Merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

3) Fungsi Pembangunan

Fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat.

4) Fungsi Lainnya

Selain ketiga fungsi diatas terdapat fungsi lainnya adalah sebagai berikut.

- a) Pembinaan Wilayah
- b) Pembinaan Masyarakat
- c) Pemberian pelayanan, pemeriharaan serta perlindungan kepentingan umum (Misdyanti dan Kartasapoetra, 1993: 20-27)

Jadi berdasarkan fungsi pemerintah daerah di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah harus melaksanakan segala urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya dengan meningkatkan laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus dapat membina wilayah dan membina masyarakat. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan menetapkan pembentukan kedudukan, tugas dan fungsi serta stuktur organisasi perangkat daerah

- b. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah. Menurut Devas, *et al.* (1999), kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Di dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/2000 ditegaskan bahwa:

“Kebijakan desentralisasi daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas Pemda, keselarasan hubungan antara pusat dan daerah serta antar daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah”.

Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas maka sumber-sumber keuangan telah banyak bergeser ke daerah baik melalui perluasan basis pajak (*taxing power*) maupun dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa telah diberikan kewenangan kepada daerah untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran, yang didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Sebagai salah satu tujuan yang hendak dicapai di dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, istilah tentang kemandirian daerah bukan hal yang baru. Secara teoritis kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur untuk menilai potensi yang ada pada suatu daerah sampai sejauh mana kekayaan dan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan di daerah tersebut, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Penerimaan daerah terdiri atas penerimaan yang berasal dari daerah sendiri (Pendapatan Asli Daerah/PAD), penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah (Nurhayati, 2008).

c. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut.

- a. Hasil pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan lain-lain.

- b. Hasil retribusi daerah, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi terminal, dan lain-lain.
- c. Hasil perusahaan milik daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bank pendapatan daerah, perusahaan air minum, perusahaan daerah percetakan, penyertaan modal pada pihak ketiga, dan lain-lain.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain penjualan barang milik daerah, jasa, giro, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 diatas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu kabupaten / kota terdiri dari:

1) Hasil Pajak Daerah

Hasil pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari:

- a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- dan

g) Pajak Parkir

2) Hasil Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu terdiri dari:

- a) Retribusi Jasa Umum
 - b) Retribusi Jasa Usaha
 - c) Retribusi Perijinan Tertentu.
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah).
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (antara lain: penjualan *asset* tetap daerah dan jasa giro).

Berdasarkan Dinas Pendapatan Daerah dalam bukunya (Dispenda, 2003), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang, yang bersumber dari:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan:

a) Pajak Propinsi

- (1) Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air (PKB).
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air (BBNKB).
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b) Pajak Kabupaten / Kota

- (1) Pajak Hotel
- (2) Pajak Restoran
- (3) Pajak Hiburan
- (4) Pajak Reklame
- (5) Pajak Penerangan Jalan
- (6) Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- (7) Pajak Parkir
- (8) Pajak Sewa Menyewa / Kontrak Rumah dan / atau Bangunan

2) Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan Fasilitas-fasilitas umum yang

disediakan oleh Pemda bagi kepentingan masyarakat, sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

- 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya Yang Dipisahkan.
- 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain:
 - a) Penjualan aset tetap Daerah
 - b) Jasa Giro.

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari (Pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan / pengolahan kekayaan daerah dan penjualan aset tetap daerah dan jasa giro) dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (perda) yang disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

d. Evaluasi Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Evaluasi mengenai target dan realisasi Pendapatan asli Daerah (PAD) ditentukan berdasarkan jumlah instansi (wajib pajak) yang terkait dan semua itu dilaksanakan berdasarkan prosedur melalui beberapa tahap seperti berikut.

1) Tahap I

Diadakan rapat internal yang dihadiri oleh masing-masing kepala subdinas dan kepala-kepala seksinya. Rapat diadakan

sebagai media untuk menyampaikan angka-angka / potensi dari masing-masing jenis pajak, yaitu:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Parkir
- g) Pajak Rumah Kost

Angka-angka yang disampaikan tersebut sebagai bahan dasar untuk menetapkan target penerimaan pajak untuk tahun yang akan datang.

2) Tahap II

Hasil dari rapat internal berupa angka-angka / target penerimaan pajak untuk tahun yang akan datang. Angka-angka tersebut kemudian disampaikan kepada tim anggaran eksekutif. Tim anggaran eksekutif terdiri dari:

- a) Sekertaris daerah yang bertindak sebagai ketua tim
- b) Bappeda (Badan Perencana Pembangunan daerah)
- c) Bagian Keuangan
- d) Bagian Pembangunan

3) Tahap III

Setelah ditelaah, tim anggaran eksekutif menyampaikan Angka-angka / target untuk anggaran tahun yang akan datang kepada tim anggaran legislatif (DPRD).

4) Tahap IV

Setelah menelaah Angka-angka / target yang disampaikan secara internal, tim anggaran legislatif mengundang tim anggaran eksekutif (dalam hal ini unit kerja yang terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah) untuk mengadakan rapat lebih lanjut.

5) Tahap V

Sebagai tahap yang terakhir tim anggaran legislatif mengadakan rapat panitia khusus, panitia musyawarah dan rapat paripurna untuk menetapkan besaran target Pendapatan asli Daerah (PAD) untuk tahun yang akan datang. Dispenda melaksanakan pendataan potensi masing-masing pajak dari mulai para subdin yaitu 1 Pajak Hotel sampai dengan 7 Pajak Rumah Kost. Setelah melaksanakan pendataan Potensi, kemudian menghitung besaran potensi, berikut pajak yang harus dibayar. Hasil penghitungan potensi-potensi tersebut dibawa pada tim anggaran yang terdiri dari:

- a) Bapeda
- b) Dispenda
- c) Bagian Keuangan
- d) Bagian Penyusunan Program

Setelah disepakati muncul rangka target atau penerimaan (realisasi) yang harus diperoleh Dispenda dihubungkan dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

e. Regulasi Mengenai Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tinjauan terhadap teori-teori mengenai Pendapatan Asli Daerah, peneliti menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam undang-undang tersebut dijelaskan beberapa sumber PAD, yaitu

hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Undang-undang yang telah disebutkan di atas mengisyaratkan bahwa dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dalam pengelolaan PAD dilaksanakan oleh kepala daerah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, diharapkan kepada kepala daerah Kabupaten/Kota di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak selalu menggantungkan dana (anggaran) dari pusat melalui pembangian dana perimbangan.

Dalam administrasi keuangan daerah, PAD adalah pendapatan daerah yang diurus dan diusahakan sendiri oleh daerah yang dimaksud sebagai sumber PAD untuk melaksanakan pembangunan. Berdasarkan ketentuan maka PAD dapat disimpulkan sebagai sumber pendekatan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensial daerahnya. Dalam mengelola, mengolah dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat berupa pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat/Daerah.
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah Negara.

- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 5) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah.
- 6) Peraturan pemerinta Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah
- 7) Peraturan pemerinta Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Dearah.
- 10) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah, Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Di Kabupaten Bulungan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah di

Kabupaten Bulungan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah dinyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah Kabupaten Bulungan dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah juga menyebutkan bahwa sumber PAD di Kabupaten Bulungan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan PAD dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalan dan peningkatan PAD diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

3. Pengembangan Kelembagaan

Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan

kelembagaan. Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku dan adat istiadat. Dalam bidang ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk kepentingan bersama atau umum (*public*). Ilmu psikologi melihat kelembagaan dari sudut tingkah laku manusia (*behaviour*). Ilmu hukum menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut hukum, aturan dan penegakan hukum serta instrumen dan proses litigasinya (Djogo, dkk, 2003).

Djogo dkk (2003) juga menyebutkan bahwa pada umumnya definisi lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang. Dalam konteks ini sangat penting diperhatikan bahwa perilaku sosial tidak membatasi lembaga pada peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau organisasi untuk harus berpikir positif ke arah norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka tetapi juga pemahaman akan lembaga ini memusatkan perhatian pada pengertian mengapa orang berperilaku atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan yang ada.

Kelembagaan berisikan dua aspek penting yaitu: “aspek kelembagaan” dan “aspek keorganisasian”. Aspek kelembagaan meliputi perilaku atau perilaku sosial dimana inti kajiannya adalah tentang nilai (*value*), norma (*norm*), *custom*, *mores*, *folkways*, *usage*, kepercayaan, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi dan lain-lain. Bentuk perubahan sosial dalam aspek kelembagaan bersifat kultural dan proses

perubahannya membutuhkan waktu yang lama. Sementara dalam aspek keorganisasian meliputi struktur atau struktur sosial dengan inti kajiannya terletak pada aspek peran (role). Lebih jauh aspek struktural mencakup: peran, aktivitas, hubungan antar peran, integrasi sosial, struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur faktual, struktur kewenangan atau kekuasaan, hubungan antar kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek solidaritas, klik, profil dan pola kekuasaan. Bentuk perubahan sosial dalam aspek keorganisasian bersifat struktural dan berlangsung relatif cepat (Subagio, 2005).

Israel (1992) mengungkapkan bahwa konsep umum mengenai lembaga meliputi apa yang ada pada tingkat lokal atau masyarakat, unit manajemen proyek, institusi-institusi, departemen-departemen di pemerintah pusat dan sebagainya. Sebuah lembaga dapat merupakan milik negara atau sektor swasta dan juga bisa mengacu pada fungsi-fungsi administrasi pemerintah. Sedangkan menurut Uphoff (1986), istilah *kelembagaan* dan *organisasi* sering membingungkan dan bersifat interchangeably. Secara keilmuan, *'social institution'* dan *'social organization'* berada dalam level yang sama, untuk menyebut apa yang kita kenal dengan kelompok sosial, grup, sosial form, dan lain-lain yang relatif sejenis. Namun, perkembangan akhir-akhir ini, istilah "kelembagaan" lebih sering digunakan untuk makna yang mencakup keduanya sekaligus. Ada beberapa alasan kenapa orang-orang lebih memilih istilah tersebut.

Kelembagaan lebih dipilih karena kata “organisasi” menunjuk kepada suatu sosial form yang bersifat formal, dan akhir-akhir ini semakin cenderung mendapat image negatif. Sejalan dengan pernyataan Subagio (2005), Koentjaraningrat (1974) menyatakan tujuan dari kelembagaan sosial adalah memenuhi kebutuhan pokok manusia, maka ia dapat dikategorikan berdasarkan jenis-jenis kebutuhan pokok tersebut. Kemudian mengkategorikannya ke dalam delapan golongan sebagai berikut:

- a. Kelembagaan kekerabatan/domestik: memenuhi kebutuhan hidup kekerabatan. Contoh: pelamaran, poligami, perceraian, dan lain-lain.
- b. Kelembagaan Ekonomi: memenuhi pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, mendistribusikan harta benda. Contoh: pertanian, peternakan, industri, koperasi, perdagangan, sambatan, dan lain-lain.
- c. Kelembagaan pendidikan: memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Contoh: pendidikan dasar/ menengah/tinggi, pers, dan lain-lain.
- b. Kelembagaan ilmiah: memenuhi kebutuhan ilmiah manusia dan menyelami alam semesta. Contoh: pendidikan ilmiah, penelitian, metode ilmiah, dan lain-lain.
- c. Kelembagaan estetika dan rekreasi: kebutuhan manusia untuk menyatakan rasa keindahannya dan rekreasi. Contoh: seni rupa, seni suara, seni gerak, kesusastraan, dan lain-lain.

- d. Kelembagaan keagamaan: memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau alam gaib. Contoh: upacara, selamatan, pantangan, dan lain-lain.
- e. Kelembagaan politik: memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan kelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara. Contoh: pemerintahan, kepartaian, demokrasi, kepolisian, kehakiman, dan lain-lain.
- f. Kelembagaan somatik: memenuhi kebutuhan jasmaniah manusia. Contoh: pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan kecantikan, dan lain-lain.

4. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Sejalan dengan pertumbuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah secara terus menerus mengalami perkembangan. Sebagai tonggak awal peraturan perundangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur mengenai keberadaan Komite Nasional Daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Namun peraturan ini belum menjadi pengaturan yang sempurna mengenai keberadaan pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena sifatnya masih sementara.

Batasan mengenai konsep desentralisasi dikemukakan oleh banyak ahli pemerintahan. Perbedaan sudut pandang para ahli mengakibatkan batasan yang pasti mengenai konsep desentralisasi sulit diperoleh.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dikutip oleh Koswara (2011:

74) memberikan batasan bahwa desentralisasi adalah:

“Decentralization refers to the transfer of authority away from the national capital wheter by deconcentration (i.e. delegation) to field office or by devolution to local authorities or local bodies”.

Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa terdapat proses penyerahan (transfer) kekuasaan dari pemerintah pusat (the national capital) dengan dua variasi yaitu (1) melalui dekonsentrasi (delegasi) kepada pejabat instansi vertikal di daerah atau (2) melalui devolusi (pengalihan tanggung jawab) kekuasaan pada pemerintah yang memiliki otoritas pada daerah tertentu atau lembaga-lembaga otonom di daerah.

Definisi lainnya yang terdapat dalam *Hand Book of Public Administration* yang diterbitkan PBB mendefinisikan desentralisasi sebagai proses penyerahan kekuasaan pemerintah berikut fungsi-fungsinya yang dibedakan menjadi (1) dekonsentrasi yaitu kekuasaan dan fungsi pemerintahan diberikan secara administratif kepada instansi vertikal pemerintah pusat yang ada di daerah dan (2) devolusi yaitu kekuasaan dan fungsi pemerintahan diberikan kepada pemerintah loka yang memiliki kekuasaan pada wilayah tertentu dalam ikatan suatu negara sehingga terwujud daerah otonom.

Hakekat otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan. Mardiasmo (2002: 139) memberikan pendapat bahwa dalam era otonomi daerah tidak lagi sekedar menjalankan

instruksi dari pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era otonomi bisa dikatakan terpasung. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan (kemampuan) pengelolaan daerah. Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan, diharapkan tingkat partisipasi (dukungan) publik terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan definisi desentralisasi sebagai penyerahan wewenang Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan menyerahkan urusan Pemerintahan kepada Daerah dengan memperhatikan kemampuan, keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Otonomi

Daerah merupakan kekuasaan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan berpemerintah sendiri.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom dapat terwujud dengan dijalankannya asas desentralisasi, karena pemerintah menghendaki agar urusan-urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah yang selanjutnya merupakan tanggungjawab daerah sepenuhnya.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian “otonom” secara bahasa adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”, sedangkan “daerah” adalah suatu “wilayah” atau “lingkungan pemerintah” (KBBI, 2003: 396). Dengan demikian pengertian secara istilah “otonomi daerah” adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian yang lebih luas dari otonomi daerah adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai

dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan daerah pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Hal ini disebabkan bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.

Pelaksanaan otonomi daerah, juga sebagai penerapan (implementasi) tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Desentralisasi merupakan simbol atau tanda adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah yang akan mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Dengan diberlakukannya UU No. 32 dan UU No. 33 Tahun 2004, kewenangan Pemerintah didesentralisasikan ke daerah. Hal ini mengandung makna, pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga daerah-daerah. Kewenangan mengurus, dan mengatur rumah tangga daerah diserahkan kepada

masyarakat di daerah. Pemerintah pusat hanya berperan sebagai supervisor, pemantau, pengawas dan penilai.

Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu: (1) politik, (2) ekonomi, (3) sosial, dan (4) dan budaya. Di bidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Di bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial, dan pada saat yang sama, juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap

kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Upaya untuk melaksanakan otonomi daerah yang telah digulirkan 1 Januari 2001, yaitu tahun fiskal 2001 adalah merupakan tekad bersama, baik aparat yang di pusat maupun yang di daerah. Tentu dalam hal ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, seksama namun tidak mengurangi jangka waktu yang telah ditetapkan agar mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan otonomi daerah.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu perlu dilaksanakan guna mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan topik relevan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu diuraikan sebagaimana berikut.

1. Setiawan (2008) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai

Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng, Kota Magelang Jawa Tengah". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui gaya kepemimpinan yang ada saat ini di PDOW TKL, (2) menganalisis besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pegawai PDOW-TKL, (3) menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai PDOW-TKL, dan (4) menganalisis seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai PDOW-TKL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik lagi bagi organisasi, gaya kepemimpinan yang sebaiknya diterapkan oleh pemimpin pada kondisi bawahan seperti pegawai PDOW TKL adalah gaya kepemimpinan yang mengarah pada gaya kepemimpinan *telling* dan *participating*, karena kedua gaya tersebut akan menimbulkan peningkatan kepuasan kerja dari faktor eksternal/ *hygiene factor* sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja pegawai secara individual maupun organisasional.

2. Andiryani (2009) melakukan penelitian dengan judul "Pengelolaan Obyek Wisata Tlatar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang pengelolaan Obyek Wisata Tlatar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali sudah baik, tetapi masih ada beberapa fasilitas yang kotor karena tidak dirawat disaat sedang tidak digunakan. Saran dari

penulis, fasilitas yang sedang tidak dipakai tersebut harus tetap dirawat supaya tetap dalam keadaan yang baik dan bersih.

3. Rahati (2009) melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Strategi Optimalisasi Kinerja Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surakarta". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Strategi Optimalisasi Kinerja Sumberdaya Manusia Bidang Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta serta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Optimalisasi Kinerja Sumberdaya Manusia dilaksanakan dalam bentuk Program peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui jalur formal dan nonformal, peningkatan peran dan partisipasi Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dalam pembangunan pariwisata, pengembangan standarisasi sistem dan prosedur pelayanan perizinan, peningkatan peran serta sumber daya manusia sektor pariwisata dalam upaya mengoptimalkan event-event seni budaya. Realisasi tersebut dijabarkan dalam kegiatan meliputi pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, berpartisipasi dalam kegiatan kepariwisataan baik yang bertaraf nasional maupun internasional, serta penetapan standard ijin usaha jasa pariwisata. Pelaksanaan kegiatan tersebut sudah baik dalam hal partisipasi sumber daya manusia bidang pariwisata, namun masih menghadapi beberapa hambatan seperti pengelolaan obyek dan daya tarik wisata belum profesional, pemanfaatan jaringan informasi dan promosi pariwisata belum

optimal dan lain-lain, meskipun demikian implementasi strategi tersebut tetap memiliki faktor pendukung misalnya adanya partisipasi dari masyarakat sekitar serta dukungan dari instansi terkait.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat dipahami hasil-hasil penelitian terkait pengelolaan dalam pariwisata. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas mengenai strategi pengembangan pada Dinas Pariwisata terhadap peningkatan pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini terjamin keasliannya karena tidak pernah dilakukan sebelumnya.

Penelitian ini tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan dibandingkan penelitian-penelitian lainnya. Kelebihan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang tidak hanya pada pengembangan pariwisata saja, akan tetapi juga mengaitkan antara pengembangan pariwisata yang dilaksanakan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in depth interview*). Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti. Penelitian ini sangat tergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada. Selain itu, penelitian ini jua sangat tergantung pada objektivitas informan penelitian dalam melakukan penilaian terhadap paya pengembangan pariwisata. Untuk mengurangi bias maka dilakukan proses triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan

dengan cara cross check data dengan fakta dari informan yang berbeda dan dari hasil penelitian lainnya. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu metode wawancara mendalam dan observasi.

C. Kerangka Berpikir

Seiring dengan berjalannya waktu, sektor pariwisata menjelma menjadi sektor yang paling diminati dan memiliki potensi baik untuk dikembangkan. Hal ini tentunya berhubungan dengan kehidupan manusia yang juga membutuhkan liburan dan *refreshing*. Oleh karena itu, pariwisata tumbuh dan berkembang dengan pesat seiring berjalannya waktu. Keingintahuan manusia akan segala sesuatu dan rasa penasaran untuk dapat menikmati tempat-tempat baru juga merupakan pemicu perkembangan pariwisata. Baik situasi ataupun peristiwa yang terjadi dalam segala aspek kehidupan di daerah lain menjadi daya tarik tersendiri dalam pengembangan pariwisata.

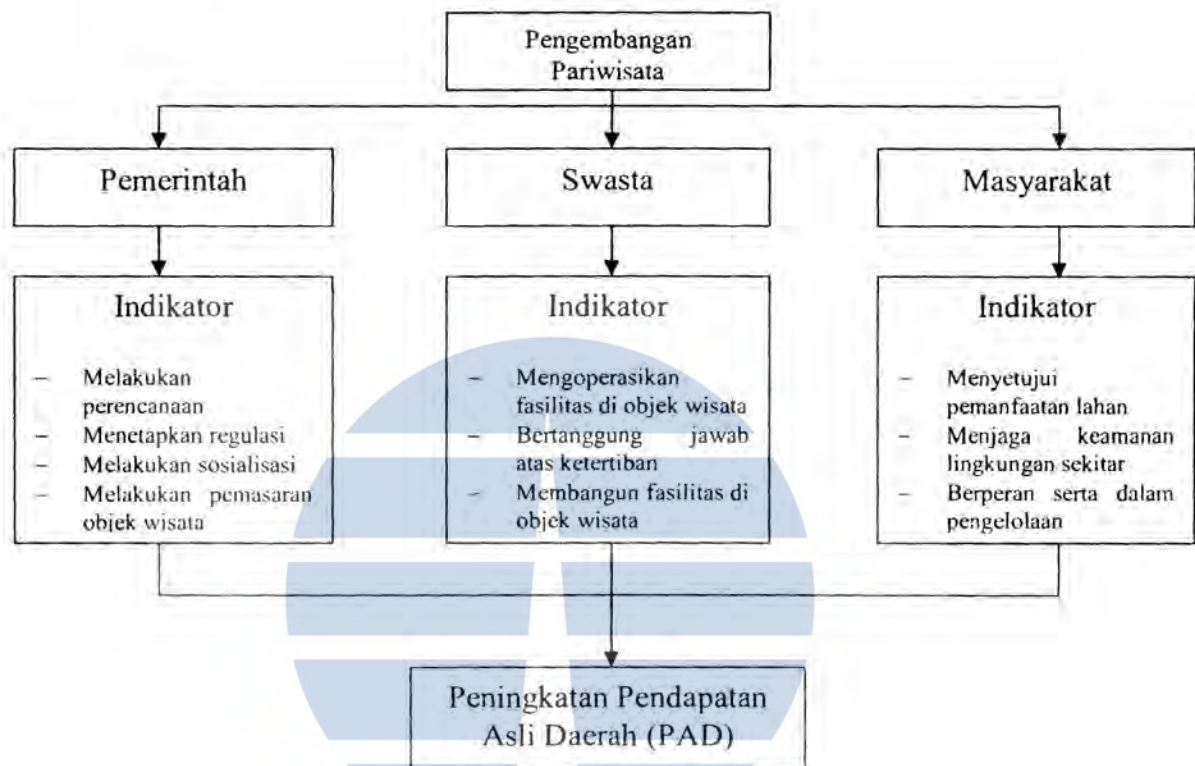
Pada umumnya, terdapat berbagai upaya yang dapat dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan industri pariwisata. Upaya tersebut antara lain dapat dilaksanakan melalui pengadaan sarana akomodasi yang memadai, promosi, kemudahan perjalanan, penambahan dan pengembangan kawasan pariwisata, serta mengupayakan munculnya produk-produk wisata baru. Sebagai sebuah industri, pariwisata tentunya tidak sama dengan manufaktur yang dapat menghasilkan produk berwujud. Pariwisata dengan produknya yang tidak berwujud hanya dapat dinilai melalui unsur-unsur pendukungnya. Sebagai sebuah industri, unsur-unsur

pendukung pariwisata terdiri dari daya tarik, fasilitas-fasilitas, infrastruktur, transportasi dan keramahtamahan.

Secara umum, industri pariwisata dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan yang bebas digunakan untuk berwisata, besarnya jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk, keadaan masyarakat, motivasi untuk melakukan perjalanan wisata, dan adanya insentif yang diberikan untuk berwisata. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor yang menentukan permintaan khusus pariwisata seperti biaya perjalanan, daya tarik wisata, kemudahan berkunjung, informasi dan layanan sebelum kunjungan, dan citra.

Pada dasarnya, masyarakat dan pemerintah merupakan dua pihak yang berpengaruh terhadap pembangunan. Begitu pula halnya dengan keterlibatan pihak swasta. Keberhasilan pemerintah menjaring investor dari dalam maupun dari luar daerah untuk melakukan investasi pada objek wisata tentunya dapat meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan. Untuk dapat meningkatkan PAD, maka perlu peningkatan terhadap permintaan pada suatu objek wisata. Peningkatan terhadap permintaan pada suatu objek wisata tentunya juga dipengaruhi oleh pengelolaan objek wisata. Dengan pengelolaan yang baik, wisatawan tentunya akan tertarik untuk mengunjungi suatu objek wisata. Dalam hal ini, pengelolaan terhadap suatu objek wisata menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata. Kabupaten Bulungan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata sangat baik. Potensi pariwisata tersebut dapat dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Pengembangan terhadap objek wisata di Kabupaten Bulungan dapat

dilaksanakan melalui pengelolaan yang baik. Indikator-indikator dari fokus penelitian diuraikan pada model alur pikir berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

D. Operasionalisasi Konsep

Unit analisis dalam penelitian kualitatif adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 38). Unit analisis pada penelitian ini terdiri adalah upaya pengembangan pariwisata yang dilaksanakan di Kabupaten Bulungan yang melibatkan pihak pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sebagai upaya peningkatan PAD. Fokus tersebut diteliti dan dikumpulkan informasinya

melalui pengumpulan data berdasarkan teknik-teknik pengumpulan data penelitian.

Teori utama dalam penelitian ini merujuk pada teori manajemen pengelolaan pariwisata dari Spillane (2006). Pemilihan teori didasarkan pada topik penelitian mengenai upaya pengembangan sektor pariwisata. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan sebagai dasar dan tinjauan bagi peneliti untuk memahami sektor pariwisata untuk kemudian digunakan dalam membandingkan antara pengelolaan pariwisata yang efektif dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang terjadi pada lokasi penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Apabila dilihat dari jenis data dan metode analisis maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan dan analisis data bersifat induktif guna memperoleh hasil penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2011: 8). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memaparkan upaya pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan sebagai upaya peningkatan PAD.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Kabupaten Bulungan, yang kemudian difokuskan pada dinas-dinas yang bertugas menangani dan mengelola pariwisata di Kabupaten Bulungan. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015 dengan kurun waktu penelitian selama 3 bulan, yaitu dari bulan September sampai dengan November 2015.

Penelitian kualitatif tidak mengenal adanya populasi dan sampel. Hal ini disebabkan penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari penelitiannya. Data penelitian diperoleh dari subjek yang

menjadi informan yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan merupakan sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis (Arikunto, 2010: 172). Informan atau narasumber penelitian antara lain sebagai berikut.

1. Pihak pemerintah yang terdiri dari pegawai yang bekerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan, yang terdiri dari Kepala Dinas, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kabid Kepariwisata, dan Kasi Promosi Pariwisata.
2. Pihak swasta yang melaksanakan kemitraan dengan pemerintah dalam membangun dan mengelola obyek wisata.
3. Pihak masyarakat yang berada di sekitar lingkungan obyek wisata.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tersebut dimaksudkan agar selama proses wawancara dilakukan dapat memperoleh jawaban yang akurat, tidak menyimpang dari maksud, dan mampu menjawab pertanyaan rumusan masalah. Pedoman wawancara yang dibuat peneliti tidak mengikat jalannya wawancara, tetapi pedoman wawancara yang dibuat adalah sebagai kontrol bagi peneliti untuk membawa ke pokok persoalan. Jadi pelaksanaan wawancara sendiri tidak bersifat kaku. Pengembangan materi wawancara dikembangkan dengan baik tidak lepas dari pedoman wawancara yang sudah dibuat.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat serta pemerintah yang memberikan respon serta perannya terhadap pengembangan pariwisata. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi metode-metode pada uraian berikut.

1. Observasi

Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari keadaan yang ingin diamati, yaitu respon dan peran masyarakat dan pemerintah terhadap objek wisata. Observasi dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian. Melalui teknik observasi, langsung, dikumpulkan data dengan mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak, serta pola perilaku subjek penelitian. Observasi dilaksanakan langsung di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan orang yang menjadi sumber data untuk memperoleh gambaran mengenai respon dan peran masyarakat dan pemerintah. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang dilakukan dipandu dengan menggunakan bantuan pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang dibuat tidak mengikat jalannya wawancara, tetapi pedoman wawancara yang dibuat adalah sebagai pengontrol (pegangan) untuk fokus kepada pokok persoalan. Jadi pelaksanaan wawancara sendiri

tidak bersifat kaku. Pengembangan materi wawancara dikembangkan dengan baik tidak lepas dari pedoman wawancara yang sudah dibuat.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam dokumentasi ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, dilakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Dokumen yang diteliti pada penelitian ini merupakan dokumen yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan metode pengumpulan data tersebut maka terdapat instrumen dalam penelitian ini. Instrumen tersebut adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun berdasarkan teori mengenai pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sebagai upaya peningkatan PAD.

E. Metode Analisis Data

1. Triangulasi Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kebenaran realitas dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkontruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri peneliti sebagai hasil proses mental tiap individu dengan latar

belakangnya. Berdasarkan data yang diperoleh, maka pengujian keabsahan data atau uji validitas data dilakukan melalui triangulasi data.

Triangulasi adalah pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, dan waktu yang berbeda. Terdapat 3 teknik pengujian keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek dengan teknik yang sama tetapi pada sumber yang berbeda. Dalam triangulasi sumber, dilakukan pemeriksaan terhadap data yang telah diperoleh dari pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

2. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif dilakukan dengan memaparkan gambaran implementasi pengembangan sektor pariwisata dari data-data yang telah diperoleh pada penelitian. Pada data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dilakukan analisis melalui pengkajian dan pemaparan terhadap data. Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dikumpulkan, diedit, dan dikategorikan serta dicari kesesuaian polanya untuk kemudian dianalisis. Pada saat analisis data diuraikan mengenai tempat, gambaran implementasi pengembangan sektor pariwisata, analisis kata-kata, laporan secara detail menurut sudut pandang informan dan perilaku subjek penelitian dalam *setting* alamiah (*natural setting*).

Data yang telah dianalisis tersebut kemudian dibandingkan dengan teori-teori mengenai pengembangan sektor pariwisata yang telah diuraikan pada landasan teori sebagai dasar penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara teori dengan fenomena yang terjadi pada pengembangan sektor pariwisata. Dari hasil deskripsi tersebut kemudian peneliti menarik kesimpulan melalui interpretasi hasil analisis. Miles & Huberman (2009: 73) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Data yang diperoleh peneliti diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay atau menyajikan data. Dalam proses penyajian data, teks yang bersifat naratif digunakan untuk menyajikan data kualitatif yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian. Penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses akhir yang dilaksanakan dalam pengolahan data kualitatif. Verifikasi dilaksanakan untuk memberikan kesimpulan awal terhadap hasil penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara memaparkan mengenai upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat Kabupaten Bulungan dalam sebagai upaya peningkatan PAD. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kualitas dan efektifitas dari upaya pengembangan yang dilaksanakan untuk meningkatkan PAD. Analisis deskriptif merupakan proses interpretasi data yang dilakukan dengan cara mengamati dan membandingkan praktik-praktik pengembangan pariwisata yang dapat dilaksanakan dengan pengelolaan pariwisata yang terjadi di lapangan dengan landasan teoritis yang menjadi dasar dari pembahasan yang diteliti dalam penelitian ini.

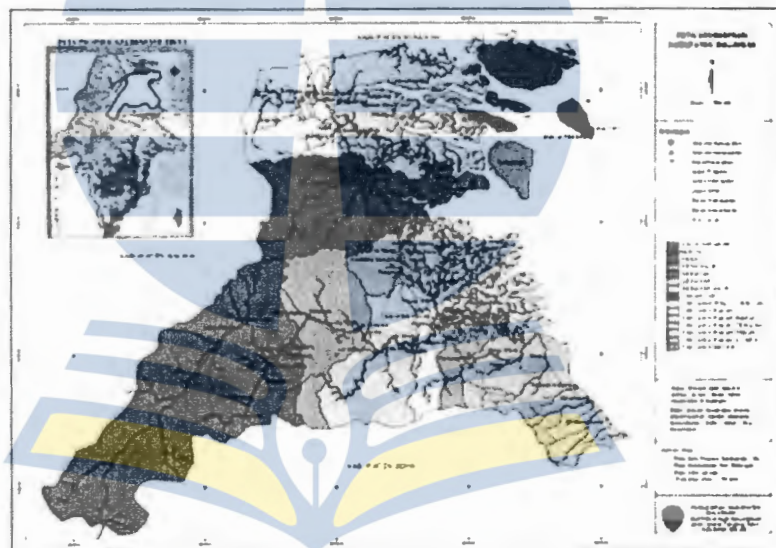
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan terletak di antara $116^{\circ}04'41''$ - $117^{\circ}57'56''$ bujur timur dan $2^{\circ}09'19''$ - $3^{\circ}34'49''$ lintang utara. Luas wilayah Kabupaten Bulungan adalah sebesar 13.181,92 km². Wilayah Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada peta berikut.



Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Bulungan

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Bulungan secara rinci adalah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu dari 5 kabupaten di Propinsi Kalimantan Utara dengan Ibukota Kabupaten berada di Kota Tanjung Selor. Luas Wilayah Kabupaten Bulungan adalah 13.181,92 km² terdiri dari 10 Kecamatan, 81 Desa dan 6 Kelurahan. Tiga Kecamatan terluas yaitu:

- a. Kec. Peso : 3.142,79 Km² atau 23,84% dari luas kabupaten
- b. Kec. Sekatak : 1.993,98 Km² atau 15,13% dari luas kabupaten
- c. Kec. Tanjung Palas : 1.755,54 Km² atau 13,32% dari luas kabupaten

Tiga Kecamatan terkecil yaitu:

- a. Kec. Bunyu : 198,32 Km² atau 1,50% dari luas kabupaten
- b. Kec. Tanjung Palas Tengah : 624,95 Km² atau 4,74% dari luas kabupaten
- c. Kec. Tanjung Palas Timur : 677,77 Km² atau 5,14% dari luas kabupaten

Kondisi Geografis Wilayah Kab. Bulungan memiliki 7 aliran sungai induk, 15 gunung dan 201 pulau besar dan kecil. Pulau terbesar adalah pulau Mandul dengan luas 38.737,413ha.

2. Sejarah Singkat Kabupaten Bulungan

Nama Bulungan berasal dari sebuah kesultanan yang pernah ada di daerah tersebut yaitu Kesultanan Bulungan yang berkedudukan di Tanjung

Palas. Kabupaten ini sebelumnya merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak tahun 1999, kabupaten ini telah dimekarkan menjadi tiga kabupaten dan satu kota masing-masing Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Pada tahun 2012, keempat wilayah otonom tersebut beserta Kabupaten Tana Tidung memisahkan diri dari Kalimantan Timur dan menjadi wilayah provinsi baru Kalimantan Utara.

Secara kronologis, sejarah perjalanan terbentuknya Bulungan sebagai Daerah Otonom, sebagai berikut.

Tabel 4.1.

Kronologi Sejarah Kabupaten Bulungan

Tahun 1731	• Awal berdirinya Kesultanan Bulungan. Raja Pertama: Wira Amir gelar Amiril Mukminin (1731 – 1777) • Raja Kesultanan Bulungan yang ke-13 (terakhir): Datuk Tiras gelar Sultan Maulana Muhammad Djalalluddin (1931 – 1958)
Tahun 1950	Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Kesultanan Bulungan ditetapkan sebagai Wilayah Swapraja
Tahun 1955	• Berdasarkan: SK Gubernur Kalimantan No. 186/ORB/92/14/1950, kemudian disahkan menjadi UU Darurat RI Nomor 3 Tahun 1953. Status Wilayah Swapraja Bulungan dirubah menjadi Daerah Istimewa Bulungan. - Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1955 Sebagai Kepala Daerah Istimewa : Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin (Datuk Tiras) • Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah. Ketua DPRD Pertama : Muhammad Zaini Anwar (1955 – 1959)
Tahun	Status Daerah Istimewa dirubah menjadi Daerah Tingkat

Tahun 1959	II Bulungan. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1959
Tahun 1960	• Tanggal 12 Oktober 1960, Pelantikan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Pertama: Andi Tjatjo Gelar Datuk Wiharja (1960 - 1963) • Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan.
Tahun 1997	• Bulan Desember 1997, Status Kota Administratif Tarakan ditingkatkan menjadi Kotamadya Tarakan (Terdiri dari: 2 Kecamatan, 12 Desa, dan Luas wilayah 507,10 Km') • Berdasarkan UU. Nomor 29 Tahun 1997. • <u>Pemekaran Kabupaten</u> Daerah Tk. II Bulungan menjadi 3 (tiga) Daerah Otonom, yaitu: Kabupaten Bulungan, Malinau dan Nunukan (masing-masing membawahi 5 Kecamatan) • Berdasarkan : UU. Nomor 47 Tahun 1999
Tahun 2000	• Perubahan Nomenklatur Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan menjadi Kabupaten Bulungan dan Titelatur Bupati Kepala Daerah Tk. II Bulungan menjadi Bupati Bulungan. • Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 (selanjutnya direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)
Tahun 2005	• Tanggal 27 Juni 2005, pertama kali dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung untuk memilih Kepala Daerah ke- 12 (2005 – 2010) • <u>Dasar pelaksanaan Pilkada</u> : UU. Nomor 32 Tahun 2004 dan PP. Nomor 6 Tahun 2005.
Tahun 2007	Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, maka wilayah Kabupaten Bulungan berkurang menjadi 10 Kecamatan.

Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel di atas dapat dipahami kronologis sejarah berdirinya Kabupaten Bulungan. Kesultanan Bulungan berdiri pada tahun 1731 dengan Wira Amir sebagai raja pertamanya. Pada tahun 1950 setelah kemerdekaan Republik Indonesia,

Kesultanan Bulungan ditetapkan sebagai wilayah Swapraja. Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan No. 186/ORB/92/14/1950 yang disahkan menjadi Undang-undang Darurat RI Nomor 3 Tahun 1953, pada tahun 1955 Kabupaten Bulungan kemudian disahkan menjadi Daerah Istimewa Bulungan. Kepala Daerah pada masa tersebut disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1955. Pada saat itu juga terbentuk Dewan perwakilan Rakyat.

Selanjutnya, pada tahun 1959 Status Daerah Istimewa dirubah menjadi Daerah Tingkat II Bulungan. Hal ini ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959. Tanggal 12 Oktober 1960 dilakukan pelantikan bupati Kelapa Daerah Tingkat II Bulungan yang pertama, yaitu Andi Tjatjo. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari jadi Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan.

Pada bulan Desember tahun 1997, status Kota Administratif Tarakan ditingkatkan menjadi Kotamadya tarakan berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997. Hal ini dilakukan sejalan dengan pemekaran daerah Tk. II Bulungan menjadi 3 daerah otonom, yaitu Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan yang masing-masing membawahi 5 Kecamatan. Hal ini ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.

Pada tahun 2000 terjadi perubahan nomenklatur Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan menjadi Kabupaten Bulungan dengan Titelatur Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan menjadi Bupati Bulungan. Hal

ini dilakukan berdasarkan ketentuan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pada tanggal 27 Juni 2005 Kabupaten Bulungan pertama kali melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung untuk memilih Kepala Daerah periode ke-12 tahun 2005-2010. Pilkada di kabupaten Bulungan didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Kemudian, pada tahun 2007, berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Tidung, maka wilayah Kabupaten Bulungan berkurang menjadi 10 Kecamatan.

Kabupaten Bulungan sebelumnya merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak tahun 1999, kabupaten ini telah dimekarkan menjadi tiga kabupaten dan satu kota masing-masing Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Pada tahun 2012, keempat wilayah otonom tersebut beserta Kabupaten Tana Tidung memisahkan diri dari Kalimantan Timur dan menjadi wilayah provinsi baru Kalimantan Utara.

3. Profil Dinas Pariwisata kabupaten Bulungan

Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Bulungan merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam pelaksanaan tugas di pimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda

dan olah raga. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan fungsi berikut.

- a . perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b . perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- c . perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebudayaan;
- d . perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pariwisata;
- e . perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pemuda;
- f . perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang olah raga;
- g . penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;

- h . pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- i . penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j . pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga ;
- k . pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- l . pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan

Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut.

“Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Daerah Tujuan Wisata Alam, Budaya dan Sejarah di Kalimantan Utara”.

Arti dari visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. **Wisata Alam** berarti: menjadikan Kabupaten Bulungan sebagai temat atau destinasi wisata yang layak kunjun dan memiliki daya tarik serta fasilitas pariwisata yang dapat diandalkan.
- b. Mewujudkan **Kabupaten Bulungan** sebagai Daerah Tujuan Wisata Budaya berarti Kabupaten Bulungan kaya akan wisata budaya yang nik dengan 3 suku besar (Dayak, Bulungan, dan Tidung) serta ornamen, ukiran yang berbeda dengan kabupaten lain di Kalimantan Timur.
- c. **Wisata Sejarah** berarti bahwa Kabupaten Bulungan memiliki Kerajaan Bulungan namun pada tahun 1964 dibakar oleh oknum yang

tidak bertanggung jawab. Sejarah dibuktikan melalui duplikat museum yang menyimpan benda-benda peninggalan Sultan Bulungan, Mesjid Tua Kasimuddin dan Makam-makam Sultan Bulungan.

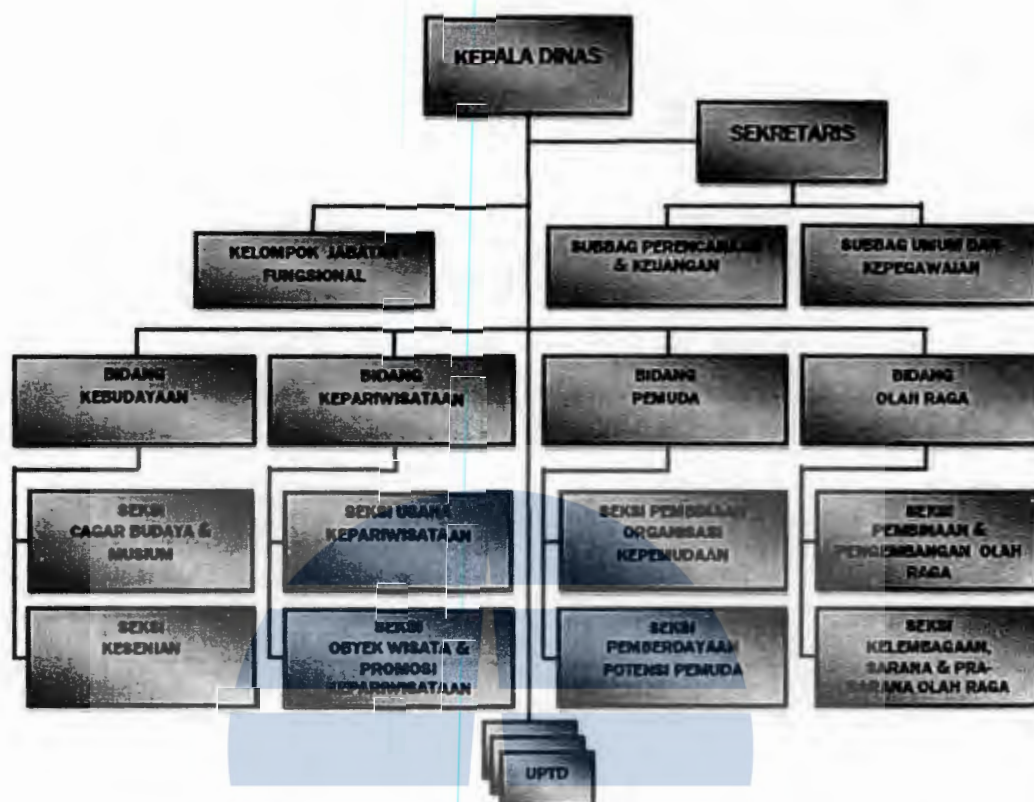
- d. **Kallimantan Timur** berarti: suatu keinginan agar wisata budaya dan alam di Kabupaten Bulungan menjadi ikon untuk mendukung Visit East Borneo. Dalam hal ini, visi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan disusun pada saat Kabupaten Bulungan masih tergabung di Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan menjalankan misi berikut ini.

- a . Meningkatkan sistem dan prosedur pelayanan administrasi kantor
- b . Meningkatkan kualitas SDM Pariwisata
- c . Meningkatkan potensi objek wisata unggulan di Kabupaten Bulungan
- d . Meningkatkan promosi wisata alam, budaya dan sejarah
- e . Meningkatkan pelestarian kebudayaan daerah
- f . Meningkatkan hubungan kemitraan dengan pihak swasta dalam rangka pembangunan daerah di bidang kepariwisataan

5. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan

Desa struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut.



Gambar 4.2. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana gambar di atas terdiri dari:

- a . Kepala Dinas;
- b . Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c . Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Cagar Budaya dan Musium ;
 - 2) Seksi Kesenian.
- d . Bidang Kepariwisata, membawahkan :

- 1) Seksi Usaha Kepariwisataa;
 - 2) Seksi Obyek Wisata dan Promosi Kepariwisataa.
- e . Bidang Pemuda, membawahkan :
- 1) Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Potensi Pemuda.
- f . Bidang Olah Raga, membawahkan :
- 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga;
 - 2) Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Olah Raga.
- g . Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h . Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan diuraikan sebagaimana berikut.

- a. Bidang Kebudayaan
- 1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidangkebudayaan melaksanakan pembinaan, pengembangan, perlindungan, pemanfaatan, pengkajian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebudayaan meliputi cagar budaya dan musium serta kesenian
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang kebudayaan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b) Pembinaan, pengembangan, perlindungan, pemanfaatan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan cagar budaya dan musium serta kesenian;
- c) Penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan;
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Bidang Kepariwisata

- 1) Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidangkepariwisataan, melaksanakan pembinaan, pengembangan, perlindungan, pemanfaatan, fasilitasi, pengkajian dan koordinasi pelaksanaan kepariwisataan meliputi usaha kepariwisataan serta obyek wisata dan promosi kepariwisataan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang kepariwisataan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b) Pembinaan, pengembangan, pengawasan, perlindungan, pemanfaatan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan usaha kepariwisataan, obyek wisata dan promosi kepariwisataan;
 - c) Penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya kepariwisataan dan obyek wisata;
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- c. Bidang Pemuda
- 1) Bidang Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pemuda melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kepemudaan meliputi pembinaan organisasi kepemudaan dan pemberdayaan potensi pemuda
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Pemuda menyalenggarakan fungsi:

- a) Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pemuda sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b) Pembinaan, pengembangan, pengawasan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan organisasi kepemudaan dan pemberdayaan potensi pemuda;
 - c) Penyelenggaraan peningkatan dan pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta iman dan taqwa (IMTAQ) pemuda;
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- d. Bidang Olah Raga
- 1) Bidang Olah Ragasebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf f,mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidangkeolahragaan, melaksanakan pembinaan, pengembangan, fasilitasi, pengkajian dan koordinasi pelaksanaan keolahragaan meliputi pembinaan dan pengembangan olah raga serta kelembagaan, sarana dan prasarana olah raga.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang olah raga sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b) Pembinaan, pengembangan, fasilitasi, kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga serta kelembagaan, sarana dan prasarana olah raga;
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Hasil

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan. Pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan dapat diketahui dari hasil wawancara antara peneliti dengan informan penelitian yang terdiri dari aparat pemerintah pada Dinas Pariwisata, pihak swasta, dan masyarakat. Kabupaten Bulungan pada dasarnya memiliki banyak objek wisata yang berpotensi untuk memajukan pariwisata di kabupaten Bulungan. Berikut uraian terkait dengan hasil penelitian ini.

1. Pengembangan Sektor Pariwisata yang Dilakukan dalam Upaya Meningkatkan PAD di Kabupaten Bulungan

Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dalam upaya peningkatan PAD dapat diketahui dari hasil wawancara penelitian. Terkait dengan upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam pengembangan objek

wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan dijelaskan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebagaimana kutipan berikut.

“Setiap tahun kita memprogramkan adanya kegiatan penataan di beberapa objek wisata andalan Kabupaten Bulungan. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan adanya perbaikan fasilitas objek wisata sehingga memberikan kenyamanan bagi pengunjungnya” (WKD, 2015).

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa setiap tahun ada penyusunan program dan kegiatan penataan pada beberapa objek wisata yang terdapat di Kabupaten Bulungan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar ada peningkatan dalam fasilitas yang terdapat di objek wisata. Apabila fasilitas berada dalam kondisi baik, maka jumlah pengunjung pariwisata akan meningkat, sehingga pada akhirnya meningkatkan PAD. Namun demikian, terkait dengan upaya peningkatan PAD melalui pengembangan sektor pariwisata, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulungan memberikan penjelasan sebagaimana berikut.

“Sampai saat ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulungan bisa memungut retribusi (WKP, 2015)”.

Melalui wawancara yang dilaksanakan peneliti, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulungan memberikan penjelasan bahwa sampai saat ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulungan belum bisa melakukan pemungutan retribusi. Hal ini disebabkan

belum ada regulasi yang mengatur tentang pemungutan retribusi tempat wisata. Pada saat ini, Perda yang berkaitan dengan regulasi retribusi masih berada pada tahap persiapan. Dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata, pihak pemerintah telah melakukan perencanaan sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan. Hal ini dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Tentu kita membuat *master plan* perencanaan, penataan, dan pengembangann objek wisata agar pembangunan dan pengembangan objek wisata dapat terarah, fokus, dan terintegrasi dengan kegiatan sektor lainnya di sekitar lokasi objek wisata (WKD, 2015)”.

Kabid Kepariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulungan mengungkapkan fakta yang sama terkait perencanaan sebagaimana kutipan berikut.

“Ya, tentu saja tahun 2014 telah dibuat *master plan* air terjun KM 18 dan di tahun 2015 melaksanakan pembuatan DED, di tahun 2016 direncanakan pengangunan fisik dengan sarana yang terintegrasi (WKK, 2015)”.

Berdasarkan kutipan sebelumnya dapat dikatakan bahwa perencanaan dalam pengembangan objek wisata dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya dokumen perencanaan yang memadai dalam pengembangan objek wisata. Dalam pengembangan pariwisata yang dilaksanakan di Kabupaten Bulungan, Dinas Pariwisata menyusun *master plan* sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan penataan, dan pengembangann objek wisata. *Master plan* yang disusun juga diharapkan dapat memberi arah kepada program pengembangan yang

dilaksanakan sehingga pengembangan pariwisata berjalan lebih fokus dan terarah, yang pada akhirnya akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Pemerintah telah melakukan upaya yang matang dalam menyusun perencanaan bagi pengembangan objek wisata. Adapun cara melakukan perencanaan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan dijelaskan sebagaimana kutipan wawancara berikut.

“Mensinergikan perencanaan antara pihak eksekutif, legislatif, dalam hal pembiayaan kegiatan, dengan pihak ketiga dalam hal ini para kontraktor. Juga kita jalin komunikasi dan kita tawarkan potensi wisata yang kita miliki dengan harapan investor akan berinvestasi di bidang pariwisata Kabupaten Bulungan (WKD, 2015)”.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa perencanaan disusun dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain pihak eksekutif, legislatif, dan para kontraktor sebagai pihak ketiga. Pengembangan pariwisata juga dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan menjalin hubungan baik terhadap investor. Hal ini dilakukan dengan harapan investor akan tertarik untuk berinvestasi di bidang pariwisata Kabupaten Bulungan. Kegiatan lain yang dilakukan dalam perencanaan pengembangan pariwisata adalah studi kelayakan dan studi banding sebagaimana ungkapan Kabid Kepariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulungan berikut.

“Caranya dengan melakukan studi kelayakan objek wisata yang berpotensi dan melakukan studi banding di Kota Jogja (WKK, 2015).

Sampai dengan tahap perencanaan, pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan dilaksanakan dengan cukup baik. Akan tetapi, kelemahan dari pengembangan ini terjadi karena tidak adanya regulasi yang jelas terkait secara langsung dengan pengembangan pariwisata. Fenomena ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata sebagaimana kutipan wawancara berikut.

“Belum ada regulasinya karena kita belum melihat geliat wisata di Kabupaten Bulungan. Setelah terbentuknya Kaltara ini dan Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor sebagai ibukotanya bisa saja kedepannya Tanjung Selor merupakan jalur pariwisata yang punya potensi kedepan (WKD, 2015)”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan. Tanpa adanya regulasi tentunya tidak ada program yang dapat dijalankan secara efektif guna mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Bulungan. Pengembangan yang sudah dilaksanakan sampai dengan saat ini adalah program dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan saja. Namun demikian, Kabid Kepariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulungan memberikan pernyataan yang sedikit berbeda sebagaimana kutipan berikut.

“Melalui Bappeda telah membuat regulasi berupa rencana induk pembangunan pariwisata daerah (Riparda) yang berlaku tahun 2015 sampai 2030 (WKK, 2015)”.

Dalam melaksanakan pengembangan yang selama ini diprogramkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan, dinas tersebut telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar objek wisata. Hal ini dapat dipahami dari kutipan wawancara berikut.

“Tentu, ada setiap tahun ada program dan kegiatan yang dilakukan baik pelaksanaan even-even wisata daerah, promosi wisata daerah ke mancanegara, ke tingkat nasional, dan sosialisasi ke masyarakat di sekitar objek wisata (WKD, 2015)”.

Lebih lanjut terkait dengan sosialisasi pengembangan objek wisata dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Melalui pelaksanaan even-even wisata daerah, melakukan pemilihan duta wisata daerah, promosi ke media massa, elektronik, dan brosur-brosur yang ada (WKD, 2015)”.

Kutipan-kutipan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata di Kabupaten Bulungan sudah terlaksana dengan cukup baik. Sosialisasi program pengembangan wisata dan objek wisata di Kabupaten Bulungan dilakukan melalui pelaksanaan even-even wisata daerah dan juga promosi wisata. Promosi wisata sendiri merupakan bentuk pemasaran terhadap pariwisata di Kabupaten Bulungan. Terkait dengan pemasaran terhadap objek wisata di Kabupaten Bulungan, berikut pendapat Kepala Dinas Pariwisata.

“Iya, di struktur kita ada satu seksi yang membidangi masalah promosi dan penyuluhan wisata. Seksi inilah yang bekerja melaksanakan tupoksinya untuk melakukan promosi wisata dalam rangka melakukan pemasaran pariwisata baik secara nasional maupun manca negara (WKD, 2015)”.

Di Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan ada bagian tersendiri yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap promosi wisata di Kabupaten Bulungan. Promosi terhadap pariwisata di Kabupaten Bulungan telah dilakukan baik secara nasional hingga manca negara. Upaya promosi wisata dinilai cukup memberikan hasil. Dengan adanya promosi wisata, tentunya lebih banyak masyarakat yang mengetahui tentang potensi pariwisata di Kabupaten Bulungan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan sebagaimana kutipan wawancara berikut.

“Tentu ada hasilnya, karena dari sisi promosi, objek dan potensi wisata banyak masyarakat yang belum tau akhirnya menjadi tau terhadap potensi wisata yang ada di Kabupaten Bulungan (WKD, 2015)”.

Sampai dengan saat ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan telah melaksanakan beberapa program pengembangan objek wisata. Namun demikian, pengembangan yang dilaksanakan masih bersifat parsial karena tidak fokus pada salah satu objek wisata saja. Berikut ungkapan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan terkait pengembangan tersebut.

“Pengembangan objek wisata masih bersifat parsial. Artinya, pengembangan objek wisata tidak fokus pada salah satu objek saja karena belum ada objek wisata yang dikelola secara profesional. Kedepan akan dilakukan secara profesional dengan melibatkan pihak ketiga untuk mengelola objek wisata secara profesional (WKD, 2015)”.

Adapun regulasi yang baru-baru ini disahkan terkait dengan pelaksanaan pengembangan sektor wisata adalah Perda Nomor 07 Tahun

2014 tentang TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata). Hal ini dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Regulasi melalui Perda Nomor 07 Tahun 2014 tentang TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), terdapat 13 usaha pariwisata antara lain ijin usaha kawasan pariwisata dan ijin usaha daya tarik wisata (WKK, 2015).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini belum ada program pengembangan yang berjalan terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan berupa adanya objek wisata yang dikelola secara profesional. Tanpa adanya pengelolaan objek pariwisata yang dilaksanakan secara profesional tentunya tidak ada pula kontribusi yang terukur dan berarti dari sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Bulungan. Adapun program yang telah dilaksanakan dalam pengembangan pariwisata adalah program penataan dan pengembangan objek wisata yang ada di seksi objek dan sarana wisata.

Pada dasarnya, dalam pengembangan objek wisata tentunya ada beberapa faktor yang dapat mendukung pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain sarana dan prasarana, pihak yang terlibat, anggaran, dan kerjasama antar dinas terkait. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan objek wisata yang satu dengan objek wisata yang lainnya tentu berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objek wisata itu sendiri. Berikut pendapat Kepala Dinas Pariwisata sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan objek wisata.

“Karena masing-masing objek wisata berbeda karakteristiknya, maka tentu berbeda juga sarana dan prasarana yang dibutuhkan masing-masing objek wisata (WKD, 2015)”.

Pendapat di atas dapat dibenarkan mengingat bahwa karakteristik setiap objek wisata berbeda-beda. Adapun pihak yang terkait dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut.

“Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata adalah, pertama bupati dan perangkat teknis di eksekutif, kedua ketua DPRD dan perangkat komisi yang membidangi pariwisata, pihak ketiga yang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek pengembangan objek wisata (WKD, 2015)”.

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata antara lain perangkat eksekutif, legislatif dan juga pihak swasta yang melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek pengembangan objek wisata. Untuk melaksanakan pengembangan pariwisata juga sangat dibutuhkan anggaran yang cukup. Kecukupan anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk pengembangan pariwisata dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut.

“Anggaran yang diberikan tentu tidak mencukupi untuk mengembangkan objek wisata karena banyaknya objek wisata yang harus mendapat perhatian untuk diperbaiki dan dibiayai. Inilah yang menjadi tantangan dalam memperbaiki sistem penataan dan pengembangan objek wisata (WKD, 2015)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa anggaran yang dapat digunakan dalam mengembangkan sektor pariwisata belum mencukupi. Apabila dibandingkan dengan banyaknya potensi dan objek wisata yang terdapat di Kabupaten Bulungan, maka anggaran yang dialokasikan bagi pengembangan objek wisata masih sangat kurang. Naun demikian, masih ada faktor pendukung lain bagi pengembangan pariwisata

di Kabupaten Bulungan, yaitu kerjasama antar dinas terkait. Melalui wawancara yang dilaksanakan peneliti, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan menyampaikan bahwa kerjasama yang terjalin antar Dinas sudah sangat baik sekali. Seluruh dinas terkait telah bersinergi untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dalam pelaksanaan program pengembangan pariwisata.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa masyarakat menyetujui pemanfaatan lahan dalam pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Bulungan. Berikut hasil kutipan wawancara dengan masyarakat.

“Setuju, asalkan dalam pengembangan pariwisata dengan pemanfaatan lahan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dengan artikata, penggantian lahan masyarakat juga sesuai bila pengembangan dilakukan pada lahan yang dimiliki oleh masyarakat (WM1, 2014)”.

Masyarakat lainnya menyatakan hal yang sama sebagaimana kutipan wawancara berikut.

“Pada prinsipnya, masyarakat setuju dengan adanya upaya pengembangan objek wisata di Kabupaten Bulungan, karena antara lain dapat meningkatkan ekonomi masyarakat (WM2, 2014)”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat merasa setuju terhadap pemanfaatan lahan objek wisata. Masyarakat juga memahami bahwa objek wisata perlu dimanfaatkan sebaikbaiknya untuk meningkatkan PAD. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan

pengembangan sektor pariwisata oleh pemerintah dan masyarakat sekitarnya.

Pemerintah selaku pengambil keputusan dan kebijakan tentunya telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat sekitar menyetujui pemanfaatan lahan dalam pengembangan sektor pariwisata. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan. Masyarakat menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bulungan telah melakukan cukup upaya untuk mengajak masyarakat. Berikut hasil kutipan wawancara dengan masyarakat.

“Pertama, sosialisasi program pengembangan wisata kepada masyarakat. Kedua, penggantian bagi lahan masyarakat yang menjadi tempat wisata yang sesuai. Ketiga, memberdayakan masyarakat setempat berperan aktif dalam mensukseskan pengembangan wisata di daerahnya (WM1, 2014)”.

Masyarakat lainnya berpendapat bahwa pemerintah perlu memperhatikan beberapa faktor agar masyarakat bersedia ikut mengelola objek wisata sebagaimana kutipan berikut.

“Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membuktikan sejak dini bahwa objek wisata tersebut dirasa memberikan manfaat sekitar, kemudian pengelolaan yang sungguh-sungguh (WM3, 2014)”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengajak masyarakat agar masyarakat sekitar menyetujui pemanfaatan lahan dalam pengembangan sektor pariwisata. Upaya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bulungan melalui Dinas Pariwisata. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan mengajak masyarakat sekitarnya khususnya dan masyarakat Bulungan

umumnya dapat berpartisipasi demi pengembangan dan keamanan obyek wisata. Partisipasi tersebut akan membuat masyarakat turut terlibat dalam pengembangan objek wisata. Namun demikian, secara tidak langsung masyarakat sudah ikut mengelola objek wisata. Hal ini dapat dipahami dari kutipan wawancara dengan pihak swasta berikut.

“Dibentuknya badan pengelola objek wisata oleh sekelompok kecil masyarakat atau swasta yang disetujui oleh pemerintah kecamatan (WS1, 2015)”.

Penunjukan pihak swasta juga dilakukan melalui proses lelang sebagaimana dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut.

“Penunjukan melalui proses lelang pengadaan barang dan jasa melalui Dinas Pariwisata. Bekerja sesuai kontrak di tahun anggaran yang sesuai tapi tidak mengelola, kegiatan peningkatan sarana saja (WS2, 2015)”.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kerjasama dengan pihak swasta hanya dalam pembangunan dan peningkatan sarana saja, bukan dalam pengelolaan objek wisata. Dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata Gunung Putih, masyarakat tidak merasa terganggu. Masyarakat justru merasa senang dengan pengembangan sektor pariwisata tersebut. Hal ini dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut.

“Masyarakat secara umum tidak merasa terganggu dengan adanya pengembangan objek wisata, justru masyarakat berharap objek-objek wisata dapat digali lagi lebih banyak karena masyarakat sangat membutuhkan objek wisata sebagai sarana berlibur yang baik (WM1, 2014)”.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa masyarakat tidak merasa terganggu dengan adanya pengembangan sektor pariwisata. Masyarakat

mendukung selagi program bermanfaat juga bagi masyarakat sekitar. Masyarakat justru merasa senang apabila objek wisata tersebut dilestarikan. Pelestarian terhadap objek wisata akan turut memberdayakan ekonomi masyarakat. Kondisi ini juga ditunjukkan masyarakat dengan ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan di objek wisata. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya menjaga keamanan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan. Masyarakat menyatakan bahwa

“Masyarakat akan turut serta menjaga keamanan di sekitar objek wisata jika memang itu diperlukan, namun kami berharap agar di dalam perencanaannya nanti juga pemerintah berpikir sampai dengan tingkat peran serta masyarakat (WM2, 2014)”.

Berdasarkan kutipan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat sudah melakukan upaya untuk menjaga keamanan objek wisata. Pendapat masyarakat mengenai upaya yang dilakukan masyarakat dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Bentuk peran serta masyarakat di dalam menjaga keamanan adalah bila pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki objek wisata (WM2, 2014)”.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa masyarakat merasa perlu melestarikan objek wisata, agar tidak dirusak dan dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bukti dari adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Sejauh ini masih aman, namun perlu peningkatan lebih serius karena berbagai objek wisata tidak ditemukan pengelola atau personil yang secara kontinyu dan terorganisir dalam mempertanggungjawabkan tempat-tempat wisata (WM1, 2014)”.

Objek wisata telah dikelola dengan baik oleh pemerintah, masyarakat, dan juga pihak swasta. Pengelolaan yang baik terhadap objek wisata mempengaruhi perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Dengan demikian maka keamanan objek wisata juga terjamin sehingga pengunjung merasa puas dan nyaman. Pengunjung yang merasa puas diharapkan akan melakukan kunjungan ulang, sehingga PAD Kabupaten Bulungan turut mengalami peningkatan dari objek wisata. Selain dari segi keamanan, masyarakat sekitar juga diberikan kesempatan untuk berperan dalam pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan. Hal ini dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Iya, dalam beberapa hal seperti kegiatan baik, yang tahunan maupun kegiatan-kegiatan lain masyarakat telah dilibatkan sebagai pelaksana aktif kegiatan-kegiatan budaya objek-objek wisata (WM1, 2014)”.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pihak swasta telah diberikan kesempatan untuk turut berperan dalam peningkatan pengembangan dan kemajuan objek wisata. Peran serta masyarakat tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan objek wisata tersebut, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi objek wisata. Masyarakat di sekitar objek wisata perlu diajak ikut serta untuk mengelola objek wisata. Hal ini dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Di dalam pengelolaan objek wisata haruslah dikelola oleh orang-orang yang berpengalaman tentunya dengan melibatkan peran serta masyarakat (WM2, 2014)”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat ikut mengelola objek wisata. Pemerintah selaku pengambil keputusan dan penyusun kebijakan tentunya perlu dukungan penuh dari masyarakat. Dengan mengajak masyarakat turut serta mengelola objek wisata maka dapat dipastikan bahwa masyarakat akan mendukung pemerintah dalam melakukan pengembangan objek wisata.

Hasil wawancara penelitian juga menunjukkan pengelolaan yang dilakukan masyarakat terhadap objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan. Masyarakat berperan dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Namun demikian, masyarakat berharap ada perencanaan dan anggaran dari pemerintah sehingga masyarakat dan pemerintah memiliki kerjasama yang pasti. Kondisi ini dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Masyarakat sebatas berperan serta harus didukung oleh perencanaan dan anggaran yang baik dari pemerintah. Masyarakat siap berpartisipasi jika memang semuanya terarah dengan baik (WM2, 2014)”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat berupaya menjaga kebersihan objek wisata, menjaga keamanan dan suasana agar tetap lestari, tidak dirusak, tertata dengan rapi, dan lain sebagainya. Masyarakat merasa perlu ada kerjasama yang baik antara pemerintah, DPRD dengan swasta demi kemajuan dan peningkatan PAD Kabupaten Bulungan dengan peningkatan pengelolaan objek wisata. Masyarakat ikut merasa memiliki objek wisata tersebut. Hal ini membuat masyarakat merasa senang sebagaimana kutipan berikut.

“Dengan adanya kesempatan atau peluang usaha, tentu masyarakat dengan meningkatkan ekonominya dengan berusaha di sekitar lokasi wisata dengan tetap menjaga dan melestarikan lingkungan dan sosial budaya masyarakat sekitar (WM2, 2014)”.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa masyarakat merasa senang apabila diikutsertakan dalam mengelola objek wisata. Objek wisata merupakan salah satu potensi wisata yang cukup besar di Kabupaten Bulungan. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat harus membangun kerjasama yang baik demi peningkatan PAD Kabupaten Bulungan. Dalam melaksanakan pengelolaan terhadap objek wisata, pemerintah sendiri telah melakukan perencanaan. Ada 3 perencanaan dari pihak pemerintah, yaitu perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Penerapan terhadap perencanaan dapat diketahui melalui kutipan berikut.

“Ya, tentu saja tahun 2014 telah dibuat *master plan* air terjun KM 18 dan di tahun 2015 melaksanakan pembuatan *DED*, di tahun 2016 direncanakan pengangunan fisik dengan sarana yang terintegrasi (WKK, 2015)”.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa untuk sementara waktu pemerintah daerah Kabupaten Bulungan menerapkan rencana jangka pendek. Namun demikian, diharapkan suatu perencanaan jangka panjang. Hal ini akan memberikan kemajuan yang lebih baik dalam pengelolaan objek wisata. Cara pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam pelaksanaan kemitraan untuk pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Pengembangan objek wisata masih bersifat parsial. Artinya, pengembangan objek wisata tidak fokus pada salah satu objek saja karena belum ada objek wisata yang dikelola secara profesional. Kedepan akan dilakukan secara profesional dengan melibatkan pihak ketiga untuk mengelola objek wisata secara profesional (WKD, 2015)

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa pihak pemerintah akan akan menyerahkan pengelolaan kepada pihak ketiga, baik perorangan, kelompok masyarakat, ataupun yayasan yang nanti akan dituangkan dalam hubungan kerja sama kemitraan pada tahun 2015.

2. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pengembangan Sektor Pariwisata dalam Upaya Meningkatkan PAD di Kabupaten Bulungan

Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman merupakan faktor berpengaruh yang perlu diidentifikasi terkait dengan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengenai kondisi lingkungan dan memahami strategi yang harus diambil sesuai dengan kondisi lingkungan tersebut. Terkait dengan kekuatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan pengembangan pariwisata di dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Pertama, niat dan keinginan yang kuat untuk menjadikan Kabupaten Bulungan sebagai daerah tujuan wisata alam, wisata sejarah, wisata arung jeram, wisata bahari oleh *stake holder* yang ada. Kedua, banyaknya objek wisata yang berdekatan satu jalur sehingga sekali kunjungan wisata dapat sampai pada beberapa objek wisata. Ketiga, kondisi objek wisata yang mempunyai daya tarik tersendiri. Keempat, alur kunjungan wisata setelah Pulau Derawan, Kakaban, Sangalaki, Pantai Laut Tanah Kuning dan pusat pemerintahan Propinsi Kaltara (WKD, 2015)”.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui faktor pendukung dari pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan. Faktor pendukung tersebut pada dasarnya adalah besarnya potensi wisata di Kabupaten Bulungan, baik dari segi wisata alam, wisata sejarah, wisata arung jeram, wisata bahari. Adapun faktor yang menjadi kekuatan bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Bulungan dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut.

“Pertama, koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang kuat. Kedua, koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan even wisata yang kuat. Ketiga, karakteristik objek wisata yang menjanjikan (WKD, 2015)”.

Faktor penghambat dari pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan dapat diketahui dari kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata sebagaimana berikut.

“Pertama, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pengembangan dan penataan objek wisata. Kedua, banyaknya objek wisata yang harus mendapatkan penataan sementara anggaran terbatas. Ketiga, belum adanya investor yang berminat untuk berinvestasi dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata (WKD, 2015)”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan. Adapun faktor penghambat tersebut adalah keterbatasan anggaran dan masih belum ada investor yang berminat untuk berinvestasi di sektor pariwisata Kabupaten Bulungan. Selain faktor penghambat, Dinas Pariwisata masih menemukan beberapa kelemahan

yang dapat mempengaruhi pengembangan sektor pariwisata sebagaimana kutipan wawancara berikut.

“Pertama, SDM di bidang pariwisata yang terbatas. Kedua, kurang pemahaman dan keterlibatan masyarakat di sekitar objek wisata dalam ikut menjaga dan memelihara objek wisata. Ketiga, infrastruktur menuju objek wisata yang belum memadai (WKD, 2015)”.

Kutipan di atas menginformasikan bahwa pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan memiliki kelemahan di beberapa faktor. Faktor tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya keterlibatan masyarakat, dan infrastruktur yang kurang memadai. Dalam pelaksanaan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan tentunya ada pihak yang melakukan pengawasan. Pihak tersebut adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan, pengawas proyek, kepala kantor, dan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut.

“Pertama, Inspektorat Kabupaten Bulungan jika bentuknya kegiatan SKPD. Kedua, Pengawas proyek dalam pelaksanaan kegiatan. Ketiga, Kepala Kantor dan perangkat SKPD pariwisata yang membidangi. Keempat, masyarakat secara keseluruhan (WKD, 2015)”.

Pengawasan tersebut dimaksudkan agar pengembangan sektor pariwisata dapat berjalan sesuai yang diharapkan guna mencapai tujuannya. Hasil dari pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan dinilai cukup baik oleh Kepala Dinas Pariwisata sebagaimana kutipan wawancara berikut.

“Cukup baik, tertatanya beberapa objek wisata andalan dalam kota Kabupaten Bulungan sehingga layak untuk dikunjungi walaupun penataannya belum maksimal namun terasa lebih baik

dibandingkan sebelum dilakukan penataan di sekitar objek wisata (WKD, 2015)".

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tertatanya beberapa objek wisata andalan. Walaupun penataan yang dilakukan belum maksimal, namun sudah ada upaya yang dilakukan ke arah pencapaian tujuan yang optimal dalam pengembangan sektor pariwisata.

3. Kondisi Infrastruktur bagi Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Bulungan

Sampai dengan saat ini, infrastruktur masih menjadi prioritas utama dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bulungan diarahkan untuk memperkuat promosi wisata. Namun demikian, sampai saat ini perlu menjadi catatan bahwa infrastruktur di berbagai objek wisata masih belum memadai. Hal ini dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut.

"Pertama, SDM di bidang pariwisata yang terbatas. Kedua, kurang pemahaman dan keterlibatan masyarakat di sekitar objek wisata dalam ikut menjaga dan memelihara objek wisata. Ketiga, infrastruktur menuju objek wisata yang belum memadai (WKD, 2015)".

Kutipan di atas menunjukkan bahwa infrastruktur pariwisata di Kabupaten Bulungan belum memadai. Sampai dengan saat ini, pembangunan objek wisata di Kabupaten Bulungan masih sangat terbatas. Dalam wawancara yang diajukan peneliti pihak swasta menginformasikan

bahwa fasilitas dan infrastruktur pada objek wisata tidak memenuhi harapan dan fungsi bangunan.

Pembangunan infrasturktur untuk mendukung pengembangan objek wisata seharusnya menjadi perhatian oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan. Di dalam pengembangan suatu wilayah, infrastruktur memiliki peran sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial di dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam. Pembangunan infrastruktur merupakan suatu strategi dalam penyediaan sarana dan prasarana. Peran infrastruktur tidak hanya berpengaruh pada pengembangan wilayah, tetapi juga pada bidang kepariwisataan. Infrastruktur berperan sangat penting dalam mendorong kualitas wisata itu sendiri serta pada lingkungan sekitarnya.

C. Pembahasan

Sampai dengan saat ini belum ada program pengembangan sektor pariwisata yang jelas dan terencana yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan objek wisata. Hal ini disebabkan belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sektor pariwisata saat ini di Kabupaten Bulungan. Pada masa yang akan datang, pihak pemerintah melalui Dinas Pariwisata akan menyusun suatu regulasi atau peraturan untuk pengelolaan yang diserahkan ke pihak ketiga secara lebih profesional. Tanpa adanya regulasi yang jelas, pengaturan terhadap pelaksanaan pengelolaan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan tidak dapat berjalan dengan baik.

Sampai dengan saat ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan telah melakukan upaya untuk memasarkan dan mempromosikan objek wisata. Pemasaran ataupun promosi objek wisata pasti dilakukan. Hal ini disebabkan karena pemerintah sudah melakukan promosi objek wisata baik melalui leaflet, brosur, maupun pameran-pameran yang diikuti. Namun demikian, saat ini objek wisata tidak dapat menarik retribusi masuk ke objek wisata, Tidak adanya retribusi ini disebabkan karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang penarikan retribusi tersebut.

Berdasarkan kondisi mengenai pengelolaan objek wisata di Kabupaten Bulungan maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan objek wisata belum berhasil meningkatkan PAD. Kondisi ini terjadi karena belum adanya peraturan untuk menarik retribusi objek wisata tersebut. Namun demikian, pemasaran yang dilakukan sudah cukup baik. Pada dasarnya, objek wisata di Kabupaten Bulungan memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan. Salah satu objek wisata yang memiliki potensi wisata yang uku besar adalah Gunung Putih. Gunung Putih adalah wisata alam gunung kapur yang berwarna putih. mempunyai keindahan yang alami dengan memiliki relief-relief seperti pahatan seorang seniman di gunung kapur. mempunyai panorama alam yang indah dan menakjubkan. Pada objek wisata ini, pengunjung bisa menikmati pemandangan yang menakjubkan dengan memanjat relief-relief itu sampai ke puncak gunung. Pengunjung juga dapat naik dengan anak tangga yang tersedia di sana. Pemandangan alam di puncak

sangat eksotis. Pengelolaan yang baik dan regulasi yang benar terhadap pengelolaan objek wisata ini akan meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan.

Seharusnya Kabupaten Bulungan mampu menjadi daerah tujuan wisata yang sangat bberpotensi. Hal ini disebabkan banyaknya objek wisata pada daerah ini, baik wisata alam dan juga wisata budaya. Daya tarik wisata yang dapat dimanfaatkan untuk meingkatkan kunjungan wisata terutama berkaitan dengan Kabupaten Bulungan yang merupakan daerah kerajaan pertama. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Tawau (Sabah sekarang). Kesultanan Bulungan didirikan pada tahun 1731. Raja pertama adalah Wira Amir yang bergelar Amiril Mukminin (1731–1777), dan Raja yang terakhir atau ke-13 adalah Datuk Tiras yang bergelar Sultan Maulana Muhammad Djalalluddin (1931-1958). Awalnya negeri Bulungan merupakan bekas daerah milik “negara Berau” yang telah memisahkan diri sehingga dalam perjanjian Kesultanan Banjar dengan VOC-Belanda dianggap sebagai bagian dari “negara Berau” (Berau bekas vazal Banjar). Namun kenyataannya sampai tahun 1850, wilayah Bulungan berada di bawah dominasi Kesultanan Sulu. Sejarah ini tentunya memiliki nilai tambah dan daya tarik yang besar bagi pariwisata Kabupaten Bulungan.

Pada dasarnya, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan telah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan pariwisata. Namun demikian, pelaksanaan pengembangan pariwisata tersebut belum dapat dikatakan maksimal. Dalam

pelaksanaannya, pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan belum difokuskan pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat diketahui dari belum adanya program pengembangan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan PAD.

Sebagaimana pada teori yang telah dikemukakan pada Bab II sebelumnya telah dijelaskan bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut.

- e. Hasil pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan lain-lain.
- f. Hasil retribusi daerah, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi terminal, dan lain-lain.
- g. Hasil perusahaan milik daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bank pendapatan daerah, perusahaan air minum, perusahaan daerah percetakan, penyertaan modal pada pihak ketiga, dan lain-lain.
- h. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain penjualan barang milik daerah, jasa, giro, dan lain-lain.

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat 4 sumber PAD. Diantara keempat sumber tersebut, terdapat 2 sumber PAD yang berhubungan secara langsung dengan sektor pariwisata, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Sampai dengan saat ini, kedua sumber tersebut belum memiliki kaitan secara langsung dengan pariwisata Kabupaten Bulungan. Oleh karena itu, untuk masa

yang akan datang perlu ada perencanaan yang lebih matang dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan agar lebih difokuskan pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan sampai dengan saat ini belum memiliki program pengembangan wisata yang rinci. Dalam pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan telah melakukan pemasaran dan promosi terhadap objek wisata. Akan tetapi, belum ada regulasi yang jelas yang mengatur tentang pengelolaan objek wisata kepada pada saat ini di Kabupaten Bulungan. Selain itu, belum ada regulasi yang jelas mengenai retribusi objek wisata sehingga objek wisata belum dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Bulungan. Pemerintah telah melakukan kerjasama dengan masyarakat di sekitar objek wisata. Kerjasama ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan sekitar objek wisata. Langkah ini merupakan upaya pemerintah agar masyarakat menyetujui pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata mengajak masyarakat sekitarnya khususnya dan masyarakat Bulungan umumnya dapat berpartisipasi demi pengembangan dan keamanan obyek wisata. Hal

ini membuat masyarakat merasa senang karena ikut merasa memiliki objek wisata tersebut.

2. Faktor yang mempengaruhi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan terbagi atas faktor pendukung dan juga faktor pengambat. Faktor pendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan antara lain potensi wisata di Kabupaten Bulungan, baik dari segi wisata alam, wisata sejarah, wisata arung jeram, wisata bahari. Adapun faktor yang menjadi kekuatan bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Bulungan adalah koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang kuat, koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan even wisata yang kuat, dan karakteristik objek wisata yang menjanjikan. Faktor penghambat pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan antara lain keterbatasan anggaran dan belum adanya investor yang tertarik untuk membangun pariwisata Kabupaten Bulungan. pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan memiliki kelemahan di beberapa faktor. Faktor tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya keterlibatan masyarakat, dan infrastruktur yang kurang memadai.
3. Kondisi infrastruktur bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan masih belum memadai. Sampai dengan saat ini, belum ada pula fasilitas-fasilitas yang dibangun pada objek wisata. Hal ini disebabkan adanya kendala dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur pariwisata.

Kendala antara lain muncul dari penggunaan dan status lahan yang akan dibangun.

B. Saran

Berikut saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil yang diperoleh melalui penelitian ini.

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, diharapkan dapat menyusun suatu kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan objek wisata. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menetapkan regulasi terkait retribusi objek wisata sehingga potensi wisata yang ada dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Bulungan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan juga diharapkan lebih memperhatikan dan membangun infrastruktur pada objek wisata di Kabupaten Bulungan sehingga meningkatkan minat wisatawan untuk datang dan meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
2. Bagi pihak swasta, diharapkan ikut terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan objek wisata. Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan objek wisata diharapkan pihak swasta mampu melakukan upaya seccara maksimal sehingga program pengembangan pariwisata di Kabpaten Bulungan juga berjalan dengan baik untuk meningkatkan PAD.
3. Bagi masyarakat, diharapkan tetap menjaga partisipasi dalam meingkatkan pengelolaan objek wisata di Kabupaten Bulungan. Masayarkat dapat membantu menciptakan suasana yang nyaman, bersih, dan aman di sekitar

objek wisata. Hal ini perlu dilakukan agar objek wisata menjadi lebih menarik lagi bagi pengunjung.



DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Laporan Hasil Penelitian:

- Andiryani, Yekti. 2009. "Pengelolaan Obyek Wisata Tlatar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali". *Tesis tidak diterbitkan*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Edisi Revisi 2010*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Ariyanto. 2005. *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azis, Iwan J., dkk. 2013. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: KPG.
- Azzahra, Fatimah & Sujali. 2013. "Pengembangan Pariwisata Alam Kawasan Ciwidey di Kabupaten Bandung". *Jurnal Universitas Gadjah Mada*.
- Darsoprayitno, Soewarno. 2012. *Ekologi Pariwisata: Tata Laksana Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata*. Jakarta: Angkasa.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Devas, Nick., et.al. 1999. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Djogo, Tony; Sunaryo; Suharjito, Didik & Sirait, Martua. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Agroforestry*. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Israel, Arturo. 1992. *Pegembangan Kelembagaan: Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia*. Jakarta: LP3ES.
- Karlof, Bengt & Ostblom, Svante; Budi Rahardjo (penerj). 1997. *Benchmarking*. Yogyakarta: Andi.
- Kencana, Inu. 1991. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koswara, E. 2011. *Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Yayasan PARIBA.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

- Mathieson, Alister dan Wall, Geoffrey. 1982. *Tourism: Economic, Physical, and Social Impacts*. London: Longman.
- McIntosh, Robert W. & Goeldner, Charles R. 1996. *Tourism: Principles, Practices, Philosophies*. Columbia: Grid Publishing.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 2009. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Misdianti dan Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyana, D. & Rakhmat, J. 2009. *Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munasef. 2005. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Pamudji, 1996. *Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan dan Perilaku Politik Publik*. Jakarta: Widya Praja.
- Pendit, Nyoman S. 2006. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pitana, I Gede. 2005. *Sosiologi Pariwisata, Kajian Sosiologis terhadap Struktur, Sistem, dan Dampak-dampak Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Rahati, Yosika Setyani. 2009. "Pelaksanaan Strategi Optimalisasi Kinerja Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surakarta". *Tesis tidak diterbitkan*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Republik Indonesia. 2009. "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan". Jakarta.
- Setiawan, Nugroho. 2008. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng, Kota Magelang Jawa Tengah". *Tesis tidak diterbitkan*. Institut Pertanian Bogor.
- Sinclair, M. Thea dan Stabler, Mike. 1997. *Economies of Tourism*. London: Routledge.
- Soemarwoto, O. 2003. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University.

Spillane, James J. 2006. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.

Subagio, Amin. 2005. "Pengembangan Kelembagaan Pangan Masyarakat dalam Pemantapan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah)". *Tesis tidak diterbitkan*. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.

Sugiantoro, Ronny. 2005. *Pariwisata: Antara Obsesi dan Realita*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.

Uphoff, Norman. 1986. *Local Institutional Development An Analytical Sourcebook With Cases*. New York: Kumarian Press Cornell University.

Wahab, Saleh. 1996. *Manajemen Pariwisata*. Jakarta: Pradya Paramita.

Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit: Andi.

www.inilahkoran.com, diakses tanggal 18 Agustus 2015

Yoeti, Oka A. 2008. *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: Kompas.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia. 1999. *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretaris Negara.

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretaris Negara.

Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*. Jakarta: Sekretaris Negara.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretaris Negara.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretaris Negara.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*. Jakarta: Sekretaris Negara.



Lampiran 1-Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA (Kepada Pihak Dinas Pariwisata)

1. Apakah saja upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
2. Apakah pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
3. Bagaimanakah cara pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
4. Apakah pihak pemerintah menetapkan regulasi untuk mengatur pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
5. Regulasi apa saja yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
6. Apakah regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan sudah ditaati dan berjalan dengan baik?
7. Apakah pihak pemerintah melakukan sosialisasi terkait pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
8. Bagaimanakah cara sosialisasi yang ditempuh pemerintah terkait pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
9. Apakah pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
10. Bagaimanakah cara pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
11. Apakah pemasaran yang dilakukan terhadap objek wisata terbilang berhasil dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
12. Bagaimana pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

13. Apa saja program yang dilaksanakan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
14. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
15. Siapa pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
16. Apakah anggaran yang tersedia mencukupi untuk pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Mohon jelaskan alokasi anggaran tersebut.
17. Bagaimana kerjasama antara dinas terkait dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
18. Apa saja faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
19. Apa saja faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Dan bagaimana cara mengatasinya?
20. Apa yang menjadi kekuatan bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
21. Apa yang menjadi kelemahan bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
22. Apa yang menjadi peluang bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
23. Apa yang menjadi hambatan bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?
24. Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
25. Sampai dengan saat ini, bagaimana hasil dari pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

**PEDOMAN WAWANCARA
(Kepada Pihak Masyarakat)**

1. Apakah masyarakat sekitar menyetujui pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
2. Apa yang dilakukan pemerintah agar masyarakat sekitar menyetujui pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
3. Apakah masyarakat merasa tidak terganggu atau justru senang dengan pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
4. Apakah masyarakat berupaya menjaga keamanan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
5. Apakah upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga keamanan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
6. Apakah lingkungan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan tergolong aman?
7. Apakah masyarakat sekitar diberikan kesempatan untuk berperan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
8. Apakah masyarakat ikut mengelola objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
9. Bagaimanakah pengelolaan yang dilakukan masyarakat terhadap objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?
10. Apakah masyarakat merasa senang dengan kesempatan untuk ikut mengelola objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

PEDOMAN WAWANCARA
(Kepada Pihak Swasta)

1. Bagaimanakah proses penunjukan pihak swasta yang menjadi pengelola objek wisata ?
2. Apakah pihak swasta bertanggung jawab mengelola fasilitas pada objek wisata?
3. Apakah wewenang yang dimiliki pihak swasta dalam mengelola fasilitas pada objek wisata?
4. Bagaimanakah cara pihak swasta mengoperasikan fasilitas pada objek wisata?
5. Apakah pihak swasta bertanggung jawab terhadap ketertiban pada objek wisata?
6. Bagaimanakah cara pihak swasta memelihara ketertiban pada objek wisata?
7. Apakah lingkungan pada objek wisata tergolong tertib? Adakah masalah ketertiban yang sering terjadi?
8. Apakah pihak swasta memiliki wewenang untuk membangun fasilitas objek wisata ?
9. Bagaimanakah cara penunjukan pihak swasta yang memiliki wewenang untuk membangun fasilitas objek wisata ?
10. Bagaimanakah fasilitas yang dibangun oleh pihak swasta pada objek wisata?

Lampiran 2-Transkrip Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA (Kepada Pihak Dinas Pariwisata)

Informan: Kadis Pariwisata

1. Apakah saja upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Setiap tahun kita memprogramkan adanya kegiatan penataan di beberapa objek wisata andalam Kabupaten Bulungan. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan adanya perbaikan fasilitas objek wisata sehingga memberikan kenyamanan bagi pengunjungnya.

2. Apakah pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Tentu kita membuat master plan perencanaan, penataan, dan pengembangann objek wisata agar pembangunan dan pengembangan objek wisata dapat terarah, fokus, dan terintegrasi dengan kegiatan sektor lainnya di sekitar lokasi objek wisata.

3. Bagaimanakah cara pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Mensinergikan perencanaan antara pihak eksekutif, legislatif, dalam hal pembiayaan kegiatan, dengan pihak ketiga dalam hal ini para kontraktor. Juga kita jalin komnikasi dan kita tawarkan potensi wisata yang kita miliki dengan harapan investor akan berinvestasi di di bidang pariwisata Kabupaten Bulungan.

4. Apakah pihak pemerintah menetapkan regulasi untuk mengatur pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Belum ada regulasinya karena kita belum melihat geliat wisata di Kabupaten Bulungan. Setelah terbentuknya Kaltara ini dan Kabpaten Bulungan, Tanjung Selor sebagai ibukotanya bisa saja kedepannya Tanjung Selor merupakan jalur pariwisata yang punya potensi kedepan.

5. Regulasi apa saja yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Tidak ada

6. Apakah regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan sudah ditaati dan berjalan dengan baik?

Jawaban:

Tidak ada

7. Apakah pihak pemerintah melakukan sosialisasi terkait pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Tentu, ada setiap tahun ada program dan kegiatan yang dilakukan baik pelaksanaan even-even wisata daerah, promosi wisata daerah ke mancanegara, ke tingkat nasional, dan sosialisasi ke masyarakat di sekitar objek wisata.

8. Bagaimanakah cara sosialisasi yang ditempuh pemerintah terkait pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Melalui pelaksanaan even-even wisata daerah, melakukan pemilihan duta wisata daerah, promosi ke media massa, elektronik, dan brosur-brosur yang ada.

9. Apakah pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Iya, di struktur kita ada satu seksi yang membidangi masalah promosi dan penyuluhan wisata. Seksi inilah yang bekerja melaksanakan tupoksinya untuk melakukan promosi wisata dalam rangka melakukan pemasaran pariwisata baik secara nasional maupun manca negara.

10. Bagaimanakah cara pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

-

11. Apakah pemasaran yang dilakukan terhadap objek wisata terbilang berhasil dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Tentu ada hasilnya, karena dari sisi promosi, objek dan potensi wisata banyak masyarakat yang belum tau akhirnya menjadi tau terhadap potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bulungan.

12. Bagaimana pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Pengembangan objek wisata masih bersifat parsial. Artinya, pengembangan objek wisata tidak fokus pada salah satu objek saja karena belum ada objek wisata yang dikelola secara profesional. Kedepan akan dilakukan secara profesional dengan melibatkan pihak ketiga untuk mengelola objek wisata secara profesional.

13. Apa saja program yang dilaksanakan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Program penataan dan pengembangan objek wisata yang ada di seksi objek dan sarana wisata.

14. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Karena masing-masing objek wisata berbeda karakteristiknya, maka tentu berbeda juga sarana dan prasarana yang dibutuhkan masing-masing objek wisata.

15. Siapa pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata adalah, pertama bupati dan perangkat teknis di eksekutif, kedua ketua DPRD dan perangkat komisi yang menbidangi pariwisata, pihak ketiga yang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek pengembangan objek wisata.

16. Apakah anggaran yang tersedia mencukupi untuk pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Mohon jelaskan alokasi anggaran tersebut.

Jawaban:

Anggaran yang diberikan tentu tidak mencukupi untuk mengembangkan objek wisata karena banyaknya objek wisata yang harus mendapat perhatian untuk diperbaiki dan dibiayai. Inilah yang menjadi tantangan dalam memperbaiki sistem penataan dan pengembangan objek wisata.

17. Bagaimana kerjasama antara dinas terkait dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Sangat baik dan selalu bersinergi dalam melaksanakan kegiatan even-even wisata.

18. Apa saja faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Pertama, niat dan keinginan yang kuat untuk menjadikan Kabupaten Bulungan sebagai daerah tujuan wisata alam, wisata sejarah, wisata arung jeram, wisata bahari oleh *stake holder* yang ada. Kedua, banyaknya objek wisata yang berdekatan satu jalur sehingga sekali kunjungan wisata dapat sampai pada beberapa objek wisata. Ketiga, kondisi objek wisata yang mempunyai daya tarik tersendiri. Keempat, alur kunjungan wisata setelah Pulau Derawan, Kakaban, Sangalaki, Pantai Lat Tanah Kuning dan pusat pemerintahan Propinsi Kaltara.

19. Apa saja faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Dan bagaimana cara mengatasinya?

Jawaban:

Pertama, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pengembangan dan penataan objek wisata. Kedua, banyaknya objek wisata yang harus mendapatkan penataan sementara anggaran terbatas. Ketiga, belum adanya investor yang berminat untuk berinvestasi dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata.

20. Apa yang menjadi kekuatan bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Pertama, koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang kuat. Kedua, koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan even wisata yang kuat. Ketiga, karakteristik objek wisata yang menjanjikan.

21. Apa yang menjadi kelemahan bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Pertama, SDM di bidang pariwisata yang terbatas. Kedua, kurang pemahaman dan keterlibatan masyarakat di sekitar objek wisata dalam ikut menjaga dan memelihara objek wisata. Ketiga, infrastruktur menuju objek wisata yang belum memadai.

22. Apa yang menjadi peluang bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Pertama, topografi Kabupaten Bulungan sebagai jalur wisata setelah dari Derawan, Sangalaki, Maratua Kabupaten Berau. Kedua, Tanjung Selor sebagai ibu kota Kaltara dengan program kota baru yang modern. Ketiga, objek wisatanya yang asri dan terjamin keasliannya.

23. Apa yang menjadi hambatan bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

-

24. Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Pertama, Inspektorat Kabupaten Bulungan jika bentuknya kegiatan SKPD. Kedua, Pengawas proyek dalam pelaksanaan kegiatan. Ketiga, Kepala Kantor dan perangkat SKPD pariwisata yang membidangi. Keempat, masyarakat secara keseluruhan.

25. Sampai dengan saat ini, bagaimana hasil dari pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Cukup baik, tertatanya beberapa objek wisata andalan dalam kota Kabupaten Bulungan sehingga layak untuk dikunjungi walaupun penataannya belum maksimal namun terasa lebih baik dibandingkan sebelum dilakukan penataan di sekitar objek wisata.

Informan: Mijuari (Kasubag Perencanaan dan Keuangan)

1. Apakah saja upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Sampai saat ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulungan bisa memungut retribusi.

2. Apakah pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Pemerintah melakukan perencanaan pengembangan objek wisata tahun 2015 ini, yaitu perencanaan KM 18.

3. Bagaimanakah cara pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Perencanaan pengembangan objek wisata dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bulungan.

4. Apakah pihak pemerintah menetapkan regulasi untuk mengatur pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

-

5. Regulasi apa saja yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

-

6. Apakah regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan sudah ditaati dan berjalan dengan baik?

Jawaban:

-

7. Apakah pihak pemerintah melakukan sosialisasi terkait pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Iya

8. Bagaimanakah cara sosialisasi yang ditempuh pemerintah terkait pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Sosialisasi dilakukan di kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan

9. Apakah pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Iya

10. Bagaimanakah cara pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Dengan mengikuti pameran atau festival di dalam dan luar daerah.

11. Apakah pemasaran yang dilakukan terhadap objek wisata terbilang berhasil dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

-

12. Bagaimana pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Pengembangan objek wisata saat ini masih dalam tahap perencanaan.

13. Apa saja program yang dilaksanakan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

-

14. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

-

15. Siapa pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Pemerintah kabupaten, masyarakat, dan pengusaha.

16. Apakah anggaran yang tersedia mencukupi untuk pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Mohon jelaskan alokasi anggaran tersebut.

Jawaban:

Belum mencukupi

17. Bagaimana kerjasama antara dinas terkait dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Belum terkoordinir dengan baik

18. Apa saja faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Banyaknya objek wisata yang ada di Kabupaten Bulungan

19. Apa saja faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Dan bagaimana cara mengatasinya?

Jawaban:

Masyarakat tidak peduli dan tidak menjaga objek wisata yang ada. Selain itu, belum ada Perda mengenai objek wisata.

20. Apa yang menjadi kekuatan bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bulungan sangat berlimpah dan even budaya di Kabupaten Bulungan juga banyak.

21. Apa yang menjadi kelemahan bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Belum terfokusnya pengembangan objek wisata.

22. Apa yang menjadi peluang bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Sumber daya alam, lalu Kabupaten Bulungan yang menjadi Ibu Kota Propinsi Kalimantan Utara.

23. Apa yang menjadi hambatan bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

-

24. Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dan masyarakat.

25. Sampai dengan saat ini, bagaimana hasil dari pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Sampai saat ini dalam tahap perencanaan *DED (detailed engineering design)* KM 18 yang fokus dilaksanakan pada tahun ini.

Informan: Maria **Erviana**, SS (Kabid Kepariwisataa)

1. Apakah saja upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Melalui pembenahan objek wisata yang berpotensi mendatangkan kunjungan wisatawan nusantara maupun manca negara.

2. Apakah pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Ya, tentu saja tahun 2014 telah dibuat *master plan* air terjun KM 18 dan di tahun 2015 melaksanakan pembuatan *DED*, di tahun 2016 direncanakan penganggunan fisik dengan sarana yang terintegrasi.

3. Bagaimanakah cara pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Caranya dengan melakukan studi kelayakan objek wisata yang berpotensi dan melakukan studi banding di Kota Jogja.

4. Apakah pihak pemerintah menetapkan regulasi untuk mengatur pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Melalui Bappeda telah membuat regulasi berupa rencana induk pembangunan pariwisata daerah (Riparda) yang berlaku tahun 2015 sampai 2030.

5. Regulasi apa saja yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Masih dalam rancangan.

6. Apakah regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan sudah ditaati dan berjalan dengan baik?

Jawaban:

Regulasi melalui Perda Nomor 07 Tahun 2014 tentang TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), terdapat 13 usaha pariwisata antara lain ijin usaha kawasan pariwisata dan ijin usaha daya tarik wisata.

7. Apakah pihak pemerintah melakukan sosialisasi terkait pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Iya, melalui peran serta Pokdarwis untuk penyuluhan tentang sapta pesona dan sosialisasi TDUP maupun peran serta duta wisata Kabupaten Bulungan.

8. Bagaimanakah cara sosialisasi yang ditempuh pemerintah terkait pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Tatap muka, diskusi, penyuluhan intensif dengan pemilik usaha pariwisata maupun pengelolaan objek.

9. Apakah pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Iya, melalui pameran di dala daerah maupun luar daerah, jakarta, Jogja, Bali, Batam.

10. Bagaimanakah cara pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

-

11. Apakah pemasaran yang dilakukan terhadap objek wisata terbilang berhasil dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Promosi atau pemasaran sudah cukup maksimal namun perlu pembenahan terhadap PAD terutama terkait dengan regulasi.

12. Bagaimana pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

-

13. Apa saja program yang dilaksanakan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Program pengembangan destinasi pariwisata dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata melalui pembenahan objek wisata Gunung Putih dan Objek Wisata Pantai Tanah Kuning Tahun 2013 dan di tahun 2014 pembenahan makam bersejarah, pembuatan DED.

14. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Tempat parkir yang cukup luas, toilet cukup bersih, tersedia pos penjagaan dengan portal serta sarana ibadah di objek wisata.

15. Siapa pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Pemerintah daerah, pihak swasta, peran serta masyarakat melalui Pokdarwis.

16. Apakah anggaran yang tersedia mencukupi untuk pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Mohon jelaskan alokasi anggaran tersebut.

Jawaban:

Anggaran yang tersedia tidak mencukupi dalam membangun yang terintegrasi dibutuhkan dana yang maksimal sehingga objek wisata tersebut dapat menjadi ikon untuk meningkatkan PAD.

17. Bagaimana kerjasama antara dinas terkait dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Suatu objek wisata yang akan dibangun atau dikembangkan tidak dapat dikelola sendiri oleh Dinas Pariwisata, diperlukan kerjasama dengan dinas lain, seperti PU untuk dalam masuk objek wisata, BLH untuk studi kelayakan lingkungan, dan Bappeda untuk perencanaannya.

18. Apa saja faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Adanya Pokdarwis di masing-masing kecamatan dengan melalui penyuluhan Sapta Pesona.

19. Apa saja faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Dan bagaimana cara mengatasinya?

Jawaban:

Faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat ikut berperan serta dalam mensukseskan pengembangan objek wisata. Contohnya, tersedia Sapta Pesona di lokasi objek namun masyarakat membuang sampah sembarangan.

20. Apa yang menjadi kekuatan bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Keragaman objek wisata, contohnya objek wisata alam, budaya, sejarah.

21. Apa yang menjadi kelemahan bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Minimnya dana yang tersedia di dalam pengembangan objek wisata.

22. Apa yang menjadi peluang bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Peluangnya telah menjadi Ibu Kota Kaltara yang memungkinkan masyarakat luas mengenal Kaltara maupun objek wisatanya.

23. Apa yang menjadi hambatan bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

-

24. Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Pemerintah daerah serta Pokdarwis merupakan mitra pemerintah,

25. Sampai dengan saat ini, bagaimana hasil dari pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Objek wisata Kabupaten Bulungan telah cukup dikenal oleh masyarakat lokal maupun masyarakat luar.

Informan: Ary Refaldi, S.IP (Kasi Promosi Pariwisata)

1. Apakah saja upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Tahun 2013 pengembangan obwis makam keramat Magribi dan Datu adil, Gunung Putih, Pantai Tanah Kuning, Batu Tumpuk, tahun 2014 tidak ada. Promosi pariwisata dilakukan melalui pameran, *leaflet*, *website*, *blogger*.

2. Apakah pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Ya, melalui konsultan perencanaan.

3. Bagaimanakah cara pihak pemerintah melakukan perencanaan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Suvey lokasi dengan kontraktor perencanaan.

4. Apakah pihak pemerintah menetapkan regulasi untuk mengatur pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Belum tercover penarikan retribusi.

5. Regulasi apa saja yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Perda Nomor 8 Tahun 2011

6. Apakah regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan sudah ditaati dan berjalan dengan baik?

Jawaban:

Regulasi belum ada sehingga tidak dapat dikata berjalan maupun ditaati.

7. Apakah pihak pemerintah melakukan sosialisasi terkait pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Ada, pengembangan SDM elalui pembentukan kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), sosialisasi Perda TDUP Nomor 7 Tahun 2014 di 3 kecamatan.

8. Bagaimanakah cara sosialisasi yang ditempuh pemerintah terkait pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Sosialisasi pembentukan Pokdarwis dilakukan di 10 kecamatan dan sosialisasi TDUP di 3 kecamatan.

9. Apakah pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Iya, melalui pameran, leaflet, website, blogger.

10. Bagaimanakah cara pihak pemerintah melakukan pemasaran terhadap objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

-

11. Apakah pemasaran yang dilakukan terhadap objek wisata terbilang berhasil dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Berhasil

12. Bagaimana pelaksanaan pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Membenahi objek wisata sehingga layak untuk dikunjungi. Gunung Putih di Palas, Tanah Kuning di Timur, Batu Tumpuk di Utara pad atahun 2013.

13. Apa saja program yang dilaksanakan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Pengembangan destinasi pariwisata, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Tahun 2015, makam keramat dan Datu Adil Desa Salimbatu.

14. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Sarana bermain anak, sarana tempat ibadah, pendopo, dan toilet.

15. Siapa pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Bappeda, Pokdarwis, DPU.

16. Apakah anggaran yang tersedia mencukupi untuk pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Mohon jelaskan alokasi anggaran tersebut.

Jawaban:

Tidak mencukupi, makam keramat menghabiskan dana 98 juta hanya merehap kayu-kayu rusak, seharusnya makam dapat direhab total dengan biaya kurang lebih 350 juta. KM 18 merupakan program yang diprioritaskan dari anggarannya sekitar 80 milyar. Pada tahun 2014, Bappeda telah membuat *master plan* Air terjun KM 18 dan tahun 2014 pariwisata membuat DED pelaksanaan pada tahun 2015.

17. Bagaimana kerjasama antara dinas terkait dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Sangat bagus dan saling mendukung, contohnya dalam pengembangan KM 18.

18. Apa saja faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Faktor pendukung dari masyarakat, SKPD terkait, swasta, dan terutama Dana Alokasi Pengembangan.

19. Apa saja faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan? Dan bagaimana cara mengatasinya?

Jawaban:

Masalah lahan, dana alokasi, dan masyarakat setempat.

20. Apa yang menjadi kekuatan bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Keindahan objek wisata tersebut, keanekaragaman objek wisata yang dimiliki, dan SDM pada dinas terkait.

21. Apa yang menjadi kelemahan bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Tidak semua masyarakat mempunyai pemikiran untuk memajukan kepariwisataan, mereka masih memikirkan keuntungan atau profit. Letak geografis obwis tersebut maupun Kabupaten Bulungan tersebut.

22. Apa yang menjadi peluang bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Objek wisata masih alami untuk dikembangkan. Keanekaragaman budaya lokal dan keanekaragaman suku.

23. Apa yang menjadi hambatan bagi upaya pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

-

24. Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Pokdarwis, SKPD mengangkat tenaga kebersihan dan duta wisata sebagai partner pemerintah dalam mempromosikan obwis.

25. Sampai dengan saat ini, bagaimana hasil dari pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

SKPD terkait telah melakukan berbagai macam pembenahan, pemugaran, tetapi meningkatkan PAD secara langsung masih belum terasa, tetapi melalui mitra pariwisata seperti hotel dan rumah makan sudah memberikan sumbangsih ke PAD.

PEDOMAN WAWANCARA (Kepada Pihak Masyarakat)

Informan: Masyarakat 1

26. Apakah masyarakat sekitar menyetujui pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Setuju, asalkan dalam pengembangan pariwisata dengan pemanfaatan lahan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dengan artikata, penggantian lahan masyarakat juga sesuai bila pengembangan dilakukan pada lahan yang dimiliki oleh masyarakat.

27. Apa yang dilakukan pemerintah agar masyarakat sekitar menyetujui pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Pertama, sosialisasi program pengembangan wisata kepada masyarakat. Kedua, penggantian bagi lahan masyarakat yang menjadi tempat wisata yang sesuai. Ketiga, memberdayakan masyarakat setempat berperan aktif dalam mensukseskan pengembangan wisata di daerahnya.

28. Apakah masyarakat merasa tidak terganggu atau justru senang dengan pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Masyarakat mendukung selagi program bermanfaat juga bagi masyarakat sekitar.

29. Apakah masyarakat berupaya menjaga keamanan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Tentu

30. Apakah upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga keamanan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Upaya ikut menjaga dan melestarikan.

31. Apakah lingkungan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan tergolong aman?

Jawaban:

Sejauh ini masih aman, namun perlu peningkatan lebih serius karena berbagai objek wisata tidak ditemukan pengelola atau personil yang secara kontinyu dan terorganisir dalam mempertanggungjawabkan tempat-tempat wisata.

32. Apakah masyarakat sekitar diberikan kesempatan untuk berperan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Iya, dalam beberapa hal seperti kegiatan baik, yang tahunan maupun kegiatan-kegiatan lain masyarakat telah dilibatkan sebagai pelaksana aktif kegiatan-kegiatan budaya objek-objek wisata.

33. Apakah masyarakat ikut mengelola objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Belum, sampai saat ini objek wisata di Kabupaten Bulungan tidak pernah sepenuhnya dikelola oleh masyarakat langsung, tetapi bekerjasama atau diorganisir di bawah dinas.

34. Bagaimanakah pengelolaan yang dilakukan masyarakat terhadap objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

-

35. Apakah masyarakat merasa senang dengan kesempatan untuk ikut mengelola objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Iya, tentu senang

Informan: Masyarakat 2 (Samsir, Pengelola Objek Wisata Gunung Putih)

1. Apakah masyarakat sekitar menyetujui pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Sangat setuju untuk dimanfaatkannya lahan sebagai pengembangan objek wisata.

2. Apa yang dilakukan pemerintah agar masyarakat sekitar menyetujui pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Pemberian kompensasi lahan dan pembinaan keterampilan masyarakat.

3. Apakah masyarakat merasa tidak terganggu atau justru senang dengan pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Masyarakat merasa senang.

4. Apakah masyarakat berupaya menjaga keamanan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Ya, turut membantu menjaga keamanan.

5. Apakah upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga keamanan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Menjaga sarana pendukung objek wisata agar tidak rusak dan hilang.

6. Apakah lingkungan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan tergolong aman?

Jawaban:

Ya, tergolong aman.

7. Apakah masyarakat sekitar diberikan kesempatan untuk berperan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Mendapat kesempatan

8. Apakah masyarakat ikut mengelola objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Ya, masyarakat juga ikut mengelola objek wisata.

9. Bagaimanakah pengelolaan yang dilakukan masyarakat terhadap objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Selama ini, pengelolaan oleh masyarakat kurang maksimal karena kurangnya anggaran operasional.

10. Apakah masyarakat merasa senang dengan kesempatan untuk ikut mengelola objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Senang sekali bila diberi kesempatan

Informan: Masyarakat 3 (Sutrisno, Tokoh Masyarakat, Kades Gunung Putih)

1. Apakah masyarakat sekitar menyetujui pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Pada prinsipnya, masyarakat setuju dengan adanya upaya pengembangan objek wisata di Kabupaten Bulungan, karena antara lain dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Apa yang dilakukan pemerintah agar masyarakat sekitar menyetujui pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Jelas peruntukannya, jelas anggaran, jelas tujuannya serta bersifat berkelanjutan, artinya pengembangan objek wisata terus menerus dikembangkan.

3. Apakah masyarakat merasa tidak terganggu atau justru senang dengan pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Masyarakat secara umum tidak merasa terganggu dengan adanya pengembangan objek wisata, justru masyarakat berharap objek-objek wisata dapat digali lagi lebih banyak karena masyarakat sangat membutuhkan objek wisata sebagai sarana berlibur yang baik.

4. Apakah masyarakat berupaya menjaga keamanan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Masyarakat akan turut serta menjaga keamanan di sekitar objek wisata jika memang itu diperlukan, namun kami berharap agar di dalam perencanaannya nanti juga pemerintah berpikir sampai dengan tingkat peran serta masyarakat.

5. Apakah upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga keamanan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Bentuk peran serta masyarakat di dalam menjaga keamanan adalah bila pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki objek wisata.

6. Apakah lingkungan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan tergolong aman?

Jawaban:

Kegiatan pembangunan haruslah berwawasan lingkungan. Artinya objek-objek wisata yang dibangun harus memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang ada dan melestarikannya.

7. Apakah masyarakat sekitar diberikan kesempatan untuk berperan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Harus, masyarakat di sekitar harus diberikan kesempatan untuk berperan sehingga pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik.

8. Apakah masyarakat ikut mengelola objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Di dalam pengelolaan objek wisata haruslah dikelola oleh orang-orang yang berpengalaman tentunya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

9. Bagaimanakah pengelolaan yang dilakukan masyarakat terhadap objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Masyarakat sebatas berperan serta harus didukung oleh perencanaan dan anggaran yang baik dari pemerintah. Masyarakat siap berpartisipasi jika memang semuanya terarah dengan baik.

10. Apakah masyarakat merasa senang dengan kesempatan untuk ikut mengelola objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Dengan adanya kesempatan atau peluang usaha, tentu masyarakat dengan meningkatkan ekonominya dengan berusaha di sekitar lokasi wisata dengan tetap menjaga dan melestarikan lingkungan dan sosial budaya masyarakat sekitar.

Informan: Masyarakat 3 (Mualim S.Sos.)

1. Apakah masyarakat sekitar menyetujui pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Saya pikir masyarakat akan setuju ketika itu diberikan ganti rugi yang sesuai dengan nilai sebanding harga tanah sekarang (bukan NJOP)

2. Apa yang dilakukan pemerintah agar masyarakat sekitar menyetujui pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membuktikan sejak dini bahwa objek wisata tersebut dirasa memberikan manfaat sekitar, kemudian pengelolaan yang sungguh-sungguh.

3. Apakah masyarakat merasa tidak terganggu atau justru senang dengan pemanfaatan lahan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Ketika pengelolaanya tidak sungguh-sungguh, justru bukan saja merasa terganggu, tetapi akan menimbulkan masalah sosial baru.

4. Apakah masyarakat berupaya menjaga keamanan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Kalau zaman sekarang ini, jangankan menjaga sepertinya sulit, terkadang, kadang oknum justru mencari kesempatan pada objek tersebut, tetapi bila dari berbagai elemen pemerintah bersama-sama tentu masyarakat akan melihat, yang akhirnya mendukung.

5. Apakah upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga keamanan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Sementara, upaya masyarakat tidak ada. Justru merusak apa yang ada, tetapi jika disitu pengelolaannya lengkap, yang akhirnya berdampak kepada masyarakat langsung, tentu masyarakat akan merasa memiliki.

6. Apakah lingkungan di sekitar objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan tergolong aman?

Jawaban:

Sementara tidak aman, jika pengeolaannya masih begitu-begitu saja.

7. Apakah masyarakat sekitar diberikan kesempatan untuk berperan dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Menurut saya perlu diberikan, umpamanya tanahnya sudah diganti untung, kalau mereka bisa eksis, kan ini keberhasilan untuk meningkatkan ekonomi.

8. Apakah masyarakat ikut mengelola objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Kalau ikut mengelola tentu tidak, tetapi kalau bisa menyerap tenaga kerja ssekitar (lokal) kenapa tidak?

9. Bagaimanakah pengelolaan yang dilakukan masyarakat terhadap objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Dalam bentuk sebagai karyawan tetap, sesuai *skill* yang dimiliki.

10. Apakah masyarakat merasa senang dengan kesempatan untuk ikut mengelola objek wisata sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

Ketika masyarakat dirasa memberikan nilai tambah ekonomi buat masyarakat tidak perlu ditanya dengan sendirinya. SMS dan lain-lain tersampaikan ucapan terimakasih.

PEDOMAN WAWANCARA (Kepada Pihak Swasta)

Informan: Swasta 1 (Samsir, Pengelola Gunung Putih)

36. Bagaimanakah proses penunjukan pihak swasta yang menjadi pengelola objek wisata ?

Jawaban:

Dibentuknya badan pengelola objek wisata oleh sekelompok kecil masyarakat atau swasta yang disetujui oleh pemerintah kecamatan.

37. Apakah pihak swasta bertanggung jawab mengelola fasilitas pada objek wisata?

Jawaban:

Kadang-kadang

38. Apakah wewenang yang dimiliki pihak swasta dalam mengelola fasilitas pada objek wisata?

Jawaban:

Mengamankan, mengelola, dan melestarikan, serta mempromosikan keunggulan objek wisata tersebut.

39. Bagaimanakah cara pihak swasta mengoperasikan fasilitas pada objek wisata?

Jawaban:

Berdasarkan pengalaman dan keahlian.

40. Apakah pihak swasta bertanggung jawab terhadap ketertiban pada objek wisata?

Jawaban:

Ya, bertanggung jawab

41. Bagaimanakah cara pihak swasta memelihara ketertiban pada objek wisata?

Jawaban:

Berkomunikasi dengan berbagai pihak.

42. Apakah lingkungan pada objek wisata tergolong tertib? Adakah masalah ketertiban yang sering terjadi?

Jawaban:

Kadang-kadang

43. Apakah pihak swasta memiliki wewenang untuk membangun fasilitas objek wisata ?

Jawaban:

Mendapat kewenangan, namun terbatas.

44. Bagaimanakah cara penunjukan pihak swasta yang memiliki wewenang untuk membangun fasilitas objek wisata ?

Jawaban:

Melalui lelang proyek dan sejenisnya.

45. Bagaimanakah fasilitas yang dibangun oleh pihak swasta pada objek wisata?

Jawaban:

Terkadang tidak memenuhi harapan dan fungsi bangunan.

Informan: Swasta 2

1. Bagaimanakah proses penunjukan pihak swasta yang menjadi pengelola objek wisata ?

Jawaban:

Penunjukan melalui proses lelang pengadaan barang dan jasa melalui Dinas Pariwisata. Bekerja sesuai kontrak di tahun anggaran yang sesuai tapi tidak mengelola, kegiatan peningkatan sarana saja.

2. Apakah pihak swasta bertanggung jawab mengelola fasilitas pada objek wisata?

Jawaban:

Iya, tentu bertanggungjawab

3. Apakah wewenang yang dimiliki pihak swasta dalam mengelola fasilitas pada objek wisata?

Jawaban:

Tidak ada kewenangan dalam pengelolaan.

4. Bagaimanakah cara pihak swasta mengoperasikan fasilitas pada objek wisata?

Jawaban:

Tidak ada pihak swasta yang mengelola dan mebgoperasikan fasilitas pada objek wisata.

5. Apakah pihak swasta bertanggung jawab terhadap ketertiban pada objek wisata?

Jawaban:

Iya, apabila dalam masa kontrak atau masa kegiatan berlangsung sesuai kontrak.

6. Bagaimanakah cara pihak swasta memelihara ketertiban pada objek wisata?

Jawaban:

Memastikan keamanan dan kelancaran distribusi bahan dan kenyamanan pengunjung di masa kegiatan berlangsung.

7. Apakah lingkungan pada objek wisata tergolong tertib? Adakah masalah ketertiban yang sering terjadi?

Jawaban:

Sebenarnya, di beberapa tempat lingkungan wisata tidak tertib karena pengeolaan tidak ditangani serius.

8. Apakah pihak swasta memiliki wewenang untuk membangun fasilitas objek wisata ?

Jawaban:

Iya, seharusnya swasta memiliki kewenangan.

9. Bagaimanakah cara penunjukan pihak swasta yang memiliki wewenang untuk membangun fasilitas objek wisata ?

Jawaban:

-

10. Bagaimanakah fasilitas yang dibangun oleh pihak swasta pada objek wisata?

Jawaban:

-



Lampiran 3-Profil Kabupaten Bulungan

GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik

2.1.1. Geografis

Kabupaten Bulungan sebagai salah satu kabupaten di bagian utara Propinsi Kalimantan Timur mempunyai luas 18.010,50 km² terletak antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur maka Luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi luas daratan 14.193,170 Km² dan luas perairan 2.391,130 Km².

Adapun batas-batas Kabupaten Bulungan; Sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Tidung, Sebelah Timur Laut Sulawesi dan Kota Tarakan, Sebelah Selatan Kabupaten Berau dan Sebelah Barat dengan Kabupaten Malinau.

Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam.

Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul di Kecamatan Bunyu (38.737,413 ha) dan sungai yang terpanjang adalah Sungai Kayan (576 km: termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung) sedangkan gunung yang tertinggi adalah Gunung Kundas yang berada di Kecamatan Peso dengan ketinggian 1.670 m.

Tabel 2.1

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bulungan

Nama DAS	Luas (Ha)	Debit(M3/Dtk)
DAS KAYAN	1.129.717	1.937,57
DAS SEKATAK	198.212	371,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan

2.1.2 Administrasi

Kabupaten Bulungan terbagi atas 10 kecamatan, dengan, kecamatan terluas yaitu Kecamatan Peso dengan luas 3.142,79 Km² atau 23,84 % dari luas Kabupaten Bulungan secara keseluruhan. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Bunyu dengan luas 198,32 Km² atau sekitar 1,50 % dari luas Kabupaten Bulungan. Dilihat dari jumlah desa /kelurahan yang ada, Kecamatan Sekatak memiliki jumlah desa terbanyak yaitu sebanyak 22 Desa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Bunyu dan Tanjung Palas Tengah sebanyak 2 Desa.

Posisi Kabupaten Bulungan berbatasan langsung 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Berau, serta secara administrasi wilayahnya berbatasan dengan :

Batas Wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tana Tidung
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi dan Kota Tarakan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Berau

- Sebelah Barat : Kabupaten Tana Tidung

Tabel 2.2

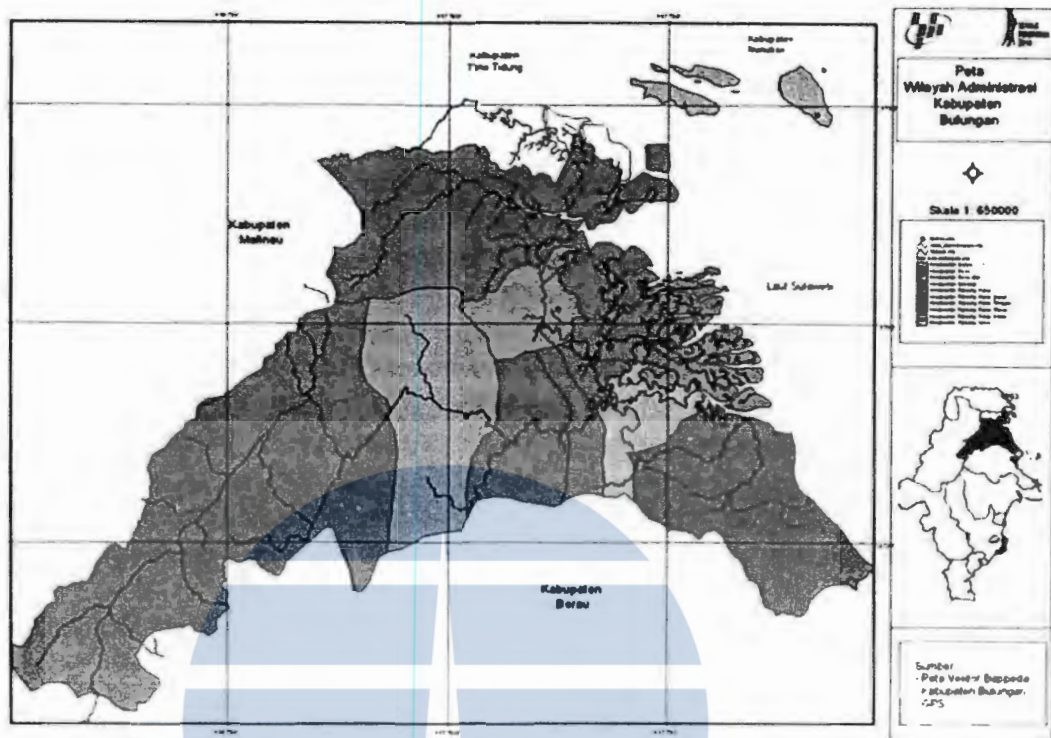
Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah	Luas	
		Kelurahan/ Desa	Km2	(%) thd Total
1	Peso	10	3142,79	22,22
2	Peso Hilir	6	1639,71	11,59
3	Tg. Palas	9	1755,74	12,41
4	Tg. Palas Barat	5	1064,51	7,53
5	Tg. Palas Utara	6	806,34	5,70
6	Tg. Palas Timur	8	1639,02	11,59
7	Tanjung Selor	9	1277,81	9,03
8	Tg. Palas Tengah	3	624,95	4,42
9	Sekatak	22	1993,98	14,10
10	Bunyu	3	198,32	1,40
Jumlah		81	14.193,17	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Bulungan dan cakupan Wilayah

Kajian



2.1.3 Kondisi Fisik

Berdasarkan data iklim yang disajikan berasal dari Stasiun Meteorologi Tanjung Selor. Pada umumnya suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Tanjung Selor pada tahun 2010 Kabupaten Bulungan pada umumnya, dan Tanjung Selor pada khususnya mengalami musim hujan sepanjang tahun. Iklim 16 Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2011 dengan curah hujan 2.729,4 mm/tahun atau 21 hari hujan/bulan. Untuk penyinaran matahari rata-rata 49 persen/bulan.

Secara umum Kabupaten Bulungan beriklim sedang, dengan rata rata suhu udara sepanjang tahun 2010 berkisar antara 21,4 OC – 36 OC . Sedangkan curah hujan selama tahun 2010 di Kabupaten Bulungan pada umumnya dan Tanjung Selor pada khususnya berkisar antara 67.8 sampai dengan 395 mm/bulan. Kelembaban udara Kabupaten

Bulungan tercatat relatif tinggi berkisar antara 83 persen sampai dengan 87 persen dengan rata-rata selama tahun 2010 adalah 86 persen

2.2 Demografi

Tahun 2010 penduduk Kabupaten Bulungan berjumlah 112.660 jiwa. Pola persebaran penduduk kabupaten Bulungan per kecamatan berdasarkan luas wilayah, kepdatannya adalah berkisar antara 1,38 jiwa/km² (kecamatan Peso) sampai 56,17 jiwa/km² (kec. Bunyu). kepadatan penduduk Kabupaten Bulungan 8,55 jiwa /km². kecamatan yang kepadatan penduduknya dibawah rata-rata adalah Kecamatan Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, dan Sekatak. Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, ini terlihat dari rasio jenis kelamin. rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bulungan adalah 115,06; ini berarti bahwa setiap 100 orang berbanding sekitar 115 laki-laki.

Tabel 2.3

Jumlah Dan Kepadatan penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk					Jumlah KK				
	Tahun					Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Peso	4.327	4.443	4.563	4.686	4.812	1.014	1.110	1.140	1.171	1.202
Peso Hilir	3.484	3.578	3.674	3.773	3.874	790	894	918	943	968

Tg. Palas	14. 029	14.406	14.794	15.192	15.601	3. 241	3.601	3.698	3.797	3.900
Tg. Palas Barat	5. 832	5.989	6.150	6.315	6.485	1. 332	1.497	1.537	1.578	1.621
Tg. Palas Utara	8. 954	9.195	9.442	9.696	9.957	2. 342	2.298	2.360	2.424	2.489
Tg.Palas Timur	8. 651	8.884	9.123	9.368	9.620	2. 086	2.22.	2.280	2.342	2.405
Tanjung Selor	3.943	4.049	4.158	4.270	4.385	9. 271	1.012	1.039	1.067	1.096
Tg.Palas Tengah	7. 527	7.729	7.937	8.151	8.370	1. 867	1.932	1.984	2.037	2.092
Sekatak	9. 278	9.528	9.784	10.047	10.317	2. 163	2.381	2.445	2.511	2.579
Bunyu	11. 139	11.439	11.746	12.062	12.387	2. 782	2.859	2.936	3.015	3.096

2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 2. 4: Ringkasan realisasi APBD 5 tahun terakhir (Rp)

N o	Anggaran	2007	2008	2009	2010	2011
(a)	(b)	(c)	(c)	(d)	(e)	(f)
A	Pendapata n					
1	Pendapatan					52.158.566.472

	Asli Daerah (PAD)	35.525.162.562	33.253.723.994	37.988.147.589	40.000.000.000	
2	Dana Perimbangan (Transfer)	512.745.148.000	584.353.255.000	587.792.205.000	478.764.288.000	714.001.960.761
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	149.589.599.770	186.713.800.000	196.060.433.000	81.587.000.000	141.420.708.185
	Jumlah Pendapatan	697.859.910.332	804.320.778.994	821.840.785.589	600.351.288.000	907.581.235.418
B	Belanja					
1	Belanja Tidak Langsung	1.234.174.222.028	290.504.989.882	355.512.721.844	404.552.243.788	599.638.215.722
2	Belanja Langsung	1.016.993.185.027	1.163.566.001.228	1.284.197.786.592	845.447.756.211	1.040.978.191.054
	Jumlah Belanja	1.234.174.222.028	1.454.070.991.170	1.639.710.508.436	1.250.000.000.000	1.040.978.191
	Surplus/Defisit Anggaran	536.314.311.696	649.750.212.176	817.869.722.847	649.648.712.000	733.035.171.358

Tabel 2.5

Rekapitulasi Realisasi anggaran sanitasi dan belanja modal Sanitasi

untuk periode 5 tahun (x Rp.1.000)

No	SKPD	2007	2008	2009	2010	2011
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
A	Pembelanjaan					
1	DPU Sarana Lingkungan	4.757.948	3.321.400	3.001.153	1.705.455	9.687.489
2	DKPP & PMK	969.897	4.975.944	5.103.585	5.246.274	6.027.317
3	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	21.173
4	Bapedalda	-	1.642.711	23.050	-	-
5	RSUD	-	-	-	-	1.264.374
6	Total Belanja Modal Sanitasi (1 s/d 7)	5.727.845	9.940.055	8.127.788	6.951.729	17.000.353
7	Jumlah Belanja Total (dalam APBD)	1.234.174.222	1.454.070.991	1.639.710.508	1.250.000.000	1.040.978.191
8	Proporsi Belanja Modal Sanitasi terhadap Belanja Total (6:7x100%)	0.46	0.68	0.49	0.55	1.63

Tabel 2.6 Data Peta Perekonomian Kabupaten/Kota untk periode 5 Tahun

No	Deskripsi	2006	2007	2008	2009	2010
----	-----------	------	------	------	------	------

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
A	Pendapatan					
1	PDRB harga Konstan (struktur perekonomian (Rp.) (juta)	887.734	939.983	992.969	1.039.197	1.097.723
2	Pendapatan perkapita kabupaten (Rp.)	17.432.453	19.161.121	20.508.288	21.131.984	22.614.594
3	Upah Minimum Regional (Rp.)	844.000	878.675	906.445	964.367	1.022.324
4	Inflasi (%)	0,34	0,53	0,48	0,46	0,58
5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,83	5,89	5,64	4,64	5,63

2.4 Tata Ruang Wilayah

2.4.1 Maksud dan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan

Pada dasarnya maksud dari Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan adalah menata dan mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bulungan dalam upaya merealisasikan pengelolaan potensi sumber daya yang ada dalam menunjang kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan yaitu : mewujudkan peningkatan derajat dan mutu kehidupan masyarakat melalui pembangunan wilayah agroindustri dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan.

2.4.2 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan

Dalam rangka pencapaian sasaran, indikator sasaran sebagaimana dikemukakan di atas, perlu ditetapkan terlebih dahulu arah pengembangan ekonomi wilayah di masa depan. Arah pengembangan tersebut akan sangat menentukan

keberhasilan pencapaian, terutama sasaran yang terkait dengan tujuan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Arah pengembangan ekonomi Kabupaten Bulungan didasarkan pada potensi dan masalah pengembangan kawasan. Secara garis besar, alternatif arah pengembangan ekonomi Kabupaten Bulungan tahun 2010/ 2011 hingga tahun 2030/ 2031 diuraikan dalam Visi dan misi pembangunan Kabupaten Bulungan, Karakteristik wilayah Kabupaten Bulungan, Issu strategis, dan permasalahan aktual setempat untuk menentukan strateginya

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bulungan meliputi :

- (1) pengembangan bidang agroindustri sebagai basis utama ekonomi Daerah;
- (2) peningkatan dan pemerataan pembangunan ketersediaan prasarana dan sarana transportasi secara terpadu;
- (3) perluasan areal lahan pertanian;
- (4) peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan lahan serta upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan;
- (5) pengembangan agribisnis peternakan berbasis sumberdaya lokal;
- (6) pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan lebih optimal dan lestari.
- (7) peningkatan kualitas pengelolaan Sumberdaya Alam secara efisien dan ramah lingkungan serta pengurangan ketergantungan pada energi fosil untuk jangka panjang;
- (8) perwujudan keterkaitan antar kepariwisataan daerah terhadap potensi daerah lain yang memiliki keunggulan wisata bertaraf nasional dan internasional; dan
- (9) pengutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada seluruh bidang pembangunan; dan
- (10) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

2.4.3 Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Strategi pembangunan wilayah Kabupaten Bulungan dibangun untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Kabupaten Bulungan untuk 20 tahun kedepan. Strategi pembangunan wilayah kabupaten Bulungan diusahakan dengan memperhatikan potensi, kondisi daerah, aspirasi masyarakat dan penjabaran dari Propeda Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Ada 10 strategi penataan ruang yaitu:

- (1) Strategi penataan ruang pengembangan bidang agroindustri sebagai basis utama ekonomi daerah meliputi:
 - a. membangun industri hilir perkebunan yang berkualitas ekspor dan akses pemasaran yang luas;
 - b. mengembangkan kawasan industri yang mempunyai akses terhadap kawasan sentra produksi dan potensial lainnya;
 - c. membangun sentra-sentra industri perkebunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah di sekitarnya; dan
 - d. menyempurnakan regulasi dan peningkatan pelayanan investasi bidang perkebunan.
- (2) Strategi penataan ruang peningkatan dan pemerataan pembangunan ketersediaan prasarana dan sarana transportasi secara terpadu meliputi :

- a. meningkatkan ketersediaan jaringan jalan yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan seluruh wilayah kecamatan;
 - b. meningkatkan dan membangun jalan yang memberikan akses pada kawasan strategis dan kawasan sentra produksi;
 - c. meningkatkan sarana transportasi laut dan sungai bagi wilayah yang tidak mempunyai akses hubungan darat antar wilayah;
 - d. membangun terminal, pelabuhan, bandar udara, dan jalur kereta api pendukung pada kawasan strategis dan sentra-sentra produksi.
 - e. meningkatkan kapasitas serta sarana dan prasarana pelabuhan udara guna mendukung kelancaran arus lalu lintas orang, barang dan jasa di kota Tanjung Selor;
 - f. membangun pelabuhan laut sebagai pendukung pergerakan perdagangan;
- (3) Strategi penataan ruang perluasan areal lahan pertanian meliputi;
- a. meningkatkan produktivitas dan luas tanam melalui perluasan lahan pertanian masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan petani;
 - b. membangun kawasan agropolitan pada wilayah pertanian potensial yang mempunyai akses keterkaitan antar wilayah dan berorientasi pasar;
 - c. mendiversifikasi produk-produk pertanian unggulan daerah yang berdaya saing melalui pengembangan teknologi tepat guna;
 - d. membangun, meningkatkan dan memelihara jaringan irigasi guna mendukung rencana perluasan areal pertanian; dan
 - e. membangun jaringan tata air daerah rawa.
- (4) Strategi penataan ruang peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan lahan serta upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan meliputi :
- a. meningkatkan interaksi antar kawasan sentra produksi dengan menciptakan pusat kawasan dan wilayah sekitarnya sebagai pendukungnya;
 - b. meningkatkan pertumbuhan wilayah secara merata melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan baru;
 - c. meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - d. memberantas praktek- praktek penebangan liar; dan
 - e. memulihkan Daerah Aliran Sungai kritis dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Strategi penataan ruang pengembangan agribisnis peternakan yang berbasis sumber daya lokal meliputi :
- a. meningkatkan produksi peternakan unggulan daerah;
 - b. membangun infrastruktur peternakan yang mendukung kelancaran usaha, industri pengolahan dan pemasaran;
 - c. mengembangkan teknologi pengolahan hasil peternakan melalui fasilitasi sarana dan prasarana penunjang untuk pengolahan hasil peternakan; dan
 - d. membangun sarana dan fasilitas pemasaran produk peternakan.

- (6) Strategi penataan ruang pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang lebih optimal secara lestari meliputi:
- menata dan mengembangkan kawasan pesisir;
 - menyediakan dan meningkatkan infrastruktur perikanan dan aksesibilitasnya ke sentra-sentra produksi perikanan;
 - menciptakan dan mengembangkan peluang pasar yang seluas-luasnya bagi produk perikanan yang berorientasi pasar;
 - membuka peluang investasi yang seluas-luasnya bagi usaha di bidang perikanan dan kelautan.
- (7) Strategi penataan ruang peningkatan kualitas pengelolaan Sumberdaya Alam secara efisien dan ramah lingkungan serta pengurangan ketergantungan pada energi fosil untuk jangka panjang meliputi:
- meningkatkan upaya rehabilitasi lahan-lahan kritis dengan menggerakkan partisipasi dan dukungan masyarakat;
 - meningkatkan kapasitas produksi listrik non fosil untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan masyarakat baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang;
 - melakukan kajian dan pengembangan terhadap potensi energi baru terbarukan untuk dijadikan energi alternatif. dan
 - memanfaatkan potensi sumber energi setempat untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di pedesaan.
- (8) Strategi penataan ruang perwujudan keterkaitan antar kepariwisataan daerah terhadap potensi daerah lain yang memiliki keunggulan wisata bertaraf nasional dan internasional meliputi:
- meningkatkan promosi obyek wisata alam dan bahari;
 - mengembangkan potensi desa untuk dikembangkan sebagai desa wisata;
 - mengembangkan dan melestarikan wisata sejarah budaya;
 - mengembangkan prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur pariwisata daerah; dan
 - mengembangkan Kota Tanjung Selor dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan serta salah satu daya tarik rekreasi dan pariwisata daerah.
- (9) Strategi penataan ruang pengutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada seluruh bidang pembangunan meliputi :
- melaksanakan rehabilitasi dampak kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta habitatnya.
 - menetapkan batas kawasan konservasi
 - melindungi pelestarian ekologi pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir
 - mengoptimalkan fungsi hutan bakau
- (10) Strategi penataan ruang peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi:

- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
- c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

2.4.4 Rencana Struktur Wilayah Perkotaan

Sistem perkotaan di Kabupaten Bulungan merupakan pusat-pusat kegiatan yang saling terkait yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Bulungan merupakan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah kabupaten, yang dapat terdiri atas:

- (1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

2.4.4.1 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kabupaten Bulungan

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/ kota. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud dalam PP No 26 tahun 2008 Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:

- (1) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
- (2) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
- (3) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kabupaten Bulungan, sedangkan Kota Tanjung Selor telah ditetapkan dalam PP No 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) di mana Kota Tanjung Selor ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan kriteria II/ C/ 1.

Fungsi Kota Tanjung Selor akan ditingkatkan melalui skenario pengembangan periode hingga 20 tahun ke depan, yaitu sebagai berikut :

- (1) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana regional melalui pengembangan pusat perkantoran pemerintahan kabupaten menjadi pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), pusat jasa perdagangan, pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat pelayanan sosial ekonomi lainnya, sehingga Kota Tanjung Selor dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan sekaligus sebagai pusat pelayanan sosial, ekonomi, budaya dan hankam. Jika ini dilakukan, maka Kota Tanjung Selor dapat berperan seperti Samarinda, terutama sebagai lokasi pemerintahan, distribusi dan alokasi barang-barang kebutuhan pokok.
- (2) Perbaikan kualitas lingkungan fisik Kota Tanjung Selor, melalui peningkatan bidang prasarana utilitas, meliputi transportasi (darat, sungai, udara), drainase (air kotor, air bersih, air untuk pertanian), sampah, listrik, telekomunikasi.

2.4.4.2 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Bulungan

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam PP No 26 tahun 2008 Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:

- (1) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/ atau
- (2) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/ beberapa kecamatan.

Dalam rangka memacu pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan intra wilayah, maka pusat-pusat perkotaan akan dikembangkan agar mampu menjadi simpul pemacu perkembangan bagi wilayah sekitarnya. Skenario perencanaan terdapat beberapa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Bulungan, yaitu

- (1) Gunung Putih dan Tanjung Palas,
- (2) Gunung Sari (Tanjung Selor)
- (3) Tanah Kuning (Tanjung Palas Timur)
- (4) Karang Agung (Tanjung Palas Utara)
- (5) Kota Bunyu (Kecamatan Bunyu)

Kota dan desa tersebut dipertimbangkan dengan menilai lokasi untuk peningkatan fungsi pusat pemerintahan kabupaten, pusat-pusat ekonomi perkotaan, pusat-pusat permukiman desa, dan pusat sentra-sentra produksi.

2.4.4.3 Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Bulungan

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Skenario dalam perencanaan terdapat beberapa Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Bulungan, yaitu

1. Sekatak Buji (Kecamatan Sekatak)
2. Salimbatu (Kecamatan Tanjung Palas Tengah)
3. Long Beluah (Kecamatan Tanjung Palas Barat)
4. Long Tunggu (Kecamatan Peso Hilir)
5. Long Bia (Kecamatan Peso)

2.4.4.4 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Bulungan

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Skenario dalam perencanaan terdapat beberapa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Bulungan, yaitu

- (1) Apung, Bumi Rahayu, Tengkapak, Salimau (Kec. Tanjung Selor)
- (2) Silvi Rahayu, Antal, Lubuk, Tanjung Buka, Tias (Kecamatan Tanjung Palas Tengah)
- (3) Binai, Sajau Pura, Sajau, Wano Mulyo, Tanjung Agung (Kecamatan Tanjung Palas Timur)
- (4) Merapi, Mara, Longsam, Kali Keluh (Kec. Tanjung Palas Barat)
- (5) Lembu, Longbang, Naahaya (Kecamatan Peso Hilir)
- (6) Longbuang, Longisau, Longlian, Lepakaru, Longbalau (Kec. Peso)
- (7) Antutan, Terras Nawang (Kecamatan Tanjung Palas)
- (8) Pimping, Kelumbir, Rahui Rahayu, Panca Agung Ardi Mulyo, Ancam, (Kecamatan Tanjung Palas Utara)
- (9) Matandau, Bangara, Pentian, Bangkatan, Kalasiu, Paruk Keriting, Kalisawan, Terindak, Gerising, Turung, Tenggiling (Kec. Sekatak)
- (10) Bunyu Timur Dan Bunyu Selatan (Kecamatan Bunyu)

2.4.5 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten Bulungan

Rencana pembangunan sistem jaringan di Kabupaten Bulungan meliputi :

1. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi,
2. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi,
3. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi,
4. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air,

2.4.5.1 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan

Jaringan jalan dengan ketentuan lebih rinci, mengenai jaringan transportasi jalan raya pada wilayah kabupaten mengikuti ketentuan menteri pekerjaan umum tentang fungsi jalan. Jaringan jalan di Kabupaten Bulungan terdiri atas:

- (1) Jaringan Jalan Lintas Nasional (Trans Kalimantan) yang berada di wilayah Kabupaten Bulungan dari Tanjung Redep – Tanjung Selor – Matadau – Bangara – Bekakung – Malinau
- (2) Jalan Kolektor Primer yaitu jalan dari Tanjung Redep –Tanjung Selor – Malinau
- (3) Jaringan jalan provinsi yang berada pada wilayah di Kabupaten Bulungan terdiri atas jalan dari Tanah Kuning – Tanjung Selor – Gunung Putih – Karang Agung – Sekatak Buji
- (4) Jaringan jalan kabupaten yang terdiri atas: Jalan yang menyusur tepi sungai Kayan dari Tanjung Selor – Long Beluah – Long Tunggu – Naahaya – Long Bia, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan dan pusat-pusat desa
- (5) Jalan khusus (jalan perkebunan, jalan pertambangan), berupa jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri;
- (6) Jalan dan jembatan, meliputi pembangunan jalan/ jembatan baru untuk membuka kawasan terisolasi, untuk meningkatkan kelancaran pemasaran hasil-hasil produksi, serta untuk meningkatkan kelancaran kegiatan ekonomi, sosial dan budaya lainnya, antara lain pembangunan jalan dan jembatan (luncuran), berupa
 - a. Pelebaran jalan di kota Tanjung Selor dan kecamatan Tanjung Selor,
 - b. Pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Bulungan (lanjutan) di kecamatan Tanjung Selor dan kecamatan Tanjung Palas Tengah,
 - c. Pembangunan jalan di belakang Pasar Induk Tanjung Selor,
 - d. Pembangunan jalan simpang Tanah Kuning-Sajau Hilir,
 - e. Pembangunan Jembatan Pulau Payau – Tarakan.

2.1.5.2 Rencana Pengembangan Terminal

Rencana pengembangan terminal di Kabupaten Bulungan didasari dengan kemudahan tingkat pencapaian (aksesibilitas), dekat dengan pusat kegiatan, dan efektifitas pergerakan.

Hal tersebut ditujukan agar pola sirkulasi kendaraan umum yang keluar masuk terminal tidak terganggu, memperlancar arus lalu lintas umum, memperkecil tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas serta tercipta keteraturan dan ketertiban lalu lintas.

Untuk rencana pengembangan terminal dan fasilitas perhubungan/ transportasi perlu diarahkan pada pusat-pusat pertumbuhan dan dibangun sesuai dengan jenis, kelas pelayanan. Rencana pengembangan terminal meliputi :

- (1) Terminal antar kota/ kabupaten/ wilayah dalam provinsi (AKDP) berupa terminal tipe a terletak di Km 2 Kota Tanjung Selor (Pusat Kegiatan Wilayah = PKW) sudah selesai dibangun tahun 2006, namun pemanfaatan belum optimal
- (2) Terminal wilayah kota (tipe b) direncanakan dibuat secara bertahap pada setiap Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu di Tanah Kuning, Gunung Putih, Karang Agung, Sekatak Buji, Salimbatu, Long Beluah, Long Tunggu, dan Long Bia.
- (3) Terminal lokal (tipe c) sesuai dengan hirarki pusat kegiatan atau sub terminal kota di setiap Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) atau di luar wilayah perkotaan
- (4) Pembangunan halte dan peningkatan sarana lalu lintas di wilayah perkotaan
- (5) Pembangunan pos penjagaan dan pengecatan trotoar,
- (6) Pemasangan variable message sign (VMS)

2.1.5.3 Moda Angkutan

Rencana pengembangan moda angkutan di Kabupaten Bulungan, lebih menitikberatkan pada aspek-aspek transportasi sebagai berikut :

- (1) Pemantapan peran dan fungsi terminal.
 - a. Mengoptimalkan fungsi terminal di KM 2 Tanjung Selor sebagai terminal utama/ Kabupaten.
 - b. Peningkatan manajemen lalu lintas termasuk terminal.

(2) Pelayanan moda untuk pergerakan intra kabupaten.

- a. Pemantapan dan pengaturan rute angkutan.
- b. Pengaturan operasional angkutan resmi dan menghapus operasional angkutan yang tidak resmi.

(3) Pelayanan moda untuk pergerakan regional.

- a. Pengembangan jaringan trayek angkutan desa dari Tanjung Selor ke :
 - Tanah Kuning sepanjang 86 (delapan puluh enam) kilometer;
 - Long Beluah sepanjang 65 (enam puluh lima) kilometer;
 - Long Bia sepanjang 127 (seratus dua puluh tujuh) kilometer;
 - Sekatak Buji sepanjang 106 (seratus enam) kilometer;
 - Karang Agung sepanjang 50 (lima puluh) kilometer;
 - Salimbatu sepanjang 30 (tiga puluh) kilometer;
 - Antutan sepanjang 30 (tiga puluh) kilometer;
 - Tanjung Palas sepanjang 20 (dua puluh) kilometer;
- b. Penyediaan jumlah angkutan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal wilayah, misalnya berupa jalur bus (*bus way*).

2.1.5.4 Transportasi Air

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi air di Kabupaten Bulungan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaringan transportasi sungai dan jaringan transportasi laut.

(1) Jaringan sungai dan penyeberangan mencakup:

- a. Alur pelayaran untuk kepentingan angkutan sungai dan alur pelayaran sungai yang terdapat pada wilayah Kabupaten Bulungan adalah Sungai Kayan dan Sungai Sekatak
- b. Pelabuhan sungai dan penyeberangan yang terdapat pada wilayah kabupaten Bulungan, direncanakan
 - Pembangunan dermaga sungai/ pelabuhan Ferry di Ancam (Kecamatan Tanjung Palas Utara)
 - Pembangunan dermaga penyeberangan di Tanjung Palas, di Tanjung Palas Hilir, di Salimbatu, di Antutan, di Long Tunggu, dan di Bunyu,
 - Pengerukan sungai Kayan.

- c. Lintas penyeberangan yang terdapat pada wilayah Kabupaten Bulungan adalah
 - Pembangunan fender demaga Kayan II dan Kayan III,
 - Fasilitas pergudangan
 - Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas pengairan,

(2) Sistem jaringan transportasi laut, mencakup:

- a. Pelabuhan laut yang akan dibangun di Kabupaten Bulungan adalah Pelabuhan Laut Nasional di daerah Mangkupadi Pindada.
- b. Pelabuhan khusus yang perlu dibuat adalah Pelabuhan Batubara.
- c. Alur pelayaran terdapat pada wilayah kabupaten dan sekitarnya bertaraf nasional, adalah *Lintas Penyeberangan Sabuk Utara* melalui wilayah perairan Kabupaten Bulungan

2.1.5.5 Rencana Sistem Jaringan Energi (Listrik) Wilayah

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi di Kabupaten Bulungan adalah rencana jaringan transmisi tenaga listrik 150 Kv, yang telah dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN). Jaringan transmisi tenaga listrik 150 Kv yang akan dibangun di wilayah Kabupaten Bulungan ada dua jalur, yaitu

- (1) Jaringan dari Tanjung Rendep -Tanjung Selor – Malinau
- (2) Jaringan dari Tanjung Selor – Tarakan.
- (3) Peningkatan sistem jaringan prasarana energi di samping skala besar tersebut, yang dilakukan oleh pemerintah daerah direncanakan meliputi
 - a. Jaringan prasarana energi yang mencakup:
 - Penjabaran jaringan pipa minyak dan gas bumi, di wilayah Kabupaten Bulungan.
 - Penjabaran jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 Kv ke wilayah Keb. Bulungan.
 - Lokasi gardu induk distribusi maupun pembangkit.
 - b. Program survei penggunaan energi, geologi dan pertambangan.
 - c. Pelayanan perizinan usaha pertambangan umum, minyak dan gas bumi, serta kelistrikan.
 - d. Bimbingan dan penyuluhan dalam bidang geologi, pertambangan umum, migas dan kelistrikan.

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi di Kabupaten Bulungan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah

- (1) Pengembangan tenaga listrik (rumah tangga dan industri),
- (2) Listrik perdesaan (PLN, swasta, koperasi dan swadaya masyarakat),
- (3) PLTA (pembangkit listrik tenaga air),
- (4) PLTGB (pembangkit listrik tenaga gas dan batubara),
- (5) PLTU (pembangkit listrik tenaga uap)
- (6) Energi lainnya seperti PLTMH (pembangkit listrik mikrohidro),
- (7) PLTS (pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin) serta informasi energi dan pemanfaatannya.

2.1.5.6 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Wilayah

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bulungan disesuaikan dengan kondisi wilayah.

- (1) Di wilayah berbukit/ pegunungan dapat diutamakan sistem nirkabel dengan penutupan wilayah *blankspot*,
- (2) Di wilayah pulau/ kepulauan diarahkan pada penggunaan kabel bawah laut dan/ atau sistem telekomunikasi satelit pada sistem utama.
- (3) Rencana program telekomunikasi merupakan rencana program pembangunan yang akan dilakukan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi, meliputi

- a. Meningkatkan infrastruktur pendukung pelayanan telekomunikasi, berupa
 - Infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan kabel telepon;
 - Infrastruktur telepon nirkabel (tanpa kabel) antara lain lokasi menara telekomunikasi termasuk menara *base transceiver station (BTS)*;
- b. Jaringan telekomunikasi satelit pada wilayah terpencil.

2.1.5.7 Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air Wilayah

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air, meliputi: sumber-sumber air baku untuk kegiatan permukiman perkotaan dan jaringan air baku

wilayah, sistem jaringan irigasi, sungai, danau, waduk, DAS/ wilayah sungai, dan lainnya. Jaringan sumberdaya air di Kabupaten Bulungan

- (1) Rencana pembuatan sarana dan prasarana air baku nasional (SWS Strategi Nasional) yang terletak 4 (empat) kabupaten (Bulungan, malinau, Tana Tidung, dan Nunukan), sedangkan yang berada di Kabupaten Bulungan, terletak di Kecamatan Sekatak bagian barat, Kecamatan Peso bagian utara, dan Kecamatan Peso hilir bagian utara.
- (2) Rencana pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumberdaya air lainnya, berupa rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
 - a. Sungai di Kabupaten Bulungan sebanyak 48 sungai dan beberapa sungai di pulau-pulau kecil antara lain di Pulau Bunyu, Pulau Tibi, Pulau Payau, Pulau Baru, Pulau Ibus, Pulau Tudung, Pulau Mening, Pulau Mapat.
 - b. Daerah aliran sungai (DAS) Kayan yang sangat luas dan mendominasi wilayah Kabupaten Bulungan, DAS Berau yang ada di kabupaten Bulungan ada di wilayah perbatasan (Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur), DAS Sesayap di Kabupaten Bulungan di Kecamatan Sekatak, dan terdapat 22 Sub-DAS di Kabupaten Bulungan
- (3) Rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.
- (4) Rencana pengendalian banjir berupa rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai tepi sungai Kayan di Tanjung Selor, di Tanjung Palas, di Kampung Lebong-Terras Baru, di Salimbatu, di Terras Nawang, di Antutan.
- (5) Rencana pembangunan infrastruktur pedesaan, berupa pembangunan sarana prasarana air bersih pedesaan.

2.1.5.8 Rencana Sistem Jaringan Sanitasi Wilayah

Pembahasan mengenai rencana sistem jaringan sanitasi wilayah dibedakan dalam 2 pembahasan, seperti diuraikan di bawah ini.

1. Sistem Jaringan Drainase

Keutuhan sistem jaringan drainase sangat diperlukan guna kepentingan pengaliran air, terutama limpasan air hujan untuk mengantisipasi/menghindari genangan. Arahana mengenai kebutuhan pengembangan jaringan drainase di Kabupaten Bulungan direncanakan dengan 2 (dua) sistem, yaitu; jaringan drainase tertutup dan jaringan terbuka. Sistem jaringan tertutup diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki intensitas kegiatan tinggi, seperti di pusat-pusat perkotaan, sedangkan sistem jaringan terbuka diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki intensitas kegiatan rendah, seperti kawasan di luar pusat kota, kawasan permukiman kepadatan rendah, kawasan pertanian dan sebagainya.

Rencana penanganan drainase di wilayah Kabupaten Bulungan drainase meliputi :

- a. Pembangunan saluran drainase perdesaan;
- b. Pembangunan saluran drainase perkotaan;
- c. Peningkatan kualitas saluran drainase perdesaan;
- d. Peningkatan kualitas saluran drainase perkotaan; dan
- e. Pemeliharaan saluran drainase makro dan mikro.

2. Sistem Pengelolaan Sampah

Persoalan mengenai sampah merupakan persoalan yang cukup serius di hampir semua tempat, terutama yang perkembangannya cukup pesat dari waktu ke waktu.

Rencana penanganan sampah di Kabupaten Bulungan yang diperlukan adalah sistem pengelolaannya yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat serta memperluas jangkauan pelayanannya, karena pada saat ini pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah masih terbatas pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Selor, Tanjung Palas dan Bunyu. Untuk wilayah Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas penanganan sampah dikelola oleh DKPP dan PMK Kabupaten Bulungan

sedangkan wilayah Kecamatan Bunyu dikelola oleh pihak Kecamatan Bunyu. Rencana sistem jaringan persampahan di Kabupaten Bulungan meliputi :

- a. Pembangunan Tempat Penampungan Akhir (TPA) meliputi :
 - Kecamatan Tanjung Selor seluas 20 (dua puluh) hektar; dan
 - Kecamatan Bunyu seluas 10 (sepuluh) Hektar.
- b. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi :
 - Kecamatan Tanjung Palas Utara seluas 2,5 (dua koma lima) hektar; dan
 - Kecamatan Tanjung Palas Tengah seluas 2,5 (dua koma lima) hektar.

2.1.6 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- (1) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
- (2) Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- (3) Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- (4) Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- (1) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- (2) Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten;
- (3) Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
- (4) Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- (1) Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;

- (2) Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta rencana rincinya;
- (3) Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
- (4) Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- (5) Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Rencana alokasi pemanfaatan/ peruntukan ruang Kabupaten Bulungan dapat dikelompokkan menjadi dua kawasan, yaitu: kawasan berfungsi lindung (non budidaya) dan kawasan berfungsi budidaya.

- (1) Kawasan berfungsi lindung (non budidaya) meliputi kawasan dengan pemanfaatan hutan lindung, pantai berhutan bakau, sempadan sungai, dan sempadan pantai.
- (2) Kawasan berfungsi budidaya meliputi
 - a. Kawasan budidaya kehutanan (KBK). Kawasan budidaya kehutanan meliputi pengembangan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi konversi.
 - b. Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). Kawasan budidaya non kehutanan meliputi kawasan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan) kawasan permukiman, kawasan perdagangan, kawasan industri, kawasan pertambangan, dan kawasan pariwisata.

2.1.7 Rencana Kawasan Lindung

1. Rencana kawasan hutan lindung di Kabupaten Bulungan pada rencana pola ruang alternatif I seluas 232.348,65 Ha. Hutan lindung terletak di bagian barat Kabupaten Bulungan. Hutan lindung terletak di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Rencana pemantapan kawasan hutan lindung di Kabupaten Bulungan didasarkan atas pertimbangan kelayakan fisik dan penetapan pada Pola Ruang Nasional (PP No 26 Tahun 2008) tentang Penetapan Kawasan Hutan di Propinsi Kalimantan Timur. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Bulungan antara lain memiliki fungsi mencegah terjadinya erosi/ bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi

hidrologis tanah serta menjaga ketersediaan hara tanah, air tanah/ mata air, air permukaan, dan perlindungan keanekaragaman hayati.

2. Rencana kawasan lindung pantai berhutan bakau (mangrove) di Kabupaten Bulungan dalam rencana pola ruang Alternatif I seluas 85.126,53 Ha. Rencana pemantapan kawasan lindung pantai berhutan bakau di Kabupaten Bulungan ini didasarkan atas pertimbangan hasil analisis berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa.
3. Rencana kawasan lindung sempadan sungai di Kabupaten Bulungan terletak di kiri kanan seluruh jaringan sungai yang terdapat di Kabupaten Bulungan, baik sungai besar maupun sungai kecil. Mengingat jumlah sungai yang demikian banyak dan kedalaman rencana pada skala 1:50.000, maka tidak dilakukan penghitungan terhadap luas kawasan sempadan sungai.
4. Rencana kawasan lindung sempadan pantai di Kabupaten Bulungan, terletak 200 meter dari batas tertinggi pasang pantai. Kawasan sempadan pantai ini terletak di sebelah Timur, memanjang arah Utara-Selatan, serta pada pulau-pulau kecil yang terdapat di Kabupaten Bulungan. Mengingat kedalaman rencana disajikan skala 1:50.000, maka tidak dilakukan perhitungan terhadap luas kawasan sempadan pantai. Rencana pemantapan kawasan sempadan pantai di Kabupaten Bulungan, didasarkan pertimbangan hasil analisis berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

2.4.8 Rencana Kawasan Budidaya

1. Rencana kawasan budidaya kehutanan (KBK) adalah
 - a. Rencana pengembangan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) pada rencana pola ruang alternatif I seluas 261.622,93 Ha. Hutan Produksi Terbatas (HPT) berlokasi di wilayah yang telah ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas yang bertujuan untuk meningkatkan produksi kayu di Kabupaten Bulungan.
 - b. Rencana pengembangan Kawasan Hutan Produksi (HP) pada rencana pola ruang alternatif I seluas 328.590,88 Ha. Kawasan Hutan Produksi (HP) berlokasi di

wilayah yang telah ditetapkan sebagai hutan produksi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi kayu di Kabupaten Bulungan. Pengembangan Hutan Produksi diusahakan melalui pengembangan sistem tumpang sari dengan tanaman pertanian (agroforestry), yaitu pemanfaatan lahan pada tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian (buah-buahan).

2. Rencana kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) adalah
 - a. Rencana kebun campuran (perkebunan/ kebun/ tegalan/ ladang), merupakan pengembangan kawasan budidaya pertanian diarahkan untuk pemanfaatan kebun campuran dengan tanaman perkebunan dan tanaman pangan lahan kering (hortikultura). Pemanfaatan kawasan ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bentuk-bentuk kegiatan pertanian, baik kegiatan perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, dan sebagainya, pada dasarnya dapat menggunakan areal yang sama, agar lebih fleksibel dan lebih memberi kemudahan ke pihak investor untuk memilih lokasi yang sesuai untuk pengembangan kegiatan pertaniannya.
 - b. Rencana Kawasan Pertanian Lahan Basah (Sawah) merupakan kawasan pengembangan usaha masyarakat lahan basah akan diarahkan pada desa-desa yang berlokasi di sekitar daerah aliran sungai dan berpotensi untuk dapat dialiri irigasi yang terdapat di Kabupaten Bulungan.
 - c. Rencana Kawasan Perikanan Tambak merupakan pengembangan kegiatan perikanan payau, terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Timur.
 - d. Rencana kawasan perkotaan (kawasan permukiman padat), di Kabupaten Bulungan diarahkan pada pengembangan permukiman perkotaan kota yang dapat memenuhi kebutuhan lingkungan hunian yang serasi dan selaras. Rencana pengembangan permukiman perkotaan di Kabupaten Bulungan akan diarahkan pada permukiman perkotaan Tanjung Selor (PKW), dan pusat-pusat perkotaan akan dikembangkan agar mampu menjadi simpul pemacu perkembangan bagi wilayah sekitarnya, yaitu Gunung Putih dan Tanjung Palas (PKL), Tanah Kuning (PKL), Salimbatu (PKL), Karang Agung (PKL), Sekatak Buji (PKL), dan Bunyu (PKL).
 - e. Rencana kawasan permukiman desa-kota (kawasan permukiman dengan kepadatan sedang), merupakan pusat pelayanan kawasan (PPK) adalah kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa. Permukiman dengan hunian sedang perlu perbaikan kampung dan penataan ulang untuk berkembang menjadi perkotaan, yaitu pengembangan permukiman Mangkupadi – Binai, Sajau – Apung, Salimbatu – Karang Agung – Ardimulyo, Periuk Keriting – Sekatak Buji, Mara, Long Beluah, Long Tunggu, dan Long Bia. Rencana permukiman desa-kota (kawasan permukiman dengan kepadatan sedang).

- f. Rencana kawasan permukiman pedesaan (kawasan permukiman dengan kepadatan rendah) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa daerah pertanian/ lading, daya dukung lingkungan rendah, dan permukiman hunian maksimum 50 persen.
- g. Tubuh air berupa sungai-sungai besar dan rawa yang tidak masuk dalam zonasi pola ruang wilayah di Kabupaten Bulungan. Sungai-sungai tersebut tidak hanya panjang, namun juga lebar-lebar sehingga mempunyai luasan yang tidak sedikit. Luas tubuh air di Kabupaten Bulungan 42.149,79 Ha

2.4.9 Institusi dan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bulungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulungan yang terlibat langsung dalam pengelolaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan PMK, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan.